KE DEPAN PERAN MPR SEMAKIN KUAT MENGAWAL BANGSA DAN NEGARA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EDISI NO.09/TH.XVII/SEPTEMBER 2023

SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2023

KEMBALI SEMARAK SETELAH BERAKHIR MASA PANDEMI COVID-19

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

28 **Nasional**
Bung Karno Titip Pancasila Tidak Wariskan Militer Kuat

32 **Kajian MPR**
Akademisi Banten Bahas Perubahan UUD

39 **Selingan**
Rangkaian Panjang Membangun Kereta Layang

64 **Sosialisasi**
Demokrasi di Indonesia Belum Sesuai Harapan

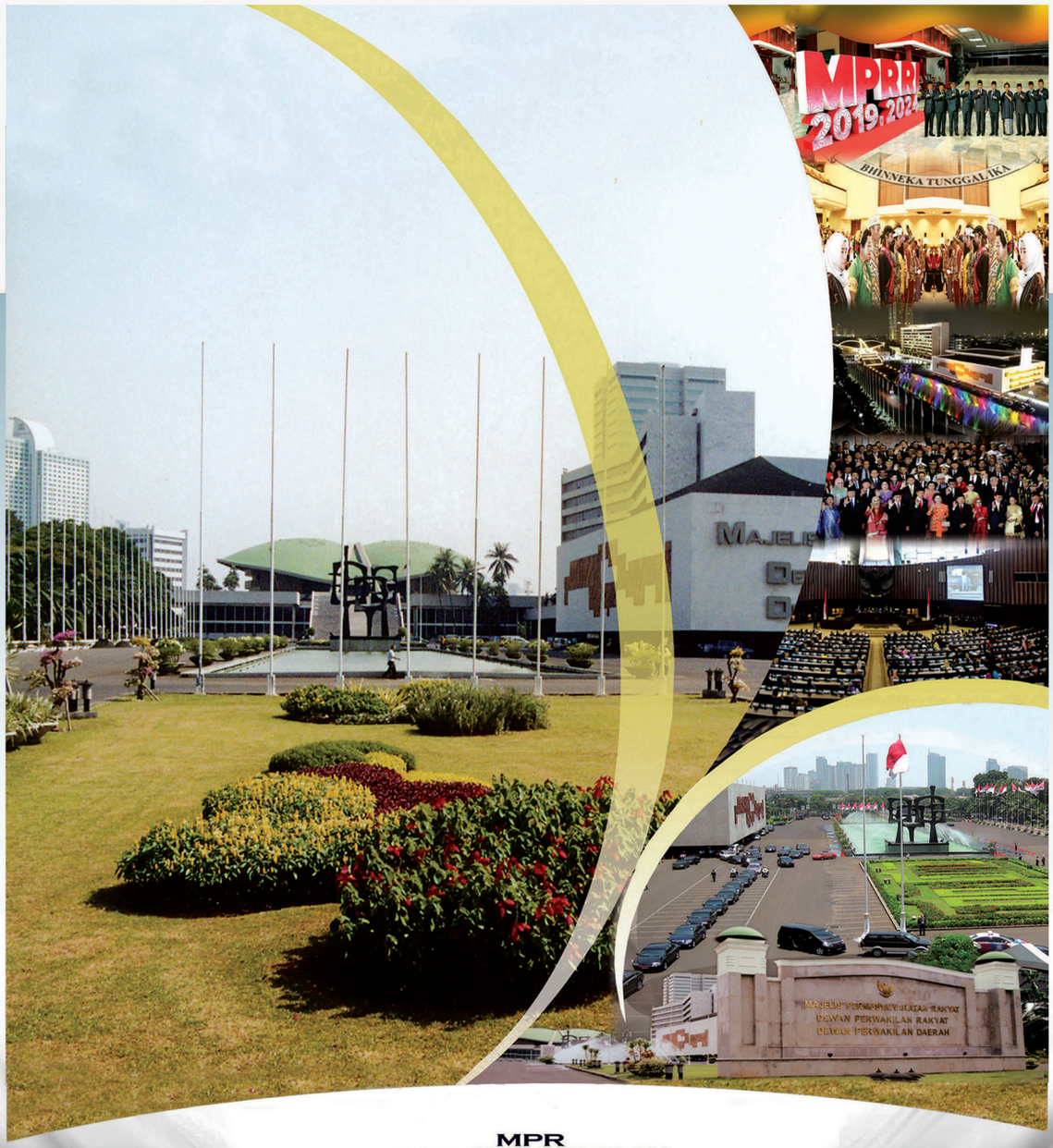

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Sidang Tahunan MPR Tahun 2023

Usai pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD menjadi istimewa karena dihadiri banyak tokoh nasional, pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para teladan, dan tak ketinggalan Raja-Raja Nusantara. Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 tidak hanya digelar secara sederhana, tetapi juga semarak.

16 Nasional

HUT ke-78 MPR RI: Gelar Wayang Kulit dengan Lakon "Semar Boyong"

64 Sosialisasi

Diskusi Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI

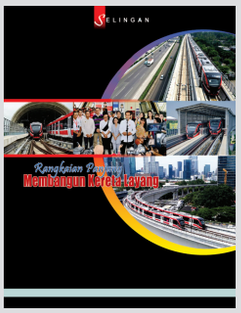

39 SELINGAN

Membangun Kereta Layang

80 Profil

Ahmad Muzani

Pengantar Redaksi 04

Perspektif 06

Kajian MPR 32

Kolom 36

Aspirasi Masyarakat 47

Gema Pancasila 48

Varia MPR 72

Wawancara 74

Figur 76

Ragam 78

Dari Rumah Kebangsaan 84

Rehal 86

COVER

Edisi No.09/TH.XVII/September 2023

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Sidang Tahunan MPR, Hari Konstitusi, dan Peringatan HUT ke-78 MPR RI

PADA Rabu, 16 Agustus 2023, MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura atau Gedung Hijau. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sudah menjadi konvensi ketatanegaraan Indonesia yang digelar sejak tahun 2015. Agenda tunggal sidang paripurna ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI menyambut HUT Ke-78 Kemerdekaan Indonesia dan penyampaian laporan kinerja lembaga negara.

Sidang Tahunan MPR yang digelar secara sederhana dan simpel ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Tanimbar dari Maluku didampingi Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin yang mengenakan baju adat Demang khas Betawi didampingi Wurry Estu Handayani. Pimpinan MPR hadir secara lengkap, yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, dan Fadel Muhammad.

Sidang Tahunan MPR ini juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dan para Wakil Ketua DPD, serta pimpinan lembaga negara, Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden Ke-10 Jusuf Kalla dan Sinta Nuriyah istri Presiden Indonesia ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para Ketua Umum Partai Politik, serta duta besar negara-negara sahabat.

Sidang Tahunan MPR pada tahun ini menjadi istimewa karena digelar usai pemerintah mencabut status pandemi Covid-19 sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Sidang paripurna ini dihadiri 489 anggota dari 711 total anggota MPR RI. Selain itu, Sidang Tahunan MPR ini merupakan Sidang Tahunan MPR terakhir sebelum pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden – wakil presiden (Pilpres) Pemilu 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024.

Melalui Sidang Tahunan MPR ini rakyat bisa mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan, MPR RI tetap merupakan lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat. Sebagai pemegang kewenangan tertinggi mengubah dan menetapkan konstitusi, MPR RI memiliki visi sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat.

Selang satu hari setelah Sidang Tahunan MPR, pada Jumat, 18 Agustus 2023, MPR RI menggelar peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Peringatan Hari Konstitusi bertema: "Pemilu 2024: Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Yang Mempersatukan Bangsa" terasa istimewa, karena dihadiri Presiden RI Joko Widodo, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Wakapolri, dan para pimpinan lembaga negara.

Rangkaian kegiatan MPR di bulan Agustus ini ditutup dengan Tasyakuran Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 MPR RI di Lobi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 Agustus 2023. Sebelum sampai pada acara puncak, MPR RI menggelar serangkaian kegiatan, yaitu pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon "Semar Boyong" oleh Ki Purbo Asmoro di Lapangan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat malam, 25 Agustus 2023, lomba tulis jurnalistik dan lomba foto, lomba ilustrasi, lomba video modul ajar, lomba podcast, lomba catur dengan peserta Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), serta lomba stand up comedy dengan tema: "Kebhinnekaan dalam Pesta Demokrasi". Semua rangkaian kegiatan MPR ditutup dengan Tasyakuran Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Plt. Jenedjri M. Gaffar
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Indro Gutomo
KOORDINATOR REPORTASE
Euis Karmila
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta , Alfonso DK Tahapary
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

BHINNEKA TUNGGAL IKA

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara
INDONESIA

Menjadikan Indonesia Visioner dan Sigap Menanggapi Tantangan Zaman

KEDAULATAN rakyat yang kembali diwujudnyatakan dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hendaknya memunculkan tambahan kekuatan untuk mewujudkan komunitas negara-bangsa yang visioner dan kompeten menanggapi tantangan zaman. Untuk alasan itulah sangat penting bagi generasi muda Indonesia rasional dalam mengunakan hak pilihnya.

Tema tentang rasionalitas pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi relevan untuk dikedepankan, karena komunitas pengguna hak pilih dalam Pemilu itu didominasi generasi Z dan generasi Milenial. Kedua komunitas generasi inilah yang sedang dan akan terus menghadapi perubahan zaman dengan segala tantangannya pada dekade-dekade mendatang. Kepada mereka perlu dibangkitkan kepedulian pada aspek tata kelola negara-bangsa. Sebab, masa depan negara-bangsa ada di pundak mereka.

Mengacu pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akumulasi atau jumlah pemilih generasi Z dan milenial mencapai lebih dari 113 juta atau 56,45% dari total DPT yang 204.807.222 pemilih. Jumlah pemilih dari generasi milenial tercatat 66.822.389 atau 33,60%, sedangkan total pemilih dari komunitas generasi Z mencapai 46.800.161 pemilih atau 22,85%. Mereka bukan hanya sekadar berpartisipasi, melainkan akan menjadi faktor yang cukup menentukan dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden serta pemilihan para anggota DPR/MPR dan DPD.

Pemilu 2024 menjadi sarana bagi puluhan juta orang muda – sebagian berstatus pemilih pemula — mewujudnyatakan kedaulatan mereka sebagai putera-puteri bangsa. Menggunakan hak pilih masing-masing secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, mereka akan memilih figur pemimpin nasional dan para anggota parlemen.fifur-figur alternatif yang akan mereka pilih sudah terpampang di ruang publik, baik untuk figur calon presiden, maupun 9.919 figur bakal calon legislatif (bacaleg) DPR yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Karena hasil dari setiap Pemilu selalu berkait langsung dengan perjalanan sejarah dan masa depan bangsa, setiap individu pemilih selalu disarankan untuk rasional ketika menggunakan hal pilihnya. Dalam konteks rasionalitas pemilih, mungkin tidak mudah dirumuskan karena tersedia sejumlah pilihan dalam setiap kontestasi. Apalagi, setiap pengguna hak pilih menetapkan pilihan berdasarkan kalkuasi dan selera masing-masing.

Namun, karena negara-bangsa di era terkini sudah berketetapan untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, rasionalitas pemilih generasi Z dan generasi milenial pada Pemilu 2024 pun idealnya berpijak pada semua tantangan terkini serta tantangan masa depan. Maka, hasil Pemilu 2024 hendaknya menghadirkan gambaran yang produktif.. Hasil Pemilu 2024 idealnya memunculkan tambahan kekuatan untuk mewujudkan negara-bangsa yang visioner, dan kompeten menanggapi tantangan zaman.

Dengan begitu, Pemilu 2024 tak sekadar sarana mewujudnyatakan kedaulatan setiap individu warga negara. Pemilu 2024 hendaknya juga menjadi upaya bersama semua elemen rakyat merumuskan strategi dan program untuk menjawab ragam tantangan era terkini dan tantangan masa depan. Karena kebutuhan itulah dari rasionalitas pemilih harus dimunculkan pemimpin nasional yang visioner. Figur pemimpin yang bukan sekadar ingin meraih kekuasaan, melainkan figur pemimpin yang memahami perubahan zaman dengan segala konsekuensinya.

KPU sudah menetapkan DCS Bacaleg Pemilu 2024, sedangkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mulai dibuka 19 Oktober, terbuka selama 38 hari, hingga 25 November 2023. Profil calon presiden pun sudah ditampilkan. Publik pun sudah disajikan tontonan tentang manuver semua partai politik peserta Pemilu 2024. Semua manuver itu membantu masyarakat untuk berkalkulasi dan membuat pertimbangan sebelum menggunakan hak pilihnya nanti.

Untuk melengkapi materi kalkulasi dan pertimbangan masyarakat pemilih, cukup relevan untuk selalu menyegarkan ingatan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah merumuskan dan menetapkan peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam peta jalan itu, disebutkan ragam tantangan dan program-program untuk menjawab semua tantangan itu. Semua itu dirumuskan untuk menandai satu abad usia kemerdekaan Negara Kesatuan

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Republik Indonesia (NKRI).

"Indonesia 2045 adalah negara tangguh dan mandiri, modern, dan terus tumbuh dengan basis kekayaan sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi dalam peradaban masyarakat maritim modern," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Februari lalu. Indonesia memprioritaskan optimalisasi bonus demografi, memastikan kesejahteraan masyarakat sebelum memasuki usia lanjut, menciptakan middle-class job secara masif, melaksanakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Sebagaimana dipahami bersama, perubahan zaman yang juga ditandai dengan perubahan iklim atau pemanasan bumi mendorong semua bangsa, termasuk Indonesia, memperbarui strategi pembangunan masing-masing. Indonesia pun berfokus pada kemandirian dan ketahanan pangan, percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT), percepatan tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berfokus pada tersedianya jumlah talenta digital yang memadai, hingga konsisten menjalankan program hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Sumber daya alam (SDA) yang dikuasai negara menjadi begitu berharga karena dibutuhkan pasar dan komunitas internasional, kini dan di masa depan. Mengacu pada potensi kebutuhan dan permintaan itu, hilirisasi potensi SDA harus dilaksanakan dengan konsisten, karena konsistensi hilirisasi menjadi momentum bagi percepatan transformasi ekonomi nasional, dengan menjadikan investasi dan industri serta produktivitas sebagai basis kekuatan.

Momentum percepatan transformasi ekonomi dengan hilirisasi SDA jangan disia-siakan lagi. Kekayaan SDA Indonesia berlimpah. Dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara hingga kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, teh dan rempah-rempah lainnya. Harus tumbuh keberanian dan kemauan mengelola dan mengolah SDA dengan penuh kebijaksanaan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dengan bertekad mewujudkan hilirisasi potensi SDA, konsekuensi logisnya adalah berhenti menjual komoditas atau SDA mentah. Hilirisasi harus dilaksanakan dengan konsisten agar sektor industri Indonesia didorong terus melakukan pendalaman agar mampu mengolah ragam SDA itu menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar global. Hilirisasi, at all cost, harus segera dimulai karena hilirisasi SDA akan menumbuhkembangkan ragam sub-sektor industri di dalam negeri..

Sukses masa depan sebuah bangsa tidak hadir secara alamiah atau serta merta. Profil Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan melalui proses pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 mengisyaratkan hadirnya empat pilar utama dalam dimensi pembangunan, meliputi pembangunan manusia serta penguasaan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola.

Berdasar gambaran itu, masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya diharapkan bisa membuat kalkulasi dan pertimbangangan tentang sosok calon pemimpin nasional yang kompeten dan kapabel menanggapi tantangan zaman. Utamakan rasionalitas menuju pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024. ❑

Sidang Tahunan MPR Tahun 2023

Kembali Semarak Setelah Berakhir Masa Pandemi Covid-19

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Usai pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD terasa istimewa, karena dihadiri banyak tokoh nasional, pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para teladan, dan tak ketinggalan Raja-Raja Nusantara. Meski berlangsung sederhana, namun Sidang Tahun 2023 tetap semarak.

MENJELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD serta peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, selalu bersolek. Sama seperti tahun lalu, pada 2023 ini Komplek Parlemen Senayan kembali dipercantik menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menghadiri Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura, pada Rabu 16 Agustus 2023 itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan menyambut HUT Ke-78 Kemerdekaan Indonesia dan membacakan laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Sehari sebelum sidang paripurna sudah terlihat dekorasi di Gedung Nusantara, tempat berlangsungnya sidang paripurna untuk Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Di bagian lobi luar Gedung Kura-Kura atau Gedung Hijau itu sudah berjejer rapi karangan bunga. Di sepanjang jalan memasuki lobi yang diapit air mancur terpasang karpet merah. Jalan inilah yang selalu dilalui Presiden dan Wakil Presiden serta para pejabat negara yang turun dari mobil untuk masuk ke Gedung Nusantara.

Di lobi bagian dalam Gedung Nusantara juga sudah terpasang karpet merah menuju ruang tunggu VVIP dan lift menuju lantai 2 tempat ruang sidang paripurna. Pada bagian tengah lobi dipasang banner HUT Ke-78 Kemerdekaan Indonesia yang dihiasi motif batik berwarna krem. Lampu-lampu gantung yang menyala terang di lobi bagian dalam Gedung Nusantara ini semakin mempercantik ruangan lobi.

Masih di bagian dalam lobi, tiang-tiang marmer dibalut hiasan spanduk bergambar tarian daerah dengan nuansa merah putih. Sebagian tiang lainnya dibalut kain berwarna merah dan putih. Sedangkan di dekat escalator menuju lantai dua (tempat ruang sidang) terlihat meja yang disiapkan untuk akses masuk VVIP. Mesin metal detector pun sudah terpasang pada akses masuk para pejabat itu.

Secara keseluruhan Gedung Nusantara dihiasi kain merah putih. Nuansa ini terlihat sangat mencolok pada dinding-dinding di luar gedung. Dekorasi bunga-bunga bernuansa merah putih pun terlihat di sekitar lobi luar gedung hingga taman-taman di sekitar Gedung Nusantara. Semua tampak bersih dan tertata dengan rapi.

Pada Rabu, 16 Agustus 2023, sejak pukul 06.00 WIB pagi aktifitas sudah menggeliat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Kegiatan paling mencolok pada pagi hari itu adalah pengamanan dari aparatur keamanan dan pengamanan dalam (Pamdal). Pengamanan di area Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,

diperketat. Sejumlah aparatur keamanan dan TNI serta Polri sudah berjaga di sejumlah titik pintu masuk komplek perkantoran wakil rakyat itu. Beberapa akses atau pintu masuk menuju Gedung Nusantara juga diperketat dengan metal detector yang dijaga Paspampres.

Di titik-titik tertentu seputaran Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, sudah diparkir kendaraan-kendaraan taktis milik kepolisian dan TNI. Kendaraan taktis seperti panser, barakuda, water canon, hingga ambulance dari RSPAD juga sudah disiagakan. Pun disiapkan kendaraan helikopter yang parkir di lapangan dekat Gedung Nusantara.

Mereka yang akan memasuki Kompleks Parlemen harus menunjukkan kartu identitas, atau kartu undangan bagi para tamu undangan, serta ID khusus Sidang Tahunan bagi para awak media yang ingin memasuki Gedung Nusantara. Suasana Komplek Parlemen Senayan sudah ramai menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang dimulai pada pukul 9.30 WIB hari itu.

Keramaian pada Sidang Tahunan MPR tahun 2023 ini memang agak berbeda dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pada tahun sebelumnya (tahun 2020, 2021, dan 2022). Pada tiga tahun belakangan, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR masih dalam masa pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan pembatasan-pembatasan, baik dalam jumlah anggota MPR yang hadir secara fisik maupun penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pada waktu itu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR secara sederhana dan relatif tanpa keramaian.

Saat ini pandemi Covid-19 sudah berakhir. Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi sudah mencabut status pandemi pada Rabu, 21 Juni 2023. Karena itu, Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD pada 16 Agustus 2023 digelar secara normal seperti sebelum pandemi sehingga tak ada lagi pembatasan-pembatasan. Bahkan, MPR telah menyebar lebih dari 1.500 undangan untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR Tahun 2023.

Selain itu, Sidang Tahunan MPR ini digelar di tengah tahun politik, 2023-2024. Sidang Tahunan MPR ini menjadi Sidang Paripurna MPR terakhir sebelum Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Sidang Tahunan MPR ini menjadi istimewa karena menjelang Pileg (pemilihan anggota legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden). Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 ini pun menjadi Sidang Tahunan MPR yang terakhir di Jakarta. Jika tidak ada halangan, tidak tertutup kemungkinan, Sidang Tahunan MPR tahun depan akan digelar di IKN Nusantara bersamaan dengan penyelenggaraan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI.

Itulah sebabnya, Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD menjadi istimewa, karena dihadiri banyak tokoh nasional, pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para teladan, dan tak ketinggalan Raja-Raja Nusantara. Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 tidak hanya digelar secara sederhana, tetapi juga semarak.

Sekitar pukul 08.04 WIB Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz tiba di Gedung DPR. Mengenakan jas berwarna krem Hamzah Haz disambut oleh Pimpinan MPR, di antaranya Ahmad Basarah, Yandri Susanto, serta sejumlah anggota DPR yang telah hadir di lokasi. Juga telah tiba, Presiden RI Ke-5

Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 Jusuf Kalla dan Ibu Sinta Nuriyah, istri Presiden Indonesia ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pun sudah hadir, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pakaian Adat Tanimbar

Tak lama setelah beberapa menteri hadir, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin beserta istrinya, Wury Estu Ma'ruf Amin, juga tiba di lokasi acara pada pukul 08.28 WIB disambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Selanjutnya Wapres menuju ruang tunggu utama dan menanti kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Iriana Jokowi.

KH. Ma'ruf Amin melanjutkan tradisi memakai pakaian adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023. Untuk tahun ini, Wakil Presiden RI mengenakan Pakaian Adat Demang dari DKI Jakarta. Pakaian adat Betawi yang dikenakan Wapres berwarna hitam dipadu dengan kain bertumpal berwarna cerah dengan hiasan kuku macan di dada menemani lambang kepresidenan, serta peci berwarna hitam.

Pakaian adat Betawi yang dipakai Wapres ini memiliki makna kegagahan dan kesopanan. Sedangkan peci sebagai penutup kepala melambangkan ketaatan dan kecerdasan. Sementara, Ibu Wury tampak anggun mengenakan kebaya nasional berwarna coklat dipadukan dengan selendang berwarna senada dan songket Bali bernuansa gelap.

Tidak lama setelah itu, Presiden RI Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo tiba di lokasi disambut iringan musik. Keduanya disambut oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang langsung mendampingi menuju ruang VVIP. Jokowi juga melanjutkan tradisi mengenakan pakaian adat. Pada tahun ini, Presiden mengenakan pakaian adat dari Tanimbar, Maluku. Sebagai informasi, Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu kabupaten di Maluku yang berbatasan dengan Australia. Sementara itu, Ibu Negara mengenakan kebaya berwarna oranye cerah.

Presiden terlihat menggunakan baju berlengan panjang berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam beserta kain tenun Tanimbar, khas Maluku. Warnanya hitam bercorak merah, lengkap dengan aksesoris kepala berbulu warna coklat. Kemudian, ikat kepala yang dipakai melambangkan keagungan martabat warga Tanimbar. Ikat pinggang atau yang disebut Berun Ampil, merupakan kain yang dipasang dengan pernak pernik melambangkan kewibawaan dan tanggung jawab.

Bukan Presiden saja yang mengenakan pakaiana adat. Dua orang ajudan Presiden juga berpakaian adat di Sidang Tahunan MPR. Keduanya adalah Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan Kapten (Inf) Mat Sony Misturi. Syarif Muhammad Fitriansyah terlihat menggunakan pakaian adat asal Dayak, Kalimantan, dan Mat Sony Misturi menggunakan pakaian adat asal Bali.

Tepat pukul 09.28, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD mendampingi Presiden dan Wakil Presiden RI memasuki Ruang Sidang Paripurna. Anggota MPR dan para undangan yang hadir dalam Sidang Paripurna ini memberikan aplaus tepuk tangan mengiringi jalan Presiden dan Wakil Presiden menuju tempat duduk yang telah disediakan. Suasana hening sejenak, sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang diiringi Korps Musik Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Acara kemudian dilanjutkan menghening-

kan cipta yang dipimpin Ketua MPR. Tepat pukul 09.38 Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai Pimpinan Sidang membuka secara resmi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023, sekaligus memberikan pengantar sidang. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," ujar Bamsoet saat membuka Sidang Tahunan MPR 2023.

Dalam sambutan pembukaan Sidang Tahunan MPR, Bamsoet juga membacakan 2 buah pantun. Uniknya, pantun itu menyinggung soal koalisi Pemilu 2024. "Burung perkutut di atas awan, terbang tinggi hinggap di pohon beringin, terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan, walaupun koalisi masih bisa berubah-ubah melalui Sidang Tahunan MPR ini mari jaga persatuan dan kesatuan," ujar Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini turut membacakan pantun terkait HUT ke-78 RI. "Bunga dadap di atas para, anak dusun pasang pelita. Sudah 78 tahun Indonesia Merdeka, saatnya kita wujudkan Indonesia jaya berlandaskan Pancasila," ucap Bamsoet.

Dalam paparan pengantar sidangnya, Ketua MPR mengingatkan bahwa kehadiran semua dalam forum Sidang Paripurna ini, berangkat dari sebuah komitmen kolektif kebangsaan, untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa ini tetap tegak lurus dan bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional, yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

"Kemerdekaan yang kita raih sejak 78 tahun yang lalu, tidaklah terlahir dari ruang hampa, bukan pula didapatkan secara instan, ataupun hasil pemberian, melainkan buah dari perjuangan dan pengorbanan, yang didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Ketua MPR juga mengajak dan mengingatkan seluruh elemen bangsa, di tengah kerja keras untuk menata ulang pembangunan ekonomi di segala bidang, seyogyanya juga dibarengi dengan penataan kembali demokrasi di Indonesia.

Usai Bamsoet menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyampaikan pidato. Di akhir pidato, La Nyalla mempersilakan presiden untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Kemudian, Presiden RI menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal terkait ekonomi Indonesia. Ia menyinggung beberapa hal, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga hilirisasi. Terkait infrastruktur, ia merespons kritik dari beberapa kalangan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan pemerintahannya. Kritikus itu menilai rakyat Indonesia sekarang lebih memerlukan makanan ketimbang jalan tol. "Rakyat kan makannya nasi, international trust tidak bisa dimakan. Ya, memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol tidak bisa dimakan, ya memang," kata Jokowi.

Jokowi tak mempersoalkan semua kritik itu. Justru ia malah senang dengan semua kritik yang diarahkan pada kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahannya. Ia juga tak mau menghabiskan energi untuk merespons kritik tersebut. Pasalnya, itu bisa jadi tidak produktif. "Ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif itu. Tapi enggak apa saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton," katanya.

Dalam pidatonya, Jokowi juga membahas hilirisasi. Ia menjelaskan Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber daya alamnya. Menurutnya, memiliki kekayaan alam saja tidak cukup, negara juga harus mampu mengolahnya dengan memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi rakyatnya. "Kita tidak boleh menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan," tegas Jokowi.

Di akhir pidatonya, Jokowi mengungkapkan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa. "Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, Terus Melaju untuk Indonesia Maju," ungkapnya.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2023 ditutup dengan pembacaan doa, kemudian persembahan lagu-lagu daerah. Ketua DPD RI kemudian menutup secara resmi Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. ❑

DER/MBO/BSC

Sidang Tahunan MPR RI 2023

Pimpinan MPR Bersyukur Sidang Tahunan MPR Berjalan Lancar

SIDANG Tahunan MPR tahun 2023 sudah berlangsung pada Rabu, 16 Agustur 2023, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR – DPD dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, serta pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, mantan presiden dan mantan wakil presiden, duta besar negara sahabat, dan sebanyak 498 anggota dari 711 anggota MPR.

Agenda Sidang Paripurna ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI menyambut HUT Ke-78 Kemerdekaan Indonesia dan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sidang diawali pidato pengantar Ketua MPR Bambang Soesatyo, dilanjutkan dengan pidato pengantar Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, kemudian pidato kenegaraan Presiden RI.

Berikut tanggapan dari Pimpinan MPR tentang pidato pengantar Ketua MPR dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2023.

Sjarifuddin Hasan

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA

Berbicara tentang pelaksaan Sidang Tahunan MPR 2023, Sjarifuddin Hasan menyampaikan bahwa semua terlihat baik dan lancar. "Ya memang kalau ada masalah sedikit itu hal yang wajar. Ke depan yang sudah baik pertahankan dan ditingkatkan kualitasnya," kata Pimpinan MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang biasa disapa Syarief Hasan kepada *Majelis*.

Syarief Hasan sangat mendukung pernyataan Ketua MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian, masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut.

"Pemerintah harus memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut untuk mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Jawa Barat III ini.

Syarief Hasan menekankan, pemerintah mulai saat ini harus lebih fokus dalam program pengurangan kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial untuk rakyat miskin yang masih banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dua isu tersebut (kemiskinan dan perlindungan sosial) adalah masalah yang sangat butuh perhatian pemerintah saat ini. "Jika ini dilakukan maka Pancasila benar-benar terimplementasikan dengan baik dan memang sudah seharusnya begitu," ujarnya.

Fadel Muhammad

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Fadel Muhammad

Fadel Muhammad mengucap syukur atas keberhasilan MPR menggelar Sidang Tahunan MPR tahun 2023. Apalagi, sidang berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Selain itu, ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar sidang dengan sangat baik, berisi materi-materi yang pernah didiskusikan serta dialog dan masukan dari pimpinan MPR lainnya.

Seperti pidato yang disampaikan Bamsoet, kata Fadel, MPR bermaksud melakukan kegiatan yang sangat penting, yaitu beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Antara lain, menggagas kembali kemungkinan melahirkan lagi haluan negara, dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Juga kemungkinan mengembalikan MPR menjadi Lembaga tertinggi negara, lebih tinggi dari Lembaga-lembaga negara yang lain.

"Tetapi, pembahasan itu seyogyanya dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 14 Februari 2024 agar memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat. Dan,

tidak mengganggu stabilitas keamanan yang semakin rawan jelang Pemilu 2024," kata Fadel kepada *Majelis.*

Dalam Sidang Tahunan kali ini, kata Fadel, materi yang disampaikan baik oleh Ketua MPR maupun Pidato Presiden Joko Widodo terkesan ringkas, jelas, dan padat. Salah satunya, seperti ungkapan keinginan oleh Ketua MPR agar lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki fungsi serta kedudukan yang lebih jelas.

Sayangnya, ada catatan berupa pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Pasalnya, hingga periode kedua, sejak sidang tahunan dilaksanakan Pimpinan MPR belum berhasil menghadirkan ketua-ketua lembaga negara untuk menyampaikan pidato pertanggungan jawab hasil kinerjanya langsung kepada masyarakat di hadapan anggota MPR.

Lestari Moerdijat

Arsul Sani

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mengingatkan agar peningkatan keterampilan dan akademis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus dibarengi dengan penguatan idealisme dan nasionalisme setiap anak bangsa. "Bonus demografi merupakan modal penting bagi bangsa ini untuk mencapai target menuju Indonesia Emas 2045," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis.

Menurut Lestari, terpenting semua pihak harus sepakat bahwa Indonesia Emas 2045 adalah kesempatan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan dunia. "Saat ini, di era globalisasi yang diwarnai dengan berbagai perubahan, pemerintah sudah merealisasikan program pembangunan untuk menancapkan dasar-dasar untuk mencapai target Indonesia Emas 2024," ujar Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu menyebutkan, pada 2030 mendatang jumlah usia produktif di Indonesia akan mendominasi komposisi demografi. Karena itu, pada 15 tahun kemudian kelompok produktif itu sudah matang dan menjadi pemangku kebijakan di negeri ini. "Sehingga upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak bangsa melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang merata merupakan langkah penting yang harus direalisasikan sejak dini," tegasnya.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, memberi penjelasan tentang isu amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang muncul dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Isu amandemen UUD NRI Tahun 1945 itu muncul dalam pidato pengantar Ketua MPR Bambang Soesatyo dan pidato pengantar Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Kamis, 16 Agustus 2023.

Arsul Sani mengatakan, amandemen yang disampaikan Ketua MPR dan Ketua DPD terdapat perbedaan yang substansial. "Dalam pidato pengantar Ketua MPR, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud adalah amandemen yang sifatnya terbatas, yaitu untuk menempatkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan keperluan adanya aturan-aturan konstitusional bila terjadi situasi kedaruratan yang menyebabkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Aturan konstitusional itu belum ada," katanya.

Sedangkan amandemen dalam pidato pengantar yang disampaikan Ketua DPD adalah amandemen untuk kembali pada UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), setelah itu dilakukan addendum. "Bagi kami di MPR, apa yang disampaikan Ketua DPD adalah hak konstitusional dan pendapat DPD. Kita hormati," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP ini.

Namun, lanjut Arsul Sani, amandemen UUD baik usulan MPR maupun DPD harus mengikuti aturan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal itu disebutkan amandemen UUD harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain usul amandemen harus diajukan oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. "Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota. Kalau hanya DPD yang jumlah 136 anggota saja yang mengusulkan amandemen UUD, maka belum cukup untuk mendorong proses amandemen UUD," terangnya.

Arsul menambahkan, Pimpinan MPR telah berkomunikasi dengan Presiden dan menyepakati diskursus amandemen dengan menyertakan partisipasi publik dilakukan setelah Pemilu 14 Februari 2024. ❑

DER/MBO/BSC

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023

Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Pentingnya PPHN

Sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR – DPD di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam pidato pengantarnya, Bambang Soesatyo kembali menegaskan tentang pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Bangsa Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal.

Karena itu, Bamsoet menyebutkan, sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh. Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Karena itu, kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," ujar Bamsoet.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Hadir, antara lain Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI Ma'ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI AA. Lanyalla Mahmud Mattalitti, istri presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, para Wakil Ketua MPR RI, para Wakil Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPD RI, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR RI, duta besar negara sahabat, raja-raja nusantara, ketua ormas keagamaan, serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bangsa Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada sumber daya alam mentah. Di awal kemerdekaan hingga tahun 90-an, sumber daya alam berupa minyak mentah, gas alam dan batubara serta hasil alam lainnya menjadi penopang utama sumber devisa yang berkonsekuensi pada stabilitas moneter. Namun, kekayaan alam yang luar biasa besar tersebut tidak berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral. Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

"Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian, masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus-menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tantangan lain dalam perekonomian nasional juga hadir pada sektor keuangan, di mana aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi. Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat.

"Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Di samping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi dan membuka kesempatan lapangan kerja baru. Di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, diterbitkannya UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, harus dapat menjadi landasan untuk penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini.

"Untuk itu, kita harus mengembangkan industri keuangan digital agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen. Penguatan daya saing industri keuangan digital, akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan," katanya.

Pada bagian lain pidato pengantarnya, Bamsoet menyebutkan, idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas, 23 Mei 2023 yang lalu. "Karena itu, setelah 25 tahun memasuki era Reformasi sejak tahun 1998, kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara," ujarnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bamsoet mengajak untuk menelaah persoalan, bagaimana jika menjelang Pemilu terjadi sesuatu di luar dugaan, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi. Maka secara hukum, tidak ada presiden dan/atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu.

"Dalam keadaan tersebut timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan Pemilu? Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika Pemilu tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?" tanyanya.

Bamsoet menjawab, pentingnya mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI, seperti halnya Presiden yang memiliki kewenangan PERPPU manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa. TAP MPR RI merupakan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal dalam skala besar.

"Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara," pungkas Bamsoet. ❑

HUT ke-78 MPR RI

Bamsoet Gelar Wayang Kulit dengan Lakon 'Semar Boyong'

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kisah Semar Boyong adalah satir kehidupan, betapa keteladanan yang disimbolkan oleh sosok Semar, saat ini menjadi sebuah barang langka sehingga harus diperebutkan.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, dalam melaksanakan tugas konstitusional MPR, khususnya dalam membangun wawasan kebangsaan, program-program MPR harus lebih 'membumi'. Pemilihan seni budaya, semisal wayang, sebagai salah satu metode pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan, tidak hanya dipertimbangkan dari sisi daya jangkau audiens yang sangat luas. Tetapi juga dari banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

"Kita bersyukur bahwa pemerintah memiliki sikap keberpihakan dan kepedulian yang sama untuk melestarikan kesenian wayang kulit. Melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo bahkan telah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Bahkan, di level internasional, UNESCO sejak tanggal 7 November 2003 telah menetapkan wayang kulit sebagai mahakarya kebudayaan di bidang cerita narasi, serta warisan budaya yang indah dan bernilai tinggi," ujar Bamsoet saat membuka Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka peringatan dan tasyakuran hari jadi ke- 78 MPR RI di Kompleks Parlemen, Jumat malam (25/8/2023). Pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Purbo Asmoro ini menampilkan lakon 'Semar Boyong.'

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kisah 'Semar Boyong' menggambarkan ketika dunia terguncang oleh huru-hara, kedamaian terkoyak oleh nafsu angkara, sosok Semar kemudian mengemuka. Semar yang kharismatik dan bersahaja dipandang sebagai tokoh kunci yang akan menghadirkan kedamaian.

"Kisah Semar Boyong adalah satir kehidupan, betapa keteladanan yang disimbolkan oleh sosok Semar, saat ini menjadi sebuah barang langka sehingga harus diperebutkan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ini menilai, secara kasat mata, Semar bukanlah sosok yang 'indah' dipandang mata, sudah tua, tambun, dan bungkuk. Namun jika dilihat lebih dalam ternyata begitu banyak makna filosofis yang dapat digali dari penggambaran sosok Semar.

Rambut kuncung penuh uban mencerminkan kematangan dan kedewasaan dalam pemikiran, sikap, dan perilaku. Mata yang sayu adalah simbol kepekaan untuk menangkap keprihatinan dalam realitas sosial, serta empati terhadap penderitaan sesama. Hidung sunthi (membulat kecil) melambangkan ketajaman dalam mencium tanda-tanda zaman.

"Anting cabai merah di telinga, mengisyaratkan kesediaan untuk mendengarkan masukan, nasihat, dan kritikan, meskipun itu terasa pedas. Mulut yang senantiasa tersenyum mengandung makna bahwa Semar adalah sosok yang senantiasa berupaya untuk menghibur dan menggembirakan orang lain," urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, pagelaran wayang adalah aktualisasi seni budaya yang syarat makna. Sebuah tontonan yang dapat dijadikan tuntunan. Dari penggambaran karakter dan narasi alur cerita yang disajikan banyak benang merah yang dapat dipadankan relevansinya dan dirujuk kontekstualitasnya.

Misalnya, sebut Bamsoet, dalam konteks kehidupan berbangsa, tidak lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak 2024. Kita dapat mengambil hikmah dari lakon Semar Boyong bahwa permusuhan dan pertikaian, apapun alasannya, tidak pernah menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun setiap menjelang pemilu, suhu politik biasanya semakin memanas, kita tidak boleh menjadikan Pemilu 2024 sebagai arena permusuhan yang mengakibatkan perpecahan. Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak boleh mencederai, apalagi merusak soliditas kebangsaan kita," pungkas Bamsoet. ❑

Tasyakuran Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR

Bamsoet: Ke Depan Peran MPR Semakin Kuat Mengawal Bangsa dan Negara

Sejarah MPR adalah cerminan sejarah negeri ini dalam pencarian jatidirinya. Sepanjang sejarah negeri ini, MPR terus mengalami perubahan dalam peran yang dimainkan, serta kekuasaan yang dimiliki.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di Plaza Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2023, MPR menggelar Tasyakuran Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR. Hadir dalam tasyakuran adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani; serta para Anggota MPR dari berbagai fraksi dan Kelompok DPD, dan ratusan pegawai di Lingkungan Setjen MPR.

Dalam kegiatan tersebut digelar berbagai kegiatan, seperti Pidato Ketua MPR, Podcast Uncensored Akbar Faizal, dan Final Stand Up Commedy.

Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo mengatakan rasa syukur yang mendalam bahwa hingga usianya yang ke-78, MPR RI telah menjadi bagian dari kerja keras bangsa ini untuk mencapai tujuan pemerintahan negara, sebagaimana disebutkan dalam staats-fundamentals-norm kita, yakni: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Menurut Politisi Partai Golkar itu, sepanjang sejarah negeri ini, MPR terus mengalami perubahan dalam peran yang dimainkan, serta kekuasaan yang dimiliki.

“Perubahan itu sejalan dengan dinamika dalam kehidupan politik di Indonesia, yang terus mencari bentuk terbaik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IMI itu menuturkan, sejarah MPR adalah cerminan sejarah negeri ini dalam pencarian jati-dirinya. “Saya yakin, pencarian jati-diri negeri kita ini tidak akan pernah berhenti selama Indonesia masih ada. Dinamika adalah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Alumni Program Doktor Universitas Padjadjaran itu menyebut hari ini kita bersyukur telah melampaui banyak dekade sejak mulai mendirikan negara ini dengan segala kelengkapan kelembagaannya. Hari ini pula, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, atas nama seluruh pimpinan dan anggota MPR RI, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada kami.

Disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bamsoet itu, MPR mengalami perubahan yang terus-menerus, sejalan dengan dinamika dalam kehidupan politik di Indonesia. Jika di masa lalu MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara, kini MPR adalah lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lain. MPR merupakan lembaga perwakilan, yang anggotanya memperolah mandat langsung dari rakyat, lewat pemilihan umum anggota DPR dan DPD.

Lebih lanjut dikatakan, peran yang bisa kami lakukan bagi negeri ini adalah amanat yang kami emban dengan penuh rasa bangga sekaligus rasa kerendahan hati. “Di masa depan, kita tidak tahu persis angin sejarah akan membawa MPR ke bentuk peran dan kekuasaan seperti apa. Tapi saya berharap, kita semua berharap, peran MPR di masa depan itu bisa kian kuat untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik”, harapnya.

Disebut beberapa harapan, khususnya agar MPR kembali punya kewenangan untuk merumuskan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), telah saya sampaikan di berbagai kesempatan. Saya tidak merasa perlu membahasnya secara rinci hari ini. “Namun kiranya perlu digarisbawahi bahwa kewenangan itu akan memberi peluang lebih baik bagi MPR untuk mengajak para pengelola negeri ini memandang lebih jauh ke depan, bagi kebahagiaan seluruh anak bangsa”, tegasnya. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Peringati Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI

Bamsoet Umumkan Peraih Gelar Beragam Lomba

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyerahkan berbagai hadiah kepada para juara lomba yang diselenggarakan MPR RI dalam memeriahkan HUT ke-78 MPR RI. Terdapat 8 lomba yang diselenggarakan, yakni: lomba ilustrasi, lomba video modul ajar, lomba podcast, lomba video explanatory, lomba karya jurnalis, lomba foto jurnalis, lomba turnamen catur, serta lomba stand up comedy.

"Selain untuk mendekatkan MPR RI kepada rakyat, berbagai lomba tersebut juga untuk memfasilitasi kreativitas para anak bangsa. Sekaligus membuktikan bahwa MPR RI hadir di tengah kehidupan generasi muda yang memiliki beragam hobi. Berbagai lomba tersebut juga sebagai bagian dari Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan cara unik, kekinian dan segar. Sesuai ciri khas generasi muda," ujar Bamsoet usai memberikan hadiah kepada para juara lomba dalam Tasyakuran Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI, di Plasa Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Selasa (29/8/23).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam lomba foto jurnalis, juara diraih oleh M.Taufan Rengganis dari Tempo dengan hadiah Rp 7.5 juta; juara 2 Galih Pradipta dari Antara dengan hadiah Rp 5 juta; juara 3 Sopian dari Akuratco dengan hadiah Rp 2.5 juta. Masing-masing juara juga mendapatkan trophy dan sertifikat.

Berikutnya, peserta lomba foto jurnalis yang memiliki nominasi, masing-masing: Didik Setiawan dari Inilahcom meraih Nominasi 1, Prayogi dari Republika meraih Nominasi 2, dan Nominasi 3 diraih oleh Hendra Eka dari Jawa Poas. Masing-masing peraih Nominasi mendapatkan hadiah Rp 1 juta, trophy, dan sertifikat.

Selanjut untuk pemenang lomba ilustrasi. Keluar sebagai pemenang adalah Aji Sasongko dari Banyumas, dan berhak mendapatkan hadiah Rp 15 juta. Sedangkan peserta yang berhasil menjadi nominator lomba ilustrasi, masing-masing: Nominator 1 untuk atas nama peserta Nur Rizka Ahmat dari Surabaya, dan Andy Santoso dari Bantul sebagai Nominator 2. Masing nominator mendapatkan hadiah Rp 5 juta.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini juga mengumumkan hasil Lomba Video Modul Ajar. Untuk jenis lomba yang satu ini, keluar sebagai pemenang adalah Eko Nur Fitrianto dari Bantul, dan untuk itu dia meraih hadiah Rp 15 juta. Sedangkan Nominator 1 dan 2 diraih Rizal Muhammad Zaid dari Lebak Bulus dan Nur Erniaty dari Pare-pare , yang masing-masing mendapatkan hadiah Rp 5 juta.

Bamsoet selanjutnya mengumumkan pemenang Lomba Podcast, yang berhasil dimenangkan oleh Zakky Muhammad Deanra dari Pulo Gadung Jakarta Timur, yang mendapatkan hadiah Rp 15 juta. Sementara untuk Nominator 1 dan 2 diraih Muhammad Fajri dari Depok, dan Fathian Hafiz Aulia dari Bekasi, masing-masing mendapatkan hadiah Rp 5 juta.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN

Indonesia ini menerangkan, Lomba Video Explanatory dimenangkan Jaka Purnama dari Pasuruan, Jawa Timur, dan berhak mendapatkan Rp 15 juta. Disusul Herlina Arista dari Serang, Banten, dan Seka Riski Esa Saputra dari Blitar Jawa Timur sebagai Nominator 1 dan 2, yang masing-masing berhak mendapatkan hadiah Rp 5 juta.

Untuk lomba Karya Jurnalis dimenangkan Sugandi dari Realita Rakyat yang mendapatkan hadiah Rp 7,5 juta; Juara 2 diraih Andoes Simbolon dari Berita Buana dengan hadiah Rp 5 juta; Juara 3 diraih Marhadi dari Pakuan Raya dengan hadiah Rp 2.5 juta. Seluruh juara juga mendapatkan trophy dan sertifikat. Selain Juara 1,2, dan 3, lomba karya jurnalis juga memiliki Nominasi 1 yang diraih Chaerul Umam dari Tribunnews, Nominasi 2 Asep Subagyo dari Lampu Hijau, serta Nominasi 3 Dominikus Dese dari Kabar Daerah. Masing-masing mendapatkan hadiah Rp 1 juta dengan trophy dan sertifikat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, lomba turnamen catur jurnalis, dimenangkan oleh: Friederich Batari dari JPNNcom sebagai juara 1 dengan hadiah trophy dan uang tunai Rp 5 juta. Juara 2 Miduk Siahaan dari Sumsel Update dengan hadiah trophy dan uang tunai Rp 4 juta. Serta juara 3 diraih Sugandi dari Realitarakyatcom dengan hadiah trophy dan uang tunai Rp 3 juta.

Lalu, untuk Lomba Stand up Comedy MPR RI, pemenangnya: Juara 1 diraih komika Suwarjo Wijaya yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai Rp 17 juta. Juara 2 dimenangkan M.Ronaldo, mendapatkan hadiah Rp 13 juta. Juara 3 dimenangkan oleh Darwin Moa yang mendapatkan hadiah Rp 10 juta, dan Juara Favorit diraih Awaludin dengan hadiah Rp 5 juta. ❑

Lomba Stand Up Comedy Kritik MPR RI

Bamsoet: Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI dengan Gaya Kekinian

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kembali menggelar lomba stand up comedy yang dikemas lebih segar dengan melibatkan wajah-wajah baru. Lomba stand up comedy kali ini menjadi lebih spesial karena dilaksanakan bersamaan dengan peringatan HUT MPR RI dan di tengah euforia masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024.

Lomba stand up comedy MPR RI kali ini mengangkat tema: 'Kebhinekaan Dalam Pesta Demokrasi' dihadiri, antara lain Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI Taufik Basari. Hadir pula sebagai juri final stand up comedy Jarwo Kuat, Iwel Sastra, dan Ridwan Remin.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, lomba stand up comedy tahun 2023 diikuti oleh 110 orang peserta pada babak penyisihan yang mengirimkan video kepada panitia. Video-video tersebut kemudian dinilai oleh juri dan terpilih sebanyak 25 orang yang mengikuti babak semifinal di Kompleks MPR RI pada tanggal 22 Agustus 2023. Hasilnya, 10 komika terpilih untuk maju di babak final hari ini.

"Lomba stand up comedy MPR RI merupakan cara kreatif MPR RI menyerap aspirasi guna menangkap, mencerna, mengelola, dan merespon berbagai realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI tidak hanya mengandalkan cara konvensional, seperti ceramah, forum diskusi, seminar dan lain-lain, yang kadangkala terkesan kaku," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, lomba stand up comedy MPR RI 2023 merupakan tahun kedua. Di tahun pertama penyelenggaraan lomba stand up comedy kritik MPR RI dilaksanakan pada Maret 2022. Juara 1 diraih Citra Sari, Juara 2 Rizky Shandi, Juara 3 Muklis Milu, serta Juara Favorit diraih Intan Latut Tuti.

Sebelumnya pada saat menjadi Ketua DPR RI, Bamsoet juga telah menggelar lomba stand up comedy Kritik DPR RI sebanyak dua kali. Pertama pada tahun 2018, Juara 1 diraih Aji, Juara 2 Marshel Widianto, serta Juara 3 Kiki Saputri. Sementara penyelenggaraan Lomba Stand up Comedy Kritik DPR RI kedua pada tahun 2019, Juara

1 diraih Yudha Ilham, Juara 2 M. Al Japri, Juara 3 Oby, serta Juara Favorit Ical Kate.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui lomba stand up comedy dibuat dengan harapan agar MPR RI semakin dapat membangun kepercayaan dan intimasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat semakin mendukung kerja-kerja MPR RI. Lomba stand up comedy MPR RI ini sekaligus menjadi menjadi ruang bagi publik, terutama generasi muda, untuk bisa saling mengedukasi dalam konteks pemahaman terkait Empat Pilar MPR RI dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang kreatif dan mengena di masyarakat," pungkas Bamsoet. ❑

Podcast Akbar Faizal Uncensored

Spesial HUT ke-78 MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Akbar Faizal mengungkapkan, konstitusi bangsa Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Meskipun sudah empat kali diamandemen, masih banyak ruang kosong yang tidak tercover oleh konstitusi. Konstitusi tidak memberikan 'pintu darurat' manakala terjadi kedaruratan.

Misalnya, tidak ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan karena gempa bumi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

megathrust, perang, kerusuhan massal, maupun karena pandemi.

"Jika Pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi, maka secara hukum tidak ada anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah maupun presiden dan/atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu. Menteri pun sudah berakhir masa jabatannya karena mengikuti masa jabatan presiden, dan yang tersisa hanya Panglima TNI dan Kapolri," ungkap Bamsoet dalam podcast Akbar Faizal Uncensored Spesial HUT ke-78 MPR RI, di Plaza Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Selasa (29/8/23).

Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan, dalam keadaan tersebut timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan darurat politik tersebut? "Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan Pemilu? Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika Pemilu tertunda?," ujar Bamsoet.

Turut hadir para pimpinan MPR RI, antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Hadir pula Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Martin Hutabarat dan Djamal Aziz, Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI Taufik Basari, serta Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di masa sebelum amandemen keempat konstitusi, MPR RI bisa mengeluarkan Ketetapan (TAP) yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi. Apakah kini MPR RI masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan TAP, itupun masih menjadi perdebatan. Namun pandangan Prof. Yusril bahwa MPR RI masih bisa mengeluarkan TAP, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam.

"Prof Yusril berpandangan, tanpa amandemen konstitusi maupun menunggu hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, MPR RI tetap bisa mengeluarkan TAP. Caranya, yakni melalui Sidang Paripurna MPR RI yang memutuskan bahwa MPR RI bisa mengeluarkan TAP MPR RI. Pasal 7 UU No.12/2011 menjelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UU/Perpu, dan seterusnya. Posisi TAP MPR yang lebih tinggi dari UU secara otomatis bisa menghapuskan ketentuan Penjelasan Pasal 7 UU No.12/2011 yang membatasi masa berlakunya TAP MPR RI," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan pentingnya mengembalikan kewenangan Subjektif Superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI, seperti halnya presiden yang memiliki kewenangan Perppu manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan memaksa. TAP MPR RI merupakan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antarcabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal dalam skala besar.

"Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara," pungkas Bamsoet. ❑

Terima Siswa Berprestasi Dunia

Fadel Muhammad Berpesan Agar Terus Berprestasi

Tim siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Tangerang Selatan berhasil menyisihkan tim peserta dari 19 negara di ajang 'The 10th Anniversary International Youth Robotic Competition 2023', Daejeon, Korea Selatan, dan menyabet Medali Emas di kategori Creative Design.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menerima kunjungan tiga siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) 1 Kota Tangerang Selatan Fawaaz Amaar Abdul Mughni, Razin Anandri Firdaus dan Muhammad Garibaldi Aziz, peraih Medali Emas di ajang 'The 10th Anniversary International Youth Robotic Competition 2023', Daejeon, Korea Selatan, yang digelar tanggal 4-5 Agustus 2023 lalu.

Ketiga siswa MTsN) 1 Kota Tengerang Selatan itu diterima di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Mereka didampingi Kepala MTsN 1 Kota Tangsel, Ade Zaenudin. Juga turut hadir Pembina Siswa Imam Sucipto, Guru/Wali Kelas Sri Rahayu, Pembina OSIS Raynaldi Azhari, dan perwakilan orang tua siswa.

Fadel Muhammad, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo saat menemui ketiga siswa berprestasi itu secara personal mengucapkan selamat, secara berulang kali mengacungkan jempol, dan sesekali menggelengkan kepala mendengar penjelasan pembina siswa, Imam Sucipto, seputar kompetisi robot dunia tersebut

"Kompetitor mereka sebanyak 20 negara dan anak-anak ini mampu menyabet *gold medal,* wow…Saya gembira dan bangga sekali bertemu dan bertatap muka dengan anak-anak bangsa yang mampu meraih prestasi tingkat dunia. Saya ucapkan selamat juga kepada pihak sekolah yang mampu mengantarkan siswanya meraih prestasi tinggi," ujarnya.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini memberikan pesan agar perolehan prestasi para siswa tidak hanya habis berujung sampai di sini. "Kalian jangan berhenti. Harus terus berjuang lagi terus berprestasi lagi dan lagi. Sebab, *success is a journey not a destination*. Sukses itu adalah perjalanan bukan sebuah tujuan," tambahnya.

Fadel Muhammad memberikan contoh perjalanan hidupnya yang penuh dengan karya dan perjuangan dengan konsisten mengadopsi prinsip sukses itu perjalanan bukan sebuah tujuan. Ia menceritakan apa yang dialaminya sejak SD, SMP, SMA masuk ke ITB, terus melakukan berbagai kegiatan dan karya, ikuti berbagai kompetisi untuk menjajal prestasi yang ada, sampai kemudian menjadi pengusaha, membuka pabrik besar Bukaka Teknik, memiliki beberapa paten di bidang engineering, seperti antara lain Garbarata, Crushing Plant, Asphalt Sprayer. Lalu, menjadi Gubernur di Gorontalo dua periode, menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi anggota DPR Komisi 11, menjadi senator di DPD, dan sekarang

dipercaya menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Kepada pihak sekolah, Fadel Muhammad berharap agar perjuangan para siswa harus terus dibimbing serta terus diberi semangat. "Saya harap pihak sekolah membuat program pembinaan khusus untuk robotik ini dan gali potensi program lainnya yang bagus-bagus. Mereka adalah generasi muda harapan bangsa. Generasi berpotensi besar seperti inilah yang kita harapkan menggantikan kita nanti di masa depan," tandasnya.

Usai pertemuan dengan Fadel Muhammad, Kepala MTsN 1 Kota Tangsel Ade Zaenuddin kepada media massa menyampaikan bahwa robotik adalah program ekskul sekolah, yang sifatnya kontinyu.

"Pesan dan harapan Bapak Fadel Muhammad sama dengan misi dan visi sekolah, yakni prestasi yang terus berkesinambungan. Kita akan laksanakan terus pembinaan dan bimbingan secara kontinyu. Dan, tentu, kami akan mengevaluasi juga seputar lomba-lomba yang kami ikuti sebagai bahan evaluasi, dengan tujuan ke depan menjadi lebih baik dan bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi," pungkasnya.

Sebagai informasi, 'The 10th Anniversary International Youth Robotic Competition 2023' adalah kompetisi robotik tingkat dunia, di mana ketiga siswa yang tergabung dalam Tim Madtsane Robotic menjadi salah satu peserta perwakilan Indonesia.

Kejuaraan ini diikuti lebih dari seribuan peserta dari 20 negara, diantaranya Malaysia, Thailand, Taiwan, Brazil, Mexico, Algeria, Columbia, Laos, China, Israel, Mongolia, dan tuan rumah Korea. Dari Indonesia sendiri ada puluhan tim sekolah yang ikut serta, baik dari Jakarta, Malang, Probolinggo, Pasuruan, termasuk Banten.

Ada beberapa kategori pada ajang kompetisi ini, antara lain Creative Design, Save The Forest, Humanoid, Push-Push dan Sumo. Dalam kompetisi, Tim Madtsane Robotic berhasil menyita perhatian para juri serta menyabet Medali Emas di kategori Creative Design, dengan menciptakan sebuah robot yang diberi nama LEWS (Landslide Early Warning System). Yakni, sistem robot pendeteksi dini potensi terjadinya tanah longsor, dampak lanjutan dari bencana alam seperti hujan ekstrim dan gempa bumi. ❑

Sosialisasi Germas

Syarief Hasan: Pendidikan dan Kesehatan Prioritas Utama

"Kunci pembangunan sumber daya manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dan kesehatan," kata Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan.

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., Rabu (23/8), menghadiri dan menjadi narasumber sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sjarifuddin Hasan, biasa disapa Syarief Hasan, mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. "Kunci pembangunan sumber daya manusia adalah pendidikan dan hidup sehat," katanya.

Komitmen kita, lanjut Syarief Hasan, adalah pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Kunci pembangunan sumber daya manusia adalah pendidikan dan kesehatan. "Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Itu prioritas utama, bukan infrastruktur," katanya dalam Sosialisasi Germas tersebut.

Juga hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi Germas terkait penyakit TBC ini adalah praktisi kesehatan dr. Herni Anggraeni dan Sulistyo, SKM., (Tim Kerja TBC Kemenkes).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menurut Syarief Hasan masalah pokok bangsa ini adalah pendidikan dan kesehatan. "Itu tolok ukur suatu negara untuk bisa dikatakan maju. Orang miskin salah satunya karena kesehatan. Karena kalau orang sakit maka biaya yang dikeluarkan cukup besar. Karena itulah kesehatan sangat penting," ujarnya.

"Hidup sehat sangat penting. Biar memiliki

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

uang, kedudukan, pangkat, tapi kalau tidak sehat maka tidak berarti apa-apa. Jadi seseorang harus sehat lebih dulu," sambungnya.

Menanggapi data yang menunjukkan Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di dunia dalam penyakit TBC, Syarief Hasan mengemukakan, ada dua penyebab tingginya penderita TBC di Indonesia. Pertama, karena jumlah penduduk Indonesia cukup besar. Indonesia menempati urutan keempat dunia dalam jumlah penduduk, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Penyebab kedua adalah karena pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi turun maka dapat dipastikan anggaran kesehatan juga turun. "Itulah yang menyebabkan ranking penderita TBC di Indonesia naik. Tapi dengan kinerja Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 dan seterusnya jumlah penderita TBC bisa dikurangi," kata politisi senior Partai Demokrat ini.

Syarief Hasan memaparkan, pertumbuhan ekonomi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhyono memulai pemerintahan pada tahun 2004 hanya berkisar 4%. Tapi, selama 10 tahun masa pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh enam persen.

"Artinya anggaran untuk kesehatan pun semakin tinggi. Dengan demikian sektor kesehatan kita bisa di-manage dengan baik, karena kepedulian pemerintah terhadap kesehatan semakin besar. Meskipun masih muncul masalah, tetapi selalu bisa diperbaiki," ujarnya.

Syarief Hasan kemudian membandingkan dengan masa pandemi Covid-19 lalu. Pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat minus 2,9%. "Ternyata, masalah kesehatan pada waktu itu sangat luar biasa. Kondisi kesehatan masyarakat pada saat itu cukup buruk. Banyak orang sakit, rumah sakit pun penuh karena Covid-19 dan penyakit lainnya," imbuhnya.

Tetapi Alhamdulillah, lanjut Syarief, pemerintah bisa mengatasi kondisi kesehatan masyarakat pada waktu itu. "Sekarang rata-rata pertumbuhan ekonomi 4-5%. Ini belum cukup, karena itu kita selalu mendorong agar anggaran kesehatan karena untuk sumber daya manusia menjadi perhatian. Ini adalah komitmen kita," kata anggota DPR dari dapil Kabupaten/Kota Cianjur dan Kota Bogor ini.

Bila pertumbuhan ekonomi naik, tambah Syarief Hasan, maka anggaran untuk sumber daya manusia yang dikelola, antara lain oleh Kementerian Kesehatan, pun akan lebih besar. "Ke depan, anggaran kesehatan akan ditingkatkan sehingga meskipun jumlah penduduk Indonesia bertambah, masalah kesehatan masih bisa ditangani," pungkasnya. ❑

Seminar Kebangsaan LDII

Bamsoet Ajak Hindari Politisasi Identitas di Pemilu 2024

Pemilu di Indonesia sangat kompleks, dengan biaya sangat mahal. Dana yang dikelola oleh KPU RI saja mencapai hampir Rp 77 triliun, belum termasuk dana yang dikelola lembaga-lembaga lain untuk menopang aktivitas pemilu, termasuk di TNI dan Polri.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menekankan tahun 2024 adalah penanda penting dalam demokrasi di Indonesia. Pada 2 Juli 2023, KPU RI telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) nasional yang ternyata mencapai hampir 205 juta pemilih, dengan lebih dari 50% pemilih perempuan. Di beberapa provinsi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, rata-rata jumlah pemilih mencapai 30-an juta pemilih. Sebagai gambaran, jumlah pemilih di Jawa Barat yang mencapai 35 juta orang, lebih banyak daripada jumlah penduduk Australia yang sekitar 27 juta orang.

Para pemilih akan memberikan suara di lebih dari 820 ribu TPS untuk memilih presiden dan wakil presiden RI, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Total ada 20.462 kursi di lembaga-lembaga legislatif yang akan diperebutkan oleh lebih dari 200 ribu calon anggota legislatif.

"Pemilu di Indonesia sangat kompleks, dengan biaya yang sangat mahal. Dana yang dikelola oleh KPU RI saja mencapai hampir Rp 77 triliun, belum termasuk dana yang dikelola lembaga-lembaga lain untuk menopang aktivitas pemilu, termasuk di TNI dan Polri. Pemilu memang mahal, namun itulah biaya yang harus dikeluarkan untuk menegakkan demokrasi secara prosedural," ujar Bamsoet dalam Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), secara virtual dari Jakarta, Rabu (23/8/23).

Turut hadir, antara lain Ketua Umum LDII KH. Chriswanto Santoso, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Paramadina Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Yudi Latif.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di negara-negara Asia Tenggara khususnya dan Asia pada umumnya, pengelolaan Pemilu termasuk yang paling tertata dan kerap dijadikan rujukan. Namun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri, ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan. Misalnya, terkait regresi demokrasi. Sejak tahun 2020 sudah ada beberapa publikasi, antara lain Thomas Power dan Eve Warburton (tahun 2020) yang menyoroti kekhawatiran demokrasi di Indonesia bergerak dari stagnasi menuju regresi dalam satu dekade terakhir.

"Laporan Democracy Index dari the Economist Intelligence Unit tahun 2022 mencatat Indonesia memperoleh skor demokrasi yang sama pada tahun 2021, yaitu 6,71 dari 10. Tetapi secara ranking demokrasi Indonesia mengalami penurunan, dari posisi 53 ke posisi 54 dari total 167 negara," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, persoalan lainnya yakni politisasi identitas yang menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam tiga edisi terakhir pemilihan, yakni Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi politik yang begitu besar. Hal tersebut tampaknya masih akan terus berlanjut pada Pemilu 2024, lantaran perbedaan afiliasi politik di antara masyarakat.

Sebagaimana terekam dalam laporan survei Litbang Kompas bertajuk: "Tantangan Menepis Polarisasi Politik Pemilu 2024", sebanyak 27,1% responden menilai sikap saling tidak menghargai pilihan atau intoleransi menjadi sumber utama terjadinya polarisasi ketika Pemilu.

Politik uang juga masih menjadi persoalan besar yang dihadapi. Merujuk hasil pemetaan

kerawanan Pemilu dan pemilihan menyoal politik uang yang dilakukan Bawaslu pada tahun 2023, terdapat lima provinsi paling rawan yang perlu mendapatkan pengawasan ketat. Yakni, Maluku Utara dengan skor 100, Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara skor 38,89.

"Jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Semua kabupaten di sana masuk dalam kategori rawan. Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara," terang Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Universitas Borobudur dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad (PADIH Unpad) ini juga menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu dan penyelenggara Pemilu yang cenderung menurun tiap tahunnya. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam masa pra dan pasca Pilkada DKI 2017, serta pra dan pasca Pemilu 2019, membuktikan hal itu. Hasil survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik dari 82,3% menjadi 78,1%. Selain itu, survei litbang Kompas pada awal tahun 2023 juga menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPU hingga hanya menjadi 62%.

"Disisi lain, pengawasan rakyat pasca Pemilu juga masih lemah. Aktivitas pengawasan warga yang efektif memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat yang demokratis. Pengawasan ini berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan pejabat terpilih, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik. Namun, dalam implementasinya, pengawasan oleh warga negara cenderung melemah setelah pemilu dilaksanakan," pungkas Bamsoet. ❑

Penutupan PKKMB Unair

Ahmad Basarah: Bung Karno Titip Pancasila, Tidak Wariskan Militer Kuat

Jika kekuatan militer yang diwariskan para founding fathers kepada kita, sangat mungkin militer melemah. Ideologi akan terserap dalam jiwa, terlaksana dalam tindakan moral.

WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengajak semua generasi bangsa terus mensyukuri nikmat persatuan bangsa di tengah multikulturalisme yang subur di negeri ini. Pilihan pendiri bangsa yang tidak mewariskan militer kuat untuk negeri ini, tapi justru menitipkan Pancasila harus dipuji, sebab ideologi yang kuat terbukti mampu membentengi bangsa dari perpecahan.

"Jika kekuatan militer yang diwariskan para founding fathers kepada kita, sangat mungkin militer melemah. Ideologi akan terserap dalam jiwa, terlaksana dalam tindakan moral. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia bisa mencari sendiri cara-cara luhur untuk memecahkan persoalan kebangsaan yang mereka hadapi," tegas Ahmad Basarah di depan 9.000 mahasiswa baru Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Sabtu (26/8/23).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Berbicara dalam acara penutupan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unair, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini bercerita bahwa pada April 1960, Presiden Soekarno berkunjung ke Yugoslavia. Negeri Balkan ini, saat itu, dipimpin PM. Josep Broz Tito dan Yugoslavia adalah negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1 Februari 1950 melalui PM Edvard Kardelj.

Dalam salah satu obrolan, lanjut Ahmad Basarah, Bung Karno bertanya pada Josep Broz Tito apa yang akan diwariskannya

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kepada Yugoslavia setelah ia wafat. Dengan mantap ia menjawab akan mewariskan angkatan perang yang kuat untuk melindungi keutuhan Yugoslavia.

"Tito kemudian balik bertanya kepada Bung Karno apa yang akan ia wariskan kepada Indonesia jika ia wafat nanti. Bung Karno langsung menjawab, ia mewariskan Pancasila sebagai jalan hidup bangsa yang akan ditinggalkannya. Terbukti, Indonesia sampai sekarang masih berdiri, tapi setelah Tito wafat tahun 1980, Yugoslavia bubar tahun 1995," cerita Ahmad Basarah yang disambut tepuk tangan para mahasiswa.

Berbicara dengan tema: 'Urgensi Eskalasi Moral Bagi Generasi Muda,' Ketua DPP PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa Pancasila bisa mengakar di setiap jiwa anak bangsa, sebab ideologi ini memang digali dari nilai-nilai luhur yang mengakar di tengah nenek moyang Nusantara.

"Sejak dulu nenek moyang kita memang bertuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan, gemar bersatu dan bergotong royong, lebih memilih musyawarah ketimbang konflik, dan anti pada mereka yang tidak berkeadilan. Makanya, ketika nilai-nilai yang sudah ratusan tahun berkembang di tengah masyarakat itu dirumuskan dalam satu pemikiran bernama Pancasila, dengan sendirinya ideologi ini mudah kita terima," tegas Ahmad Basarah.

Pernyataan Ahmad Basarah diperkuat oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Dr. H. Anwar Sadad, yang tampil sebagai narasumber kedua. Dia menambahkan, Indonesia bisa merdeka pada 17 Agustus 1945 karena ada sejumlah anak-anak muda yang nekat membacakan proklamasi kemerdekaan dengan konsekuensi mereka ditangkap pemerintah Belanda.

"Kalau dulu anak-anak muda nekat lalu Indonesia merdeka, sekarang anak-anak muda juga harus nekat memajukan pemikiran dan ilmu pengetahuan agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya," jelas Anwar Sadad.

Sementara itu, Asisten Operasi Panglima TNI, Mayjen Muhammad Nur Rahmad S. IP., tampil sebagai narasumber ketiga. Ia menegaskan, sejumlah besar militer Indonesia kini ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di banyak negara. Di negara-negara itu mereka menjadi teladan yang baik yang menyemai nilai-nilai Pancasila ke negeri yang tengah dilanda konflik. ❑

Delegasi Forum Parlemen Muslim Internasional

Bamsoet Ajak Perjuangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Kehadiran berbagai organisasi internasional, khususnya yang didirikan dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan, mendukung tegaknya demokrasi, melindungi hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia, seperti halnya Forum Parlemen Muslim Internasional, sangat memiliki peran penting dan strategis.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Senin (28/8/2023) menerima delegasi The International Islamic Forum of Parliamentarians (Forum Parlemen Muslim Internasional). Sebuah organisasi parlemen internasional yang dilahirkan di Indonesia sekitar 16 tahun lalu, diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Mengemban visi mulia, antara lain mendorong terbangunnya tata dunia yang damai, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, serta meningkatkan profesionalitas dan kinerja pada masing-masing parlemen.

Terlebih di tengah kondisi dunia yang saat ini tidak baik-baik saja. Perang Rusia-Ukraina hingga hari ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Eskalasi ketegangan politik di berbagai belahan dunia lain, seperti di semenanjung Korea dan Laut China Selatan, juga masih bergejolak. Konflik Palestina-Israel yang sudah berusia tiga perempat abad pun masih belum terselesaikan.

"Di tengah berbagai gejolak dan dinamika global tersebut, kehadiran berbagai organisasi internasional, khususnya yang didirikan dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan, mendukung tegaknya demokrasi, melindungi

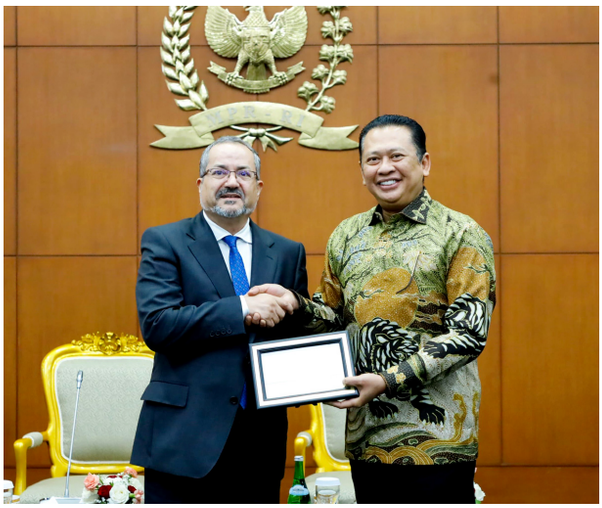

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia, seperti halnya Forum Parlemen Muslim Internasional ini, sangat memiliki peran penting dan strategis," ujar Bamsoet saat menerima Forum Parlemen Muslim Internasional, di MPR RI, tersebut.

Jajaran Forum Parlemen Muslim Internasional yang hadir, antara lain: Abul Majid Menasra (AlJazair), Ishaq Isa (Chad), Husin Alzubaidi (Iraq), Muhammet Elfikhi (Turki), Ahmet Oglu (Turki), Dr. Atho Rahman (Pakistan), Fathi Iyad (Tunisia), Menarsa Amal (Libya), Majda Alfallah (Libya), Cheikhani Beiba (Muritania), Mohd Albuzour (Yordan), Hayat Musim (Yordan), Huda Etoom (Yordan), Walid AThabathabai (Kuwait), Intasar Saad (Sudan), Ahmad Ghumaith (Aljazair), Tahri Belkheir (Aljazair), Amine Alusy (Aljazair), Ahmad Sadok (Aljazair), dan Khoiruddin Razali (Malaysia).

Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani. Serta Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa, dan Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dunia saat ini membutuhkan banyak tangan yang saling berjabatan, bahu yang saling menopang, dan komitmen kuat untuk bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan global. Tentu saja, sinergi dan kolaborasi komunitas global tersebut, harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip kesetaraan, sikap saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain.

"Di samping memajukan kerjasama global, Forum Parlemen Muslim Internasional juga memiliki peran penting dalam membangun citra Islam di kancah internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih ada pandangan dan asumsi yang keliru mengenai dunia Islam, karena masih adanya aksi kekerasan, radikalisme, terorisme, yang dilakukan oleh individu dengan mengatasnamakan Islam," terang Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain ke Jakarta, para delegasi Forum Parlemen Muslim Internasional juga baru saja selesai menyelenggarakan pertemuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Melalui pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan–putusan yang menggembirakan, khususnya bagi kemajuan organisasi Forum Parlemen Muslim Internasional ke depan.

"Saya juga mengajak para delegasi agar tidak langsung pulang ke negara mereka masing-masing. Melainkan bisa terlebih dahulu mengunjungi wilayah lain di Indonesia, seperti Bali, Yogya, maupun Solo. Sehingga bisa mengenal keragaman budaya Indonesia yang sangat majemuk, dan mengunjungi berbagai destinasi wisata yang sangat beragam," pungkas Bamsoet. ❑

Akademisi Banten Bahas Perubahan UUD

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Para akademisi dari dua perguruan tinggi negeri di Banten, mengajukan argumen mengenai sebab dan tata cara dilakukan amandemen UUD. Dalam makalahnya, mereka mengungkap bagaimana seharusnya menyikapi perjalanan konstitusi bangsa. Kegiatan tersebut terjalin antara MPR, Untirta, dan UINSMH.

BERTEMPAT di salah satu hotel di Kota Serang, Banten, 29 Agustus 2023, MPR bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UINSMH) menggelar *focus group discussion* (FGD). Tema FGD yang digelar di provinsi paling barat di Pulau Jawa itu adalah: Tata Cara Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Hadir dalam FGD itu, anggota MPR dari Fraksi PDI Prof. Dr. Hendrawan Supratikno; Ir. H. Marwan Cik Asan. MM., dari Fraksi Partai Demokrat; Drs. Supriyanto dari Fraksi Partai Gerindra; Anna Latuconsina, SH., SI.Kom., dari Kelompok DPD di MPR; dan Sri Wulan Sutomo SE dari Fraksi Nasdem.

Sedang dari kalangan akademisi hadir dalam kegiatan itu adalah Suwaib Amiruddin, Ahmad Sihabudin, dan Fatkhul Muin dari Untirta, serta Iin Ratna Sumirat dari UINSMH.

Dalam makalah, Iin Ratna mengatakan, selama 4 tahun, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut mengalir begitu saja sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut, antara lain dilatarbelakangi oleh praktik penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Suharto yang otoriter, sentralistik, dengan menggunakan UUD sebagai instrumen

untuk melanggengkan kekuasaannya.

Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis itu, menurut Iin Ratna, cukup mendukung perlunya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, gagasan untuk mengubah UUD mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Dilihat secara kuantitatif dan kualitatif perubahan yang dilakukan dalam sidang MPR sangat banyak dan mendasar, sehingga UUD aslinya tidak dikenali lagi karena secara prinsipil sudah berubah sama sekali.

"Dapat dikatakan bahwa melalui 4 kali amandemen tersebut, MPR sesungguhnya telah membentuk UUD baru dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, berdasarkan hukum, dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antarorgan negara disertai prinsip check and balances, perluasan jaminan hak asasi manusia dan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom," ujarnya.

Alumni HMI itu mengatakan, perubahan UUD bukannya tanpa masalah. Terdapat sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi UUD pasca perubahan, seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan UUD ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. "Akibatnya, setelah lebih dari 10 tahun perubahan UUD praktik penyelenggaraan negara kita masih jauh dari harapan, karena kegamangan aturan dasar dalam bernegara maupun karena budaya birokrasi kita belum banyak berubah," ungkap alumni Unisba itu.

Menurut Iin Ratna, masih diperlukan waktu dan upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Untuk itu penyemaian dan pemupukan spirit konstitusionalisme di berbagai lapisan masyarakat merupakan suatu keharusan disertai keteladanan dari para pemimpin.

Iin Ratna menyatakan, di masa yang akan datang perubahan ke-5 UUD perlu dilakukan dengan suatu *grand design* yang jelas, disertai visi yang aspiratif. Sebab, UUD suatu negara bersifat dinamis, mengikuti gerak masyarakatnya, bahkan diharapkan dapat menjadi guiding star yang memandu kehidupan masyarakatnya dalam meraih cita-cita bersama. Karena itu, pembentuk UUD dan perubahannya harus mampu menangkap semangat zaman dan sekaligus berfikir visioner. "Perubahan UUD harus dapat merevitalisasi fungsi konstitusi," paparnya.

Sementara Suwaib, dalam makalahnya

mengatakan, konstitusi mampu menjadi panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa, baik saat ini maupun mendatang. Terdapat tuntutan amandemen di awal masa reformasi yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa UUD belum cukup kuat untuk dijadikan landasan bagi kehidupan demokratis, penguatan populasi, pemberdayaan rakyat, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Suwaib, perubahan yang dilakukan atas alasan sosiologis, karena pembuatan kebijakan pemerintah yang harus melihat kondisi nyata keadaan masyarakat atau tuntutan masyarakat yang sifatnya dinamis. "Adapun dengan memerhatikan hubungan sosiolgis ini maka adanya perilaku masyarakat untuk menghormati, menerima, dan menaati hukum atau kebijakan tersebut," paparnya.

Dalam makalahnya, Suwaib memaparkan apa saja yang diubah dalam UUD 1945. Perubahan UUD telah berhasil mengubah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menjadi kekuasaan yang demokratis berdasarkan atas hukum dan desentralistis. "Penyelenggaraan negara yang berpusat pada negara (state) bergeser berbasis kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan," ungkapnya.

Menurut Iin Ratna, perubahan UUD harus diikuti pula oleh perubahan budaya masyarakat, perubahan budaya birokrasi yang kondusif untuk pelaksanaan nilai-nilai konstitusi guna menjadi bangsa yang sejahtera dan bermartabat. "Tanpa perubahan budaya tersebut jurang pemisah antara harapan dan kenyataan akan tetap lebar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Iin Ratna mengatakan, Bangsa Indonesia harus bergerak dari regulasi ke implementasi secara konsisten dengan kecerdasan menangkap peluang-peluang yang terbuka di hadapan kita. Mengubah UUD tidak mudah, tetapi yang tidak kalah sulitnya ialah membangun budaya taat berkonstitusi. Untuk itu, diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dan dilakukan secara berkelanjutan oleh segenap lapisan masyarakat dengan keteladanan dari para pemimpin.

"Spirit konstitusionalisme harus disemai dan terus dipupuk agar tumbuh subur dalam kesadaran masyarakat, terutama di kalangan para penyelenggara negara dan para pemimpin politik", ujarnya. ❑

Harapan Setelah Amandemen

Setelah lebih dari 10 tahun perubahan UUD ternyata harapan yang menyertai perubahan belum menjadi kenyataan. Apa penyebabnya? Hal demikian dibahas dalam FGD yang melibatkan anggota MPR dan akademisi dari Untirta dan UINSMH.

AHMAD Sihabudin dalam makalah mengulas tentang tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945. Disampaikan, UUD telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan terhadap UUD diatur dalam Pasal 37 UUD. Dalam sistem hukum di Indonesia, UUD berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi sekaligus norma hukum tertinggi. UUD berisi aturan yang mengikat dan menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 37 UUD secara umum membahas tentang perubahan UUD. Dalam pasal tersebut, UUD dapat diubah jika sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Usul perubahan pasal dapat disampaikan dalam sidang MPR. Setiap usulan perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan. Usulan perubahan ini wajib disertai dengan alasan. Perubahan dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang ada di UUD 1945, kecuali pasal yang mengatur tentang bentuk negara.

Fatkhul Muin mengatakan, konstitusi memang merupakan resultante politik karena ia merupakan kristalisasi daripada kehendak-kehendak politik, dan juga konstitusi dibentuk oleh lembaga politik. Di sisi lain, konstitusi merupakan produk hukum yang memiliki status sebagai hukum tertinggi. Adapun konsekuensi dari konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah konstitusi akan menjiwai setiap peraturan hukum yang lebih rendah.

Perubahan konstitusi merupakan suatu

materi yang penting dalam teori dan dasar konstitusi, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Perubahan konstitusi akan mengubah sumber hukum negara dan kaedah fundamental negara.

Fatkul Muin dalam makalah mengemukakan beberapa syarat agar sasaran yang hendak dituju dengan jalan mempersulit perubahan konstitusi (KC Wheare).

Adapun syarat tersebuat adalah:

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pertama, agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar; Pasal 37 UUD NRI 1945, diusulkan 1/3 dari Anggota MPR, diajukan secara tertulis dengan alas an. Lalu, mengubah Pasal UUD dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR dan Putusan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota seluruh anggota MPR.

Kedua, agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan; (Tim Panitia Ad Hoc yang dibentuk dan terdiri dari berbagai unsur yang ada pada Lembaga MPR Pasal 20 UU No. 17 Tahun 2014 Ttg MD3. *Ketiga*, khusus untuk negara federasi, agar kekuasaan federal dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri.

Iin Ratna mengungkap, empat kali perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan secara bertahap dalam waktu relatif singkat, selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1999 hingga 2002 berjalan begitu saja, tanpasuat *grand design* yang jelas. Pembahasan dalam sidang MPR tidak mengalami kendala berarti, meskipun perdebatan sering berjalan tajam dan alot dengan argumentasi yang mendalam.

Dia menyebut ada dua alasan mengapa pembahasan berjalan lancar, yaitu: (1). Romantisme reformasi masih hangat dalam hati partai politik, anggota MPR dan para aktivis; (2). Tercapainya kesepakatan dasar dalam Panitia Ad Hoc I MPR yang dijadikan pegangan oleh para Anggota MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD Tahun 1945 yang meliputi: (a). tidak mengubah Pembukaan UUD Tahun 1945; (b). tetap mempertahankan NKRI; (c). mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (d). penjelasan UUD 1945 ditiadakan, serta hal-hal yang normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal; Dan (e). perubahan dilakukan dengan "ad-dendum".

Dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar secara kuantitatif dan kualitatif sebetulnya wajah UUD sebelum perubahan nyaris tak dikenali lagi. Jimly Asshiddiqie (2006:61) antara lain mengemukakan, "Dari segi kuantitatif saja sudah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya UUDNRI Tahun 1945 setelah mengalami empat kali perubahan, sudah berubah sama sekali menjadi satu konstitusi baru. Hanya nama saja yang dipertahankan sebagai Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan isinya sudah berubah secara besar-besaran.

Dalam makalah, Iin Ratna bertanya, mengapa setelah lebih dari 10 tahun perubahan UUD harapan yang menyertai perubahan belum menjadi kenyataan?

Apakah karena kelemahan yang inheren dengan UUD pasca perubahan ataukah karena bangsa kita kehabisan energi sosial untuk semakin mendekatkan kenyataan dengan harapan? Dia mengutip pendapat Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD RI masa bakti 2004-2009, dalam kata sambutannya pada buku Konstitusi RI Menuju Perubahan Ke-5, antara lain mengemukakan: "Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan 4 kali ternyata masih menyisakan banyak kelemahan dan inkonsistensi, serta ketidaklengkapan sehingga membutuhkan peninjauan kembali…" (DPD RI 2009:iv).

Sementara itu Centre for Strategic and InternationalStudies CSIS) memberikan beberapa catatan terhadap perubahan UUD (DPD RI 64-66), yang intinya sebagai berikut: (1). perubahan UUD yang dilakukan oleh MPR tidak lagi dapat disebut sebagai amandemen, melainkan sudah merupakan penggantian (alternation); (2). baik ditinjau dari aspek landasan filosofis maupun ketatanegaraan, sistem politik dan pemerintahan hasil perubahan yang dilakukan oleh MPR sangat membingungkan; (3). berkaitan dengan sistem politik, khususnya pelaksanaan kedaulatan ditemui kerancuan; (4). MPR tidak tegas menetapkan sistem pemerintahan yang dianut, apakah sistem presidensial atau parlementer murni atau semu; (5). Kesimpulannya, empat kali perubahan UUD Tahun 1945 oleh MPR justru menciptakan sistem politik dan sistem ketatanegeraan Indonesia yang tidak jelas dan menghasilkan rumusan pasal-pasal yang multi interpretatif, sehingga dapat menimbulkan instabilitas hukum maupun politik. ❑

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Hadirkan Utusan Golongan MPR Untuk Mengakhiri Disharmoni Warga Bangsa

ATAS nama fakta tentang kodrat kebhinekaan warga bangsa, sistem ketatanegaraan Indonesia haruslah berkekuatan merekatkan. Eksistensi Utusan Golongan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejatinya adalah refleksi keutuhan dari semua elemen bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Kini, terbukti bahwa eliminasi Utusan Golongan dari MPR RI melalui amandemen konstitusi nyata-nyata telah memperlemah fungsi dan sistem ketatanegaraan sebagai perekat kebhinnekaan.

Sudah cukup lama sebagian warga bangsa merasakan disharmoni dalam dinamika kehidupan bersama. Pun, sudah menjadi fakta pula bahwa kecenderungan itu terjadi karena menggejalanya reduksi akan semangat merawat hakikat persatuan dan kesatuan. Ada begitu banyak contoh kasus di akar rumput yang memberi gambaran nyata tentang disharmoni itu.

Warisan leluhur tentang nilai-nilai saling peduli dan semangat gotong royong mulai terkikis. Guyub dan rukun sebagai akar budaya dan kearifan lokal yang selalu mempertemukan keragaman budaya bangsa pun sering terkoyak hanya karena beda pandangan, beda keyakinan serta beda pilihan politik. Santun dalam laku dan tutur yang menjadi ciri dan karakter warga bangsa di masa lalu pun nyaris langka.

Disharmoni terjadi karena pengingkaran terhadap Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa-bernegara. Sebagaimana diketahui, semua warisan nilai luhur yang digali dari akar budaya dan kearifan lokal semua komunitas bangsa itu telah dirumuskan dalam lima sila Pancasila. Akar budaya dan kearifan lokal semua komunitas anak bangsa sejatinya menjunjung tinggi keluhuran ajaran agama, nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan, serta prinsip kebaikan bersama yang terkandung pada semua adat istiadat.

Penghayatan terhadap nilai luhur itulah yang membentuk kepribadian dan standar moral semua komunitas anak bangsa. Itu sebabnya sejarah peradaban manusia kemudian mencatat citra masyarakat Indonesia itu sebagai komunitas bangsa yang ramah dan santun, pun kental dengan tradisi ketimuran. Lebih dari itu, akar budaya semua komunitas anak bangsa dengan kearifan lokalnya masing-masing pun dikenal bijaksana dalam berinteraksi dengan lingkungan alam sebagai rahim kehidupan.

Karena pengingkaran, warisan nilai luhur itu nyaris langka dalam dinamika hidup keseharian bersama dewasa ini. Demokrasi, kebebasan berpendapat hingga perubahan zaman bukan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk tidak lagi menerima dan mengejawantahkan nilai-nilai luhur itu. Pengingkaran dilakukan karena sejumlah kelompok masyarakat mengadopsi dan menghayati pandangan lain yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Dengan mengumandangkan pandangan lain yang diimpor itu, kelompok-kelompok itu kemudian merongrong dan mengguncang persatuan dan kesatuan warga bangsa, karena pandangan lain itu menimbulkan pro-kontra di ruang publik.

Ekses lanjutan yang tampak begitu nyata di permukaan adalah terbentuknya sekat-sekat dalam masyarakat. Disharmoni pun mengemuka karena antarsekat kelompok masyarakat itu lebih sering saling menghina, menista, mempersekusi hingga menyemburkan hoaxs.

Untuk merespons fakta disharmoni itu, berbagai

inisiatif telah diupayakan oleh negara cq pemerintah, oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan oleh para tokoh atau figur-figur yang menjadi panutan sejumlah komunitas. Semua inisiatif itu pun telah diwujudnyatakan dengan menggelar banyak forum pertemuan, dialog dan juga kerja sama program. Sayangnya, buah dari semua upaya itu hanya terwujud pada harmoni di tingkat elit.

Sebaliknya, di akar rumput, nyaris tak berdampak. Ruang publik, hingga hari-hari ini, tetap saja marak dengan persekusi antarkomunitas dan antarindividu, semburan hoaxs hingga perilaku intoleran. Bahkan, masih saja ada kelompok-kelompok yang terus memusuhi negara-bangsa sendiri dengan perilaku menolak hormat pada simbol-simbol negara. Pun, sudah ada sejumlah bukti yang menunjukan paham radikalisme telah menyusup ke tubuh birokrasi negara.

Disharmoni ini sudah berlangsung begitu lama. Mengacu pada rentang waktu usia permasalahannya, dapat dikatakan bahwa warga bangsa ibarat masih terus terperangkap pada persoalan disharmoni. Bahkan ketika zaman telah berubah —yang ditandai dengan digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan—warga bangsa belum mendapatkan rumusan yang efektif untuk menghakhiri sekat-sekat itu.

Dishamoni hendaknya tidak dibiarkan tereskalasi. Maka, diperlukan upaya dan daya tambahan. Cukup ideal adalah pendekatan dari aspek ketatanegaraan. Sebab, sejatinya, sistem ketatanegaraan haruslah memiliki kekuatan sebagai perekat kebhinnekaan warga bangsa. Dengan begitu, berkembangnya aspirasi agar negara-bangsa segera menghadirkan kembali Utusan Golongan di MPR menjadi relevan.

Agar semua terwakili, struktur Utusan Golongan di MPR hendaknya merefleksikan keutuhan semua elemen bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Negara-bangsa akan menugaskan Utusan Golongan di MPR peduli dan fokus mencari rumusan yang efektif untuk merespons disharmoni warga bangsa. Melalui perutusannya di MPR, setiap golongan dalam masyarakat mendapat ruang dan waktu menyuarakan aspirasi masing-masing. Melalui permusyawaratan perwakilan itu, ditumbuhkan semangat untuk merekatkan kembali persatuan dan kesatuan warga bangsa, setelah didahului dengan kesepakatan mengakhiri disharmoni. Dengan demikian, selain relevan, menghadirkan kembali Utusan Golongan di MPR memang ada urgensinya.

Sebagaimana diketahui, empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan. Termasuk perubahan sistem dan lembaga perwakilan politik di Parlemen, khususnya di lembaga MPR RI. Sebelum amandemen keempat, keanggotaan MPR RI terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Setelah amandemen keempat, keanggotaan MPR RI hanya terdiri dari anggota DPR RI sebagai representasi partai politik, dan anggota DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah. Sedangkan Utusan Golongan dihapuskan.

Ketika pimpinan MPR melakukan silahturahim kebangsaan dengan para tokoh dari berbagai elemen dan komunitas warga bangsa sejak tahun 2019, salah satu aspirasi yang mengemuka adalah urgensi Utusan Golongan di MPR. Para tokoh bangsa berpendapat bahwa unsur Utusan Golongan patut dipertimbangkan untuk hadir kembali dalam keanggotaan MPR RI. Aspirasi ini sudah disuarakan oleh PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Di sela-sela kegiatan masyarakat mempersiapkan perayaan memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023 lalu, segenap warga bangsa diingatkan kembali bahwa disharmoni masih menjadi persoalan yang tak boleh diabaikan. Untuk merespons persoalan ini, urgensi kehadiran Utusan Golongan di MPR praktis tak terbantahkan. Sebab, Utusan Golongan di MPR setidaknya bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu solusi merekatkan kembali persatuan dan kesatuan warga bangsa. ❑

Kunjungan DKM Penerima Bantuan Kemenag

HNW: Tempat Ibadah Harus Berkontribusi Mencerdaskan Umat

Semua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) penerima bantuan Kemenag menyampaikan bahwa dana bantuan bagi pembangunan, perawatan, serta renovasi masjid dan musholla langsung ditransfer ke rekerning atas nama DKM, tanpa potongan sepeserpun.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., biasa disapa HNW, memberi apresiasi kepada Kementerian Agama (Kemenag) yang telah memenuhi harapan masyarakat, memberi bantuan bagi pembangunan, perawatan maupun renovasi masjid dan musholla. Apalagi, bantuan tersebut disampaikan dengan mekanisme yang lebih baik dan transparan, melalui sistem Simas. Dana disalurkan langsung melalui rekerning pengurus masjid dan musholla. Tidak melalui kepanjangan tangan pihak tertentu yang berpotensi bisa terjadi pungli maupun diselewengkan.

Kalau sistem Simas bisa diterapkan secara efektif pada semua program Kemenag, menurut Hidayat, cara ini akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik serta menghilangkan potensi-potensi yang dulu selalu dikeluhkan masyarakat. Utamanya, terjadinya pemotongan atas jumlah bantuan serta penyelewengan lain oleh oknum-oknum tertentu.

"Semua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) penerima bantuan Kemenag yang menemui saya, menyampaikan bahwa dana itu langsung ditransfer ke rekerning atas nama DKM, tanpa potongan sepeserpun. Begitulah harusnya praktik yang berlaku di Kemenang. Itu sangat diapresiasi. Kementerian Agama semestinya memang mampu menjadi teladan dalam hal transparansi, dan dalam melaksanakan berbagai program dengan amanah tanpa ada masalah apapun," ujar HNW.

Penyataan itu disampaikan HNW usai bertemu sejumlah pengurus masjid dan musholla di Jakarta Pusat dan Selatan. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Jumat (25/8/2023). Perwakilan pengurus masjid yang ikut dalam pertemuan itu, antara lain DKM Masjid Baiturrahman, Masjid Annizhom, Masjid Baiturrahmah, Masjid Nurul Jannah, dan Musholla Nurul Hidayah.

Ke depan, Politisi PKS ini berharap, terdapat keadilan anggaran antara Kemenag dan Kemendikbud. Baik terkait masalah pendidikan maupun layanan keumatan. Karena yang terjadi sampai sekarang adalah masih terjadinya ketidakadilan anggaran. Kalau itu bisa dilakukan maka akan semakin banyak lagi dana yang bisa diakses oleh umat untuk kemaslahatan umat beragama dari seluruh agama yang diakui di Indonesia untuk disumbangsihkan bagi kemajuan dan harmoni kehidupan bangsa.

"Sehingga nanti bantuan rumah ibadah itu bisa diperuntukkan bagi seluruh rumah ibadah umat beragama, bukan hanya Islam. Seperti halnya, kami mendorong Biaya Operasional Tempat Ibadah (Boti) yang diberlakukan di Jakarta dan berlaku untuk semua rumah ibadah, Islam maupun non-Islam secara proporsional," ungkap HNW.

Praktik seperti itu, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, ini layak dilaksanakan di negara Pancasila yang berkeadilan sosial. Negara harus bisa memberi advokasi serta layanan bagi seluruh umat beragama secara adil. Sehingga seluruh umat begarama dan rumah beribadah bisa turut menguatkan praktik kehidupan bergama, dan menguatkan pengamalan Pancasila.

"Kalau ada agenda kenegaraan, seperti Pemilu 2024, tempat ibadah harusnya ikut menyukseskan dan menjadi bagian yang mencerdaskan umat, berorientasi kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar. Tidak menjadi anti social, tapi untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan yang lebih besar. Mengedepankan sikap kolaboratif, menjaga dan menguatkan persaudaraan sebangsa dan negara. Dengan begitu partisipasi umat akan lebih positif, dan kualitas bernegara akan menjadi lebih baik, demokratis, maju, dan berkah," pungkasnya. ❑

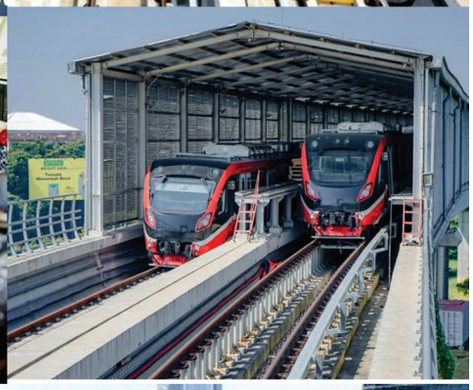

Rangkaian Panjang Membangun Kereta Layang

Rangkaian panjang pemerintah membangun LRT di Indonesia. Proses Pembangunan LRT yang lintasannya berada di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor, itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya, di samping untuk menunjukkan bangsa ini tak mau kalah dengan bangsa lainnya terkait kemodernan transportrasi kota.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KERINDUAN masyarakat Jakarta dan sekitarnya pada transportasi umum seperti di Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, dan kota-kota modern lainnya di Asia dan Eropa sangat luar biasa, sehingga saat dibuka pendaftaran ujicoba LRT (*Light Rail Transit,* ada yang menyebut *Lintas Rel Terpadu*) Jakarta – Bogor - Depok – Bekasi (Jabodebek) mereka sangat antusias.

Meski pendaftaran peserta ujicoba LRT mulai dibuka pada 10 Juli 2023, namun masyarakat sudah memelototi *handphone* atau *computer* yang ada, jauh-jauh sebelumnya, siapa tahu sudah ada *link* yang disebar. Mereka harap-harap cemas menunggu *link* pendaftaran yang hendak di-share lewat media sosial.

Begitu dibuka, *brrrr*…. Ribuan orang *klak klik* di *keyboard handphone* atau *computer* untuk mengisi syarat-syarat yang diperlukan. Enam jam kemudian pendaftaran ditutup dengan alasan kuota sudah terpenuhi. Cuitan penyesalan dan kekecewaan bagi mereka yang tak teregisistrasi pun bertebaran di media sosial. Di *money.kompas.com,* 11/7/2023, terungkap cuitan itu. Warganet mengatakan, "yakin min udh closed aja, utk ujicoba sd 15 Agustus quota sdh full .. Aneh banget". Warganet yang lain mengatakan, "baru dibuka linknya kemaren langsung udah tutup aja. Hadeh. Terbatas bgt ya? Atau membludak yg daftar? Kasian anak sy dah dijanjiin nyobain naik ini krn kebetulan stasiunnya dekat dr rumah. Nunggu buka beneran aja dah".

Di web itu diberitakan, Manager Public Relations Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan, pendaftaran ditutup lantaran sudah mencapai kuota yang ditentukan. "Iya (sudah ditutup). Kuotanya sudah terpenuhi," ujarnya saat dikonfirmasi media online itu. Ikhwal penutupan pendaftaran uji coba LRT Jabodebek telah diumumkan lewat instagram @lrt_jabodebek selang 6 jam setelah pengumuman pendaftaran dibuka.

Di akun itu tertulis terima kasih atas antusiasmenya mengikuti pendaftaran terbatas pada Uji Coba Operasional LRT Jabodebek. Sehubungan dengan kuota pendaftaran yang sudah terpenuhi maka pendaftaran dengan terpaksa kami tutup.

Antusiasnya masyarakat untuk mengikuti

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ujicoba tersebut selain ingin merasakan transportasi yang modelnya terbilang baru, juga ingin melihat pemandangan Jakarta dari ketinggian. Hadirnya kereta layang itu dirasa akan menyejajarkan Jakarta dengan kota-kota modern di Asia dan Eropa serta untuk mengatasi hal yang selama ini selalu dirasakan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yakni kemacetan, terutama di saat jam berangkat dan pulang kerja.

Adanya kemacetan yang sangat parah itulah yang membuat LRT Jabodebek dihadirkan. Hal demikian terungkap dalam *lrtjabodebek.adhi.co.id.* Dalam *sub sejarah* disebut kemacetan parah yang terjadi di Jakarta menjadi latar belakang mengapa pemerintah akhirnya ingin membangun LRT Jabodebek. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan dan mengurai kemacetan Jalan Tol Jakarta Cikampek serta Jalan Tol Jagorawi.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mengusulkan untuk membangun jalur LRT dengan trase Cibubur–Cawang, Bekasi Timur–Cawang & Cawang – Dukuh Atas. Konsep dari pemerintah sendiri dalam mewujudkan transportasi umum adalah menawarkan moda transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau sehingga

dapat memicu pengendara kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi umum. Karena kebutuhan akan LRT sangat mendesak untuk membangun prasarana LRT, pemerintah menunjuk ADHI karena dinilai paling siap dalam membangun LRT Jabodebek.

Sumber lain menyebutkan, pembangunan LRT Jabodebek melibatkan empat BUMN, yakni: PT. Adhi Karya, PT. Len Industri, PT. INKA, dan PT. Kereta Api Indonesia.

Sementara dalam *Wikipedia* disebut, usulan sistem LRT di Jakarta muncul ketika proyek pembangunan monorel Jakarta mangkrak. Mangkraknya pembangunan monorel disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak menyetujui pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Rencana depo ini ditolak agar kejadian banjir Jakarta 2013 yang disebabkan oleh jebolnya Tanggul Latuharhari tidak terulang.

Pada akhirnya, proyek monorel benar-benar dihentikan karena investornya tidak memenuhi persyaratan lanjutan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah pusat mengubah sistem monorel dengan sistem LRT karena lebih mudah terintegrasi dengan moda lainnya.

Meski wilayah yang dibangun berada di Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yakni di Bogor, Depok, dan Bekasi, namun pembangunan yang ada dilakukan oleh pemerintah pusat, buktinya peletakan batu pertama atau *groundbreaking* dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di *Wikipedia* diceritakan pada 9 September 2015, Joko Widodo melakukan *groundbreaking* di wilayah dekat rencana Stasiun TMII. Pemerintah ingin pembangunan fase I selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Harapan tersebut bisa jadi untuk membantu suksesnya pelaksanaan pesta olahraga

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

terbesar di Asia, di samping untuk menunjukkan ini lho Jakarta Indonesia. Fase I meliputi jalur Cawang–Cibubur, Cawang–Dukuh Atas, dan Cawang–Bekasi Timur. Fase ini memiliki panjang 42,1 kilometer.

Keinginan tersebut rupanya tidak tercapai karena banyak kendala, seperti belum tuntasnya masalah pembebasan lahan. Konstruksinya juga masih jauh dari harapan. Saat Asian Games berlangsung, konstruksi LRT baru mencapai 45%. Di akhir tahun, bertambah menjadi 55,9%. Dari waktu ke waktu progress pembangunan terwujud, awal tahun 2020 atau di bulan Januari, konstruksi tahap 1 LRT Jabodebek mencapai 67,3%.

Di samping pembangunan fisik, juga dikebut pemasangan sistem persinyalan. Dari perpaduan unsur tersebut maka pada Oktober 2020, armada kereta LRT Jabodebek mulai diuji coba. Dalam *Wikipedia* dikatakan, uji coba tersebut juga untuk mengecek persinyalan dan kesiapan jalur yang akan dilalui. Satu bulan kemudian, tepatnya 15 November 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau sekaligus mengikuti uji coba persinyalan LRT Jabodebek. Uji coba tersebut dilakukan pada rute Stasiun TMII–Stasiun Harjamukti.

Hingga Maret 2023 pembangunan LRT Jabodenek disebut sudah mencapai 90%. Kalau kita menyusuri Jalan Tol Jagorawi dan Cikampek terlihat Pembangunan LRT itu sangat masif dan cepat. Pembangunan sangat massif, sebab selain didukung dana yang tersedia juga adanya payung hukum yang kuat. *Wikipedia* mengulas bahwa pembangunan LRT Jabodebek dilandasi oleh Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Peraturan itu mengatur bahwa pembangunan LRT Jabodebek akan dilakukan oleh PT. Adhi Karya. Pembangunan tersebut termasuk lintasan konstruksi layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Dengan ini, PT. Adhi Karya menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan yang selanjutnya akan diberikan persetujuan oleh Menteri Perhubungan.

Perpres yang ada juga mengatur adanya komite pengawas yang akan mengawasi proyek LRT yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya. Selain itu, Perpres ini juga meminta kepala daerah terkait untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerahnya masing-masing akan adanya proyek LRT.

Lebih lanjut, dalam *Wikipedia* dikatakan, tahun 2016, PErpres di atas diubah melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Pada perubahan, PT. Adhi Karya ditugaskan untuk membangun prasarana depo, dari yang sebelumnya hanya konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Metode pembangunan menggunakan pola design and built serta menggunakan lebar sepur standar (1.435 mm).

Perpres juga mengatur, PT Kereta Api Indonesia ditunjuk sebagai operator LRT Jabodebek. Pembangunan LRT Jabodebek juga melibatkan BUMN lain, PT. Len Industri (Persero), yang menggarap sistem persinyalan dan PSD (Platform Screen Door) sebagai mekanisme pengamanan penumpang LRT Jabodebek. Len Industri secara keseluruhan berperan dalam manajemen proyek, instalasi, pengujian dan pengawasan, suport engineering, serta pengadaan material lokal.

Lebih lanjut diceritakan, PT. KAI ditugaskan sebagai penyelenggara sarana yang terdiri atas pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, penyelenggaraan sistem tiket otomatis dan menyelenggarakan pengoperasian dan perawatan prasarana.

PT. KAI juga diperbolehkan untuk bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menyelenggarakan integrasi LRT Jabodebek dengan moda lainnya.

Pada tahun 2017, Perpres tersebut diubah kembali dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017. Perubahan ini mendasarkan pada perubahan skema pendanaan LRT Jabodebek. Pendanaan proyek LRT tidak lagi menggunakan APBN. PT. KAI selaku operator LRT menjadi investor utama dan mencari pendanaan untuk LRT Jabodebek. Meskipun begitu, negara memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI dan PT Adhi Karya sebagai bantuan pendanaan (*Wikipedia*).

Kereta Produk Dalam Negeri

Suatu kebanggaan kereta atau rangkain dari LRT Jabodebek ini adalah menggunakan produk dalam negeri. Dalam *Wikipedia* disebut, LRT Jabodebek menggunakan rangkaian kereta yang diproduksi oleh PT. INKA. Kontrak pembuatan rangkaian kereta ini ditandatangani tanggal 18 Januari 2018. LRT Jabodebek memesan sejumlah 31 rangkaian dengan 6 kereta di setiap rangkaiannya, sehingga total ada 186 unit kereta.

Kereta LRT menggunakan lebar gandar 1.435 mm dengan sumber listrik disalurkan melalui rel ketiga. Setiap rangkaian dapat mengangkut hingga 740 penumpang ketika normal dan hingga 1.300–1.500 penumpang dalam kondisi padat. Seluruh rangkaian kereta memiliki warna paduan merah, hitam, dan putih.

Lebih lanjut dalam *web* itu disebut rangkaian kereta pertama tiba dikirimkan dari pabrik INKA Madiun pada tanggal 8 Oktober 2019 dan tiba di Jakarta tanggal 11 Oktober 2019. Pengiriman tersebut menggunakan jalur darat. Pada 13 Oktober 2019, proses pengangkatan rangkaian tersebut ke jalur Stasiun Harjamukti dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Pertama Tercepat di Asia Tenggara

Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki moda transportasi kereta cepat. Hadirnya kereta cepat itu buah manis dari hubungan Indonesia-Cina. Dengan teknologi generasi terbaru, kereta yang bergerak mampu kecepatan hingga 350 km/jam.

DEFINISI kereta cepat, menurut *Wikipedia,* adalah transportasi rel yang menggunakan kereta api yang jauh lebih cepat daripada kereta api tradisional, menggunakan sistem terintegrasi dari bakal pelanting khusus dan jalur khusus. Meskipun tidak ada standar tunggal yang berlaku di seluruh dunia, kereta kecepatan tinggi biasanya memiliki kecepatan di atas 250 km/jam, atau kereta biasa yang ditingkatkan dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam secara luas juga dianggap sebagai kereta kecepatan tinggi.

Diungkap dalam web itu, jalur kereta kecepatan tinggi pertama di dunia adalah Tôkaidô Shinkansen yang memulai operasinya di Jepang pada tahun 1964. Kehebatan Shinkansen diikuti oleh Prancis dan Jerman. Menyusul kemudian Spanyol, Italia, dan lainnya. Di Benua Putih itu kini memiliki jaringan kereta cepat yang luas dengan banyak koneksi internasional.

Setelah negara-negara Eropa membangun kereta cepat, selanjutnya Tiongkok pada Desember 2020 melakukan hal yang serupa. Negeri yang disebut Cina itu telah membangun rel lebih dari 37.900 kilometer (23.500 mil). Panjang rel itu disebut

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lebih dari dua pertiga dari total jaringan rel kecepatan tinggi dunia. Hal demikian menjadikan negeri Tirai Bambu itu sebagai negara dengan jaringan kereta kecepatan tinggi terbesar di dunia.

Lebih lanjut *Wikipedia* mengungkap, beberapa negara telah membangun dan mengembangkan infrastruktur kereta api berkecepatan tinggi untuk menghubungkan antar kota-kota besar, termasuk Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Maroko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Serbia , Korea Selatan, Swedia, Swiss, Taiwan, Turki, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uzbekistan.

Sebagai negara yang tak mau ketinggalan zaman dalam bidang transportasi, Indonesia juga membangun kereta cepat. Sejarah dari pembangunan kereta cepat di Indonesia bisa dilihat di *kcic.co.id*. Dalam cerita

sejarah yang ada di web itu diungkap, pada tahun 2015, PT. KCIC didirikan berdasarkan akta No. 86 tanggal 16 Oktober 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Surat Nomor AHU-2461647 AH.01.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Setahun kemudian, tepatnya 2016, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan dan menetapkan trase Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Peletakan Batu Pertama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo di Kebun Teh Mandalasari, Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Di tahun yang sama, Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC menandatangani kesepakatan (Perjanjian Konsesi) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kementerian Perhubungan menerbitkan izin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara utuh sepanjang 142,3 km.

Dalam web itu disebut KCJB akan menggunakan generasi terbaru CR400AF. Memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun pemberhentian Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Di *kcic.co.id* disebut KCJB akan menjadi kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. KCJB akan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam dan melayani rute Jakarta- Bandung dengan trase 142,3 km dengan 4 stasiun. Selain Indonesia, Laos pada akhir 2021 lalu telah meresmikan kereta api dengan kecepatan 160 km per jam. Proyek ini disebut dengan nama Proyek Kereta Api Semi Cepat Laos.

Lebih lanjut diceritakan dalam web itu, jika melihat pada standar *International Union of Railway* (UIC), kereta api dengan kecepatan 160 km per jam ini masuk dalam kategori Kereta Api Semi Cepat. Dengan kata lain, Kereta Api Laos merupakan Kereta Api Semi Cepat dan berada di kelas yang berbeda dengan KCJB.

Dilihat dari sisi teknologi, teknologi perkeretaapian hingga konstruksi yang digunakan pada proyek KCJB dan proyek Kereta Api Semi Cepat Laos sangat berbeda.

Dari sisi kereta yang digunakan, KCJB menggunakan *EMU* (Electric Multiple Unit) tipe KCIC 400 AF atau tipe CR400 AF yang merupakan tipe kereta api cepat generasi terbaru yang digunakan di Tiongkok.

Kereta Api Semi Cepat Laos menggunakan kereta CR200 J yang merupakan EMU dengan teknologi lawas. Dari sisi sarana perkeretaapian lainnya, KCJB menggunakan jalur kereta cepat khusus dengan teknologi tinggi. Jalur KCJB merupakan jalur kereta yang dibangun baru dengan konsep *double track*. Sementara jalur yang digunakan di proyek Kereta Api Semi Cepat Laos merupakan campuran untuk kereta api penumpang dan barang, dan hanya berupa single track line atau satu jalur.

Mengenai konstruksi proyek, infrastruktur KCJB dibangun tahan gempa hingga kekuatan 8 magnitude dan memiliki umur teknis hingga 100 tahun. "Hal ini menunjukkan jika teknologi yang digunakan KCJB lebih terkini dan paling mutakhir. Dengan kecepatan 350 km per jam, Indonesia kini menjadi pionir kereta api cepat di Asia Tenggara," ujar Rahadian Ratry, Corporare Secretary PT KCIC (kcic.co.id).

Apa kelebihan naik KCJB? Disebut dalam web di atas kelebihan naik KCJB adalah, dengan headway 20 - 30 menit, Kereta Cepat akan hadir dengan banyak pilihan waktu perjalanan sehingga jarak Jakarta-Bandung akan ditempuh hanya dalam waktu 36 hingga 44 menit. Perjalanan lebih singkat dan fleksibel untuk aktivitas yang lebih maksimal.

Selain cepat, dikatakan dipadukan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), Stasiun Kereta Cepat memastikan sistem integrasi dengan berbagai pilihan moda transportasi terintegrasi, beragam kuliner, fasilitas dan keistimewaan lainnya untuk memastikan kebutuhan anda terpenuhi.

Dengan naik KCJB, di halaman utama *kcic.co.id* disebut akan membuat Perjalanan Lebih Bernilai, sebab KCJB hadir dengan tipe terbaru, CR400AF, yang dilengkapi teknologi modern dan handal serta pramugari yang senantiasa siap melayani selama perjalanan Anda. Fitur *Cabin Noise* yang lebih rendah akan meredam getaran dengan lebih optimal. Perjalanan berkualitas untuk pengalaman lebih bernilai. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Para Artis Pun Menjajal LRT

Pembangunan LRT bagi Presiden Joko Widodo merupakan hal yang penting dan strategis. Dirinya berkali-kali mengecek langsung kesiapan dan progress pembangunan yang dilakukan. Berharap pengguna kendaraan pribadi bermigrasi ke transportasi umum. Para artis diundang untuk melakukan uji coba naik kereta layang itu. Mereka senang dan mengatakan aman dan nyaman.

HARI Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, merupakan hari yang membahagiakan bagi Nirina Zubir, Reisa Broto Asmoro, Cak Lontong, Chelsea Islan, Ayu Dewi, Widi AB3, Lukman Sardi, Desta, dan Candil. Para artis tersebut berbahagia karena pada hari itu diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk bersama mencoba LRT Jabodebek. Bagi para artis, menjajal naik kereta layang saja sudah senang apalagi diundang oleh orang nomer satu di Indonesia.

Ujicoba yang menempuh jarak dari Stasiun Jati Mulya, Bekasi, Jawa Barat; menuju ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta; itu Joko Widodo tidak hanya didampingi para artis, namun juga ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pastinya dalam perjalanan uji coba LRT, Joko Widodo bercengkerama dengan para artis sambil berkali-kali berfoto ria. Bagi Joko Widodo, naik LRT dalam rangka uji coba telah dilakukan sebanyak tiga kali. Apa yang dilakukan pastinya untuk mengecek sejauh mana kesiapan dan kelayakan program strategis nasional itu kemajuannya.

Mantan Gubernur Jakarta itu berharap, pengoperasian LRT dapat membuat masyarakat berpindah moda angkutan dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Ini penting dilakukan agar mengurangi kemacetan utamanya di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Hal demikian teruangkap dalam rilis yang ada di *setneg.go,id,* 10 Agustus 2023.

Dikatakan oleh Joko Widodo, perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun hampir Rp 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp 100 triliun dan ini memang harus diatasi, karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Lebih lanjut diberitakan dalam web itu, untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi massal, pemerintah harus menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. Upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan kewajiban pelayanan publik atau *public service obligation* (PSO) dari pemerintah. Apa yang diberikan tersebut sebagai cara untuk menarik orang dari mobil pribadi masuk ke

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

moda transportasi massal.

Saat melakukan ujicoba LRT pada tanggal 3 Agustus 2023, Joko Widodo mengatakan, keamanan dan keselamatan menjadi faktor yang harus diutamakan dalam pengoperasian moda LRT Jabodebek. Dalam *setneg.go.id*, 3 Agustus 2023, tertulis Joko Widodo menuturkan, memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan, harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan.

Ditambahkan, pembangunan moda transportasi LRT ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Oleh karena itu, Joko Widodo menilai wajar jika masih ada kekurangan dalam proses pengerjaan maupun pengoperasiannya. “Kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi semuanya sempurna. Enggak, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis untuk yang lain-lainnya”, ujarnya seperti tertulis dalam web itu.

Mantan Walikota Solo itu menjelaskan, Kereta LRT adalah produksi INKA, konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang ya harus kita maklumi tetapi kita perbaiki.

Dirinya berharap, LRT bisa dibangun terus hingga menjangkau ke kota-kota penyangga Jakarta, seperti Bogor, Bekasi, Depok, hingga Tangerang. “Kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta,” ujarnya.

Lalu bagaimana kesan para artis setelah merasakan naik LRT. Ayu Dewi dalam akun media sosialnya mengatakan, “Seneeng bingit bisa naik LRT bareng Bapak @jokowi Pak @erickthohir & Pak @budikaryas . Jadi bisa ngerasain cepet & smooth jalan keretanya”.

Lebih lanjut tentang kisahnya naik LRT yang dikupas di *hypeabis.id*, 10 Agustus 2023, Ayu Dewi menuturkan, LRT menjadi transportasi yang bukan hanya cepat namun bisa menghemat pengeluaran. “Bantu bumi ngurangin polusi karena jadi pake public transportation, jadi enggak semua pake kendaraan pribadi.

Di laman yang sama, Nirina Zubir mengatakan, dia bisa merasakan manfaat menggunakan LRT. Diungkapkan, waktu di Cawang, dirinya dan teman-teman melihat banget betapa macetnya jalan rayanya. Sementara kami bersama Erick Thohir yang berada di dalam LRT tidak merasakan adanya hambatan alias lancar-lancar saja.

Lebih lanjut dirinya berharap agar LRT bisa bisa membantu mengurai kemacetan dan membantu warga supaya mengirit pengeluaran. Satu lagi yang terpenting menurutnya, bisa mengurangi polusi yang cukup memprihatinkan di wilayah Jabodebek.

Senada dengan Ayu Dewi dan Nirina Zubir juga disampaikan oleh Lukman Sardi. Menurutnya, naik LRT rasanya nyaman dan aman. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Arsjad Rasjid

Ketua Kadin Indonesia

Implementasi Empat Pilar MPR di Dunia Usaha

EMPAT Pilar MPR, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika pasti sudah dikenal sejak kita semua duduk di bangku sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama (SMP). Dan, pasti sudah banyak yang hafal.

Namun, pertanyaannya adalah bagaimana sih implementasi dari nilai-nilai yang sudah kita pelajari itu. Jangan hanya menerapkan nilai-nilai tersebut sebagai warga negara, tapi sebagai apapun profesi yang kita jalani, termasuk pengusaha.

Di antaranya, menginternalisasikan Pancasila dan setiap kebijakan, aturan serta budaya perusahaan. Misalnya, di sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, sebagai pengusaha kita menghormati hak-hak karyawan dalam beribadah dan menyediakan fasilitas ibadah.

Lalu ada sila kelima, maka di terapkan dengan memberikan hak-hak karyawan secara adil, seperti upah, tunjangan, istirahat dan lainnya. Jika semua pengusaha melakukan itu maka akan terjalin sinergi yang baik antara dua pihak, yakni pengusaha dan karyawan, sehingga akan berdampak baik buat semua. ❑

DER

H. Ilmi

Ketua Kelompok Tani Terpadu Kutai Kartanegara, Kaltim

Petani Butuh Dukungan Modal dan Pasar

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBENARNYA kualitas para petani Indonesia sangat baik dan mampu menghasilkan berbagai produk unggulan pertanian. Seperti kelompok tani kami mampu mengolah dan memproduksi buah papaya unggulan, pepaya California, serta bermacam komoditas pertanian, dan juga peternakan lainnya dengan lahan yang lumayan tandus.

Selain itu, banyak elemen masyarakat yang peduli dengan petani seperti memberikan lahan dalam bentuk kerjasama atau guna pakai. Namun, memang yang dibutuhkan petani saat ini adalah dukungan modal, penyuluhan, pelatihan, dan juga dukungan pasar.

Kami berharap, pemerintah mengakomodir kebutuhan petani di seluruh Indonesia ini. Kami sangat apresiasi ada pejabat pusat yang mau menyambangi kami untuk melihat-lihat apa yang kami kerjakan di sini. Seperti kunjungan Bapak Pimpinan MPR, Ahmad Muzani, dan beberapa anggotra DPR pusat dan daerah.

Kunjungan mereka tentu mudah-mudahan akan mebawa keberuntungan buat kami, segala permasalahan para petani akan tersampaikan langsung, sehingga di harapkan solusi yang terbaik untuk kami akan segera ada. ❑

DER

Misman

Sang Penyelamat Sungai Karang Mumus

KATA orang bijak, penyesalan itu selalu datang terlambat. Karena itu, berhati-hati dan berbuat baiklah agar kamu tidak menyesal di kemudian. Namun, nasihat itu kerap terlupakan. Misalnya, saja, manusia sering meminta lebih dari alam sehingga hutan digunduli untuk mengambil kayunya. Ketika banjir, longsor, dan kekeringan menghantui, manusia baru tersadar akan kesalahan yang sudah dilakukan.

Beruntung, masih ada orang-orang yang tidak mau hanya menunggu hingga bencana seperti itu datang. Orang itu, salah satunya adalah Misman (64), aktivis lingkungan, pendiri Sekolah Sungai dan Gerakan Memungut Sehelai Sampah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Misman adalah peraih penghargaan Kalpataru tahu 2023, kategori Perintis Lingkungan.

Entah dari mana asalnya, yang pasti sejak tahun 2005, Misman seorang diri terjun untuk merawat Karang Mumus, sungai yang membelah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat itu, keberadaan Karang Mumus sendiri seolah tak mendapat perhatian. Fungsinya sebagai penyedia sumber air baku terlupakan.

Sebagai ganti, Karang Mumus malah menjadi tempat pembuangan berbagai macam sampah. Praktis sungai dengan lebar 20-30 m dan Panjang 34,7 Km, sepanjang 18 Km di antaranya membelah Samarinda dipenuhi berbagai macam sampah. Ibarat mal, Karang Mumus menjadi tempat penimbunan berbagai macam barang. Mulai dari kasur hingga popok bayi. Segala maca, bekas kemasan makanan, minuman sampai pembungkus permen menumpuk di sana.

"Sungai adalah sumber utama penyedia air baku di Samarinda. Jadi, sudah seharusnya sungai itu dirawat, bukan malah menjadi tempat pembuangan sampah. Nyatanya, sungai di kita seperti mal, segala macam produk ada di situ. Mau tempat tidur, spring bed, ban sepeda motor, popok bayi, BH semua ada di situ," ungkap Misman.

Melihat pemandangan tersebut, Misman pun tergerak. Setiap hari, ia menyusuri sungai, memunguti sampah yang mulai menumpuk di berbagai sisi kali. Pekerjaan tersebut diniatkan untuk memperbaiki kualitas sungai Karang Mumus. Agar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air,

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk Tuhan lainnya, bisa tetap terjaga dengan baik. Maklum karena sebagian sisi sungai merupakan sumber mata air.

Bukannya dapat bantuan maupun apresiasi, kerja sosial yang Misman lakukan malah mendapat cemooh, bahkan fitnah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada yang menyebut Misman tak waras hingga gila. Ada yang menganggap Ia menggarami air laut, lantaran mengajari para pejabat dan pengamat. Bahkan, ada pula yang curiga, karena dengan kegiatannya itu ia dianggap tengah mencari proyek.

Tetapi, semua tuduhan itu ditepis Misman dengan tetap menjalankan pekerjaan non-profit itu seorang diri. Tak hanya bersih-bersih sungai, Misman juga mendirikan Sekolah Sungai dan Gerakan Memungut Sehelai Sampah (GMSS). Misman juga menanam berbagai tanaman di sepanjang sungai, yang hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai 22.000 pohon.

Sehelai Sampah

Berbekal ketekunannya menjaga kebersihan, beberapa teman, kenalan, hingga pejabat serta para ahli lingkungan mulai memerhatikan dan memberikan bantuan. Apalagi mereka juga tersadar, perjuangan Misman bukan untuk kepentingannya sendiri. Ia memunguti sampah dari Kali Karang Mumus karena memiliki tujuan mulia. Mempertahankan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air sungai agar sehat dan layak konsumsi bagi semua mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah lebih dari sepuluh tahun membersihkan Karang Mumus seorang diri, pada 2016 satu-persatu teman serta koleganya mulai turun tangan membantu. Dan, sejak itu, jumlah masyarakat yang bersimpati juga terus bertambah. Memang jumlahnya tidak banyak, tetapi keberadaan masyarakat yang mengulurkan tangan cukup membantunya.

"Mereka yang berpartisipasi dalam GMSS kebanyakan tidak tetap. Kebanyakan bergantian sesuai proyek atau kegiatan yang mereka lakukan, tetapi itupun sudah sangat membantu. Saya sadar tidak mungkin mengangkat seluruh sampah dari sungai, tapi saya berharap bisa menghentikan perilaku buruk yang sudah membudaya. Yaitu, membuang sampah ke sungai," kata Misman lagi.

Misman yang memiliki darah Kediri dari ibunya dan Madiun dari bapaknya, meniatkan aksi sosial menjaga Sungai Karang Mumus sebagai ibadah. Karena itu, ia tidak menuntut apapun kecuali pahala dan ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Termasuk ketika harus menjalani pola hidup bersahaja, mantan reporter Teve local itu tidak pernah menyesali jalan hidup yang dipilihnya.

"Ada saja yang saya dapat, apalagi sejak sering diundang pihak-pihak tertentu untuk bertukar pikir seputar kegiatan saya ini. Tetapi, semua itu bukan yang saya harapkan, karena saya lebih senang jika pekerjaan sosial ini bisa membantu orang banyak dan diterima sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa."

Kini, setelah 19 tahun mengabdi untuk Karang Mumus, Misman mulai menuai hasilnya. Bukan hanya materi, tetapi juga pengakuan dari pihak-pihak terkait, tak terkecuali Kementerian Lingkungan Hidup. Ibarat pepatah siapa menanam dia akan memanen. Pada tahun ini, Misman dianugerahi penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkunga.

"Sayangnya, saat penyerahan penghargaan itu saya tidak bisa hadir. Saya habis operasi pengangkatan empedu dan pengobatan akibat luka akut pada lambung. Saya mohon doa restunya, agar segera membaik dan bisa beraktivitas normal seperti sediakala," pungkasnya. ❑

MBO

Berapa Usia Ideal Capres-Cawapres?

Sejumlah partai politik dan kepala daerah mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Gugatan ini mengundang banyak perhatian dari kalangan partai politik dan masyarakat, sebab dampak yang ditimbulkan bukan karena penting hadirnya generasi muda, akan tetapi dinilai kental aroma politis sesaat. Bila gugatan ini diterima akan terjadi perubahan besar di dalam koalisi partai politik. Berikut pendapat para politisi di Senayan.

Habiburokhman, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Banyak Negara Atur Batas Minimal Pencapresan 35 Tahun

PERSYARATAN usia untuk jabatan dalam lembaga negara telah lazim diatur dalam undang-undang sebagai bentuk tertib administratif. Syarat usia juga bisa dianggap bahwa calon tersebut telah memiliki kapasitas. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter menentukan seseorang pada batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan prilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman saat sidang uji materi UU No. VII Tahun 2017 Tentang Pemilu di MK, 1 Agustus 2023.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MK dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan bahwa batas usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka adalah *open legal policy* sehingga hal itu merupakan sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada sehingga apapun pilihannya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Meski demikian MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *open legal policy* bisa dikesampingkan jika melanggar nilai-nilai moralitas hingga bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Karena: (1). jelas-jelas melanggar nilai moralitas; (2). rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerir; (3). bertentangan dengan hak politik; (4). kedaulatan rakyat; (5). melampaui kebijakan pembentuk undang-undang; (6). merupakan penyalahgunaan wewenang; Serta, (7). nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi satu hal penting untuk calon presiden dan wakil presiden, sebab banyak tantangan yang akan dihadapi. Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang demikian besar, tentunya tidak dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman buruk sebagai penyelenggara negara.

Data BPS menyebutkan penduduk usia produktif dapat berperan dalam pembangunan nasional. Bahwa berdasarkan data BPS diperkirakan masuk masa bonus demografi,

dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai 2030, hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2 kali lipat jumlah usia penduduk anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan Pembangunan.

Oleh sebab itu, penduduk usia produktif, khususnya generasi yang lebih muda, dapat berperan serta dalam mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional, di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.

Sebanyak 45 negara di dunia menetapkan, batas minimal pencapresan adalah 35 tahun. Jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 negara yang memberikan syarat minimal berusia 35 tahun. Di antaranya Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India dan Portugal. ❑

AWG

Jazilul Fawaid, Anggota MPR Fraksi PKB

Wewenang Ada Di DPR

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah syarat batas usia capres-cawapres yang saat ini dalam proses gugatan. Syarat batas usia capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang. Pandangan kami soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK. Masalah itu merupakan wilayahnya DPR untuk memutuskan berdasarkan undang-undang soal usia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hak warga negara Indonesia untuk mengajukan gugatan ke MK, termasuk hak menggugat batas usia minimum capres dan cawapres, diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meski kami berpandangan demikian, tapi tetap menghormati MK yang menguji proses gugatan aturan. Tak bisa kami mengintervensi kewenangan MK. Kami tidak bisa memengaruhi putusan MK.

Dirinya mengandaikan bila MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres, konstelasi politik di Pilpres 2024 akan berubah. Akan ada perubahan peta koalisi, termasuk bursa capres dan cawapres, bila MK mengabulkan gugatan batas usia cawapres menjadi minimal 35 tahun.

Tak hanya itu, di tingkat kandidat juga akan ada perubahan. Memungkinkan siapapun yang usianya 35 itu bisa mencalonkan atan dicalonkan. Meski demikian, sambil menunggu keputusan MK, dinamika politik masih cair. Keputusan MK pastinya akan ditunggu-tunggu karena di sana akan menentukan dinamika ke depannya seperti apa. ❑

AWG

Deklarasi Bhinneka Tionghoa Nasionalis

Bamsoet: Agar Seluruh Elemen Bangsa Junjung Sikap Nasionalisme

Mengelola kebhinnekaan dan kemajemukan dalam sebuah negara bangsa yang begitu kaya akan keberagaman semakin membutuhkan komitmen kolektif yang kuat dari setiap elemen bangsa.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, soliditas kebangsaan tidaklah dibentuk oleh kesamaan ciri fisik dan berbagai atribut yang menyertainya dan hanya nampak pada permukaan. Nasionalisme adalah paradigma yang mampu menembus dan menafikan sekat-sekat primordialisme sempit. Nasionalisme dibangun oleh semangat kebersamaan, dirajut oleh perasaan senasib sepenanggungan dan dibentuk oleh kesatuan visi dan cita-cita bersama.

"Menakar ulang kadar nasionalisme adalah manifestasi dari proses pembelajaran untuk mawas diri dan kontemplasi. Setelah 78 tahun ikrar kemerdekaan dan janji-janji kebangsaan dikumandangkan masihkah nasionalisme itu menjadi semangat kolektif dan jiwa bangsa sebagaimana pada awal kelahiran republik ini? Ataukah nasionalisme itu sudah tergerus dan terdistorsi oleh dinamika zaman yang serba pragmatis dan cenderung abai terhadap nilai-nilai kebangsaan?," ujar Bamsoet dalam acara Deklarasi Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia, di Jakarta, Ahad (17/8/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berbagai pertanyaan yang mengemuka tentang nasionalisme tersebut semakin menemukan kontekstualitasnya di tengah semakin kompleksnya tantangan kebangsaan yang dihadapi sebagai negara multi-etnis, multi-kultur, dan multi agama. Mengelola kebhinnekaan dan kemajemukan dalam sebuah negara bangsa yang begitu kaya akan keberagaman, semakin membutuhkan komitmen kolektif yang kuat dari setiap elemen bangsa.

"Kegagalan dalam mengelola kemajemukan dengan baik dan benar, hanya akan menempatkan kita kembali pada masa pra kemerdekaan, di mana semangat persatuan dan kesatuan belum menjadi kesadaran kolektif. Akibatnya, dengan mudahnya kita tercerai-berai dan menjadi bangsa yang terjajah. Ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kebhinnekaan dan kemajemukan sebagai sebuah keniscayaan adalah sebuah langkah mundur dalam lini masa peradaban," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, konsepsi 'negara bangsa' (nation state) menggariskan bahwa setiap elemen bangsa memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama besarnya untuk membangun dan memajukan negara. Sejarah pun mencatat bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan, setiap elemen bangsa memiliki

andil dan kontribusi masing-masing, tidak terkecuali etnis Tionghoa.

Sejarah pun mencatat nama-nama tokoh Tionghoa yang berjasa pada bangsa dan negara Indonesia. Antara lain Lie Eng Hok yang memelopori gerakan pemberontakan di Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kemudian John Lie atau Daniel Dharma, perwira Angkatan Laut pada masa penjajahan Jepang, yang dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2009.

Selanjutnya Sho Bun Seng, pegiat seni yang bergabung dengan gerilyawan perang di Sumatera Barat. Dan, masih ada beberapa lagi tokoh Tionghoa yang mungkin saja namanya tidak banyak kita kenal, namun menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Catatan sejarah tersebut mengisyaratkan bahwa sejatinya semangat kebersamaan telah diteladankan oleh para pendahulu kita, dan telah menjadi legasi kesejarahan. Kedua, bahwa setiap elemen bangsa mempunyai andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali etnis Tionghoa," pungkas Bamsoet. ❑

Delegasi Aliansi Aksi Buruh Jakarta

HNW: Buruh Adalah Rakyat Yang Memiliki Kedaulatan

Jadikan ajang kontestasi Pemilu 2024 sebagai lahan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai hasil dari pemilu nanti malah membuat pilu.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DELEGASI Pimpinan Aksi Buruh Jakarta (AABJ) yang dipimpin oleh Koordinator AAJB, Suji Kartono, Selasa (22/8/2023), melakukan kunjungan ke MPR RI di Kompleks Sanayan, Jakarta. Delegasi diterima oleh Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kepada HNW, Koordinator AABJ Suji Kartono menjelaskan bahwa tujuan kunjungan delegasi menemui HNW selain untuk bersilaturahim juga meminta pandangan tentang sikap para buruh, terutama di Jakarta, terhadap Tahun Politik 2024 yang kian dekat.

"Dari perbincangan dengan para elemen buruh yang menaungi buruh di Jakarta, kami menentukan sikap positif untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti. Maka, untuk lebih menguatkan lagi sikap kami itu, terbentuklah AABJ ini untuk berkontribusi melakukan koreksi masalah dan hadirkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, lebih maju dan makmur," ujarnya.

Merespon hal tersebut, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan apresiasi atas sikap konstruktif Aliansi Aksi Buruh Jakarta, dan menegaskan bahwa Pemilu 2024 adalah representasi dan implementasi kedaulatan rakyat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Partisipasi rakyat termasuk buruh, dalam ajang pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu akan menentukan masa depan bangsa. Jadi, apapun pilihan rakyat, termasuk para buruh di Jakarta ini, adalah hak mereka yang harus dihormati dan diselamatkan," tambahnya.

Yang terpenting, lanjut HNW, harus diperhatikan oleh rakyat termasuk kaum buruh, juga para capres, cawapres, partai politik dan calon anggota DPR, DPD maupun Kepala Daerah yang akan maju dalam ajang kontestasi politik nanti harus menghindarkan diri dari saling fitnah, menyebar hoaks untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak ksatria.

Kaum buruh bisa mengingatkan hal itu, agar para pihak mestinya lebih mengedepankan kontestasi kinerja, gagasan dan solusi atasi berbagai masalah, serta kepedulian akan masa depan bangsa dan negara.

"Juga jadikan ajang kontestasi Pemilu 2024 sebagai lahan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai hasil dari pemilu nanti malah membuat pilu. Satu lagi saya ingatkan, jangan sepelekan satu atau dua suara rakyat sebab sangat menentukan," kata Wakil Majelis Syura PKS ini seraya menceritakan, pengalamannya mengikuti pemilihan Pimpinan MPR RI di periode 2004-2009.

Waktu itu, cerita HNW, pemilihan Pimpinan MPR yang digelar dalam Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2004. Saat itu calon pimpinan MPR RI terdiri dari dua paket, yaitu: Paket A terdiri dari Sutjipto (Fraksi PDI Perjuangan) sebagai Ketua MPR dan calon Wakil Ketua MPR terdiri dari Theo L Sambuaga (Fraksi PG), Sarwono Kusumaatmadja (DPD), dan Aida Ismeth (DPD).

Sedangkan Paket B terdiri dari Hidayat Nurwahid (FPKS) sebagai ketua MPR dengan AM. Fatwa (Fraksi PAN), Aksa Mahmud (DPD), dan Mooryati Soedibyo (DPD) sebagai Wakil Ketua MPR. Berdasarkan hasil penghitungan suara, paket A memperoleh 324 suara dan paket B mendapat suara 326. Jadi, Paket B keluar sebagai pemenang dengan selisih suara sangat tipis, hanya dua suara saja.

"Dari pengalaman itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa satu suara rakyat saja sangatlah berharga dan bisa sangat menentukan. Apalagi suara kaum buruh yang jutaan itu. Jadi, janganlah salah pilih, jangan golput apalagi memilih karena uang. Sebab, suara rakyat, termasuk buruh, akan sangat menentukan arah bangsa ini ke depan apakah menjadi lebih baik atau malah semakin terpuruk, hal yang harus kita hindari," pungkasnya. ❑

Media Gathering dan Kampanye #SaveIbuku

Lestari: Deteksi Dini Kanker Payudara Harus Menjadi Gerakan

Deteksi dini harus menjadi gerakan yang masif dalam upaya menyelamatkan para ibu di Indonesia dari ancaman kanker payudara.

SAYA mendorong agar deteksi dini kanker payudara menjadi prioritas untuk direalisasikan. Karena perempuan dan ibu adalah tiang negara, deteksi dini kanker payudara yang masif berarti bagian dari upaya menyelamatkan negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberikan sambutan pada Media Gathering dan Peluncuran Kerja Sama Kampanye#SaveIbuku bersama Selangkah di Siloam Hospital, Jl. TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (29/8).

Reria, sapaan Lestari Moerdijat, yang juga penyintas kanker payudara, menjelaskan bahwa dalam kerja sama itu melibatkan Yayasan Muda Giat Peduli, Dompet Aman, Siloam Hospital Group, Sahabat Lestari, Wahid Foundation, dan Srikandi yang ikut serta mengampanyekan pencegahan kanker payudara di komunitas dan sekolah-sekolah.

Kerja sama tersebut juga bertujuan untuk mengajak anak-anak muda ikut peduli

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terhadap berbagai upaya pencegahan kanker payudara di tanah air.

Lestari mengapresiasi upaya kerja sama yang dilakukan Dompet Aman dan Siloam Hospital Group yang mengambil langkah nyata mempermudah akses deteksi dini untuk menyelamatkan para ibu, yang merupakan tiang negara, dari ancaman kanker payudara.

Karena, ujar Rerie, bila indikasi kanker sudah terdeteksi sejak dini peluang untuk sembuh atau terhindar dari kanker payudara lebih besar.

Data Globocan tahun 2020 di situs resmi Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, jumlah kasus kanker payudara pada 2020 mencapai 68.858 atau 16,6% dari total 396.914 kasus kanker di Indonesia. Yang memprihatinkan, jumlah kasus kematiannya mencapai lebih dari 22 ribu jiwa.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, deteksi dini kanker payudara harus menjadi sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat, para perempuan, generasi muda dan para ibu untuk melakukan deteksi dini.

Setiap pemangku kepentingan, tegas Rerie, harus mengambil peran dalam mengedepankan deteksi dini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengobatan kanker payudara di tanah air.

Sehingga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, akses untuk mendapatkan deteksi dini dan pengobatan kanker bagi masyarakat menjadi lebih mudah.

Selain itu, Rerie juga mendorong kemudahan sejumlah upaya untuk mengatasi berbagai aspek sosial yang biasanya muncul pasca pengobatan kanker.

Sebagai penyintas kanker payudara, di akhir sambutannya, Rerie memberi pesan kepada para penderita kanker agar berdamai dengan kematian dan merayakan kehidupan selagi masih diberi kesempatan. ❑

Penanggulangan Pencemaran Udara

Lestari Moerdijat: Butuhkan Kolaborasi Seluruh Pihak

Masalah pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak luas.

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyatakan, masalah pencemaran udara bukan tugas pemerintah saja, tapi menjadi tugas kita semua. Dalam hal ini, tegasnya, bagaimana pelibatan publik, masyarakat untuk bisa secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang ada.

Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie menyampaikan hal itu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-158, dengan tema Perbaikan Kualitas Udara di Kota-Kota Besar Indonesia, Rabu (22/8). Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Erni Pelita Fitratunnisa (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta), Cucu Mulyana (Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI), Made Yusadana (Vice President Lingkungan PLN), dan Sigit Reliantoro (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI).

Selain itu, hadir pula Nova Harivan Paloh (Anggota DPRD DKI Jakarta) dan Zenzi Suhadi (Direktur Eskekutif Nasional WALHI) sebagai penanggap. Diskusi ditutup wartawan senior Saur Hutabarat.

Menurut Rerie, masalah polusi udara merupakan masalah klasik yang terus dihadapi kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Berdasarkan catatan Air Quality Index (AQI), Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia pada angka 156, pada Kamis (10/8/2023). "Situs pemantau beberapa minggu juga menunjukkan kualitas udara makin bertambah buruk. Akibatnya, gangguan kesehatan sudah mulai terjadi," imbuh Rerie.

Alih-alih menemukan solusi, lanjut Rerie, kita malah terbiasa memaklumi karena ragam alasan, yakni memasuki musim kemarau, terbatasnya ruang hijau, perkembangan industri, dan pembangunan infrastruktur yang kerap meniadakan pertimbangan akan pentingnya reboisasi.

Tanpa sadar, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kita berhadapan dengan masalah yang selalu sama, tanpa solusi pasti. Ia pun mempertanyakan bagaimana monitoring, evaluasi, dan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir terjadi tiap tahun ini.

Menurut Legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak) itu, diperlukan sinergi yang kuat antarlembaga, organisasi, dan masyarakat terkait dalam mewujudkan kualitas udara yang baik.

"Marilah kita mengedepankan kehidupan publik dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Kita berharap, sinergi antara lembaga dan organisasi terkait, termasuk masyarakat, dapat terwujud menuju Indonesia sehat. Marilah kita mulai dari Jakarta," tukas Rerie.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa, mengatakan Pemprov DKI Jakarta kini mempunyai lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), baik fix station dan mobile station. Masyarakat dapat melihat pantauan kualitas udara di Jakarta melalui aplikasi JAKI.

Erni menjelaskan, memburuknya kualitas udara di Jakarta disebabkan banyak faktor, seperti kondisi cuaca, arah angin, hingga suhu. "Memasuki Mei hingga Agustus kualitas udara memburuk di mana konsentrasi polutan udara meningkat. Kondisi akan membaik saat musin hujan pada September hingga Desember," ujarnya.

Berdasarkan analisa Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi DKI Jakarta, lanjut Erni, penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta dipengaruhi sektor transportasi sebesar 44 %, industri energi 31%, perumahan 14%, manufaktur 10%, dan komersial 1%.

Erni menegaskan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pencemaran udara. Di antaranya mengeluarkan berbagai peraturan pengendalian kualitas udara, uji emisi, hingga pedoman angkutan berbasis listrik. Yang terbaru, Pemprov DKI tengah menggodok grand desain pengendalian pencemaran udara berbentuk pergub.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan RI, Cucu Mulyana, mengatakan, tingginya angka kemacetan di DKI Jakarta berkorelasi dengan tingginya pencemaran udara. Berdasarkan study World Bank tahun 2019, Jakarta menempati posisi ke 10 sebagai kota termacet di dunia. Selain menyebabkan kerugian Rp 65 triliun per tahun akibat kemacetan Jakarta, masyarakat juga dirugikan dengan pencemaran udara.

Menurut Cucu, masih tingginya angka kemacetan di Jakarta disebabkan oleh masih enggannya masyarakat menggunakan transportasi umum dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Berdasarkan data Kemenhub, pengguna transportasi umum di Indonesia masih di angka di bawah 20%. Di sisi lain pertumbuhan kendaraan pribadi naik 8% per tahun.

Cucu menguraikan, beberapa solusi jangka pendek mengatasi kemacetan yang berdampak pada pencemaran udara. Di antaranya memberlakukan kebijakan WFH/ WFO, perluasan area dan jam Ganjil-Genap, penerapan Electronic Road Pricing, penaikan tarif parkir, hingga pemasifan penggunaan kendaraan berbasis listrik termasuk bagi ASN.

Sementara solusi jangka panjang dari Kemenhub, lanjut Cucu, adalah pengetatan pengujian emisi gas buang, percepatan penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai, hingga pembangunan dan pengembangan transportasi massal yang moderen di kawasan perkotaan.

Sementara itu, Vice President Lingkungan PLN, Made Yusadana, mengatakan, PLN terus berupaya mengurangi emisi yang dikeluarkan pembangkit listrik miliknya sebagai upaya menanggulangi polusi udara. Seperti penerapan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP), yang dapat menyaring debu sampai ukuran sangat kecil, sudah digunakan di seluruh PLTU milik PLN..

Made menegaskan, PLN juga berkomitmen dalam mencapai net zero emission di tahun 2060. Di mana pada tahun itu mayoritas penggunaan energi berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

Selain itu, lanjut Made, PLN juga mendukung terciptanya ekositem kendaraan listrik sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran udara. PLN telah membangun 54 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan menggenjot program konversi kendaraan bermotor konvensional ke listrik.

Dirjen PPKL KLHK RI, Sigit Reliantoro, mengatakan, masalah pencemaran udara merupakan wicked problem yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral. untuk itu, KLHK terus berkolaborasi dengan seluruh stake-holder mengupayakan aksi agar kualitas udara membaik.

KLHK juga telah membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai langkah kongret mengawasi PLTU dan industri yang menjadi sumber pencemaran udara. Satgas ini akan bekerja meneliti serta melakukan penegakan hukum pada industri yang melanggar masalah emisi.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar aturan emisi. Ia mencontohkan, di Jakarta sudah ada Perda yang mengatur sanksi dan pidana ringan bagi pembakar sampah. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukannya.

Selain itu, ia juga menyoroti masih kurangnya kuantitas armada transportasi publik yang dapat diakses warga Jakarta. Sehingga masyarakat masih memilih memakai kendaraan pribadi yang berimbas pada naiknya polusi udara.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menilai, Jakarta sebagai kota sudah gagal sebagai kota yang manusiawi dan lestari. Menurutnya, dalam perspektif lingkungan, alam di Jakarta sudah tidak mampu mereduksi polusi dan output dari industri. Hal ini disebabkan semakin menghilangnya ruang terbuka hijau.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wartawan senior, Saur Hutabarat, mempertanyakan kebijakan keefektifan kebijakan ganjil-genap yang diberlakukan untuk mengurangi kemacetan. Menurutnya, kebijakan ini justru menambah kemacetan dan menambah emisi karena pengguna jalan harus berputar-putar mencari jalan. Kebijakan ini juga mudah diakali yang punya uang dengan membeli lebih dari satu mobil.

Saur mendorong agar kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemacetan dan pencemaran udara lebih condong ke transportasi publik, terutama kereta api. Menurutnya, transportasi publik yang luas dan dapat menjangkau masyarakat adalah solusi tepat dari permasalahan ini. ❑

Aksi Demontrasi PGIN di MPR

Yandri Susanto: Negara Harus Menyejahterakan Guru

Di pundak para gurulah tanggung jawab mendidik anak bangsa berada. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan juga tergantung dari para guru.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H.Yandri Susanto S.Pt., menegaskan bahwa negara harus menyejahterakan guru. Di pundak para gurulah tanggung jawab mendidik anak bangsa berada. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan juga tergantung dari para guru.

"Tinggi rendah kualitas pendidikan tergantung dari kualitas para guru yang ada. Kualitas SDM suatu bangsa tergantung dari pola pendidikan yang diberikan. Maka dari itu, negara wajib memberikan kesejahteraan kepada para guru," jelas Yandri Susanto.

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, saat menerima aspirasi dan tuntutan dari Perkumpulan Guru Inppasing Nasional (PGIN) yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Senin (28 Agustus 2023). Turut hadir Ketua PGIN, Hadi Sutikno, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Marisun.

Menanggapi aspirasi dan tuntutan dari PGIN, Yandri Susanto berjanji secara lahir dan batin akan memperjuangkan aspirasi tersebut. Semua ikhtiar akan dilakukan semaksimal mungkin. Bahkan, Yandri berjanji akan menyampaikan secara langsung kepada Menteri PAN RB serta Menteri Agama.

"Saya akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan dari bapak dan ibu sekalian. Terkait pengangkatan PPPK akan saya sampaikan agar ada keseimbangan kuota antara sekolah umum dan madrasah, khususnya madrasah swasta," jelas Yandri.

"Berulang kali saya sampaikan bahwa tanggung jawab mendidik anak bangsa juga

dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta, sehinga tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau tidak ada sekolah swasta maka banyak anak negeri tidak mendapatkan kesempatan bersekolah," tegas Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Kemudian, menanggapi adanya tuntutan agar dilakukan revisi dari PMA Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bukan PNS pada Kementrian Agama, Yandri berjanji akan menyampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama.

"Saya akan sampaikan usulan revisi PMA Nomor 43 Tahun 2014 agar dimasukkan perhitungan masa kerja dalam pembayaran TPG," jelas Anggota DPR Dapil Banten II ini.

Yandri juga berjanji akan menyampaikan usulan agar rekomendasi sebagai syarat mengikuti tes PPPK cukup dari Kementrian Agama di kabupaten/kota. Tidak perlu sampai kepada Kanwil Kementrian Agama di Provinsi. Sehingga memudahkan para guru inpassing mendapatkan rekomendasinya. Tidak perlu mengurus sampai ke kantor di Provinsi.

"Nanti kita usahakan agar rekomendasi sebagai syarat untuk PPPK cukup dimintakan di kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Sehingga tidak perlu jauh-jauh mengurus sampai di Kantor Wilayah Provinsi," jelas Yandri.

Lebih lanjut, Yandri juga berjanji akan menyampaikan aspirasi terkait belum dibayarnya TPG Inpassing bagi guru di Jawa Timur.

"Tadi saya dengar bahwa TPG di Jawa Timur ada yang masih terhutang, jadi belum dibayarkan. Insya Allah akan saya sampaikan ke Kementrian Agama agar segera dibayar oleh negara, karena itu adalah hak bapak dan ibu semua," jelas Yandri

Di akhir tatap muka itu, Yandri tidak lupa mengingatkan kepada para peserta aksi agar tidak berbuat anarkis dan memberikan apresiasi kepada pihak pengamanan dari unsur polisi serta pengamanan dalam MPR/DPR yang sudah mengawal aksi demonstrasi hari ini sehingga berjalan tertib dan lancar.

"Kepada bapak dan ibu sekalian saya harapkan untuk tidak berbuat anarkis, doakan saya bisa memperjuangkan aspirasi bapak dan ibu semua. Karena hari ini saya lihat wajah bapak dan ibu yang luar biasa. Sebagian besar dari yang hadir ini sudah berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia," ungkap Yandri.

"Tidak lupa saya sampaikan apresiasi kepada pihak pengamanan, baik dari unsur polisi maupun pengamanan dalam MPR/DPR, yang sudah mengawal aksi demonstrasi hari ini sehingga berjalan tertib dan damai," tutup Yandri. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Eksistensi Galeri MURI Jaya Suprana

Bamsoet Turut Menyumbang Beberapa Rekor

Untuk melihat berbagai rekor kebanggaan yang telah dipecahkan anak bangsa, masyarakat bisa mengunjungi dua Galeri MURI.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi konsistensi pengusaha sekaligus budayawan Jaya Suprana dalam mendirikan dan memajukan MURI. Sejak berdiri pada 27 Januari 1990 di kawasan perindustrian Jamu Jago, Srondol, Semarang Selatan, hingga kini MURI telah mencatat puluhan ribu rekor dunia yang dipecahkan anak bangsa. Dari sekian banyak rekor tersebut, Bamsoet turut menyumbang beberapa rekor.

Rekor MURI Bamsoet, antara lain Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku (2023), Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan (2023), Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak (2023), Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak (2020), Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kejuaraan Tembak Nasional Legislator Championship dengan Penembak Terbanyak (2020), serta Penyelenggara Turnamen Catur dengan Peserta Master Terbanyak (2019).

"Untuk melihat berbagai rekor kebanggaan yang telah dipecahkan anak bangsa, masyarakat bisa mengunjungi dua Galeri MURI. Yakni: Galeri MURI Jakarta di Lower Ground Mall of Indonesia, serta Galeri MURI Semarang di Jalan Perintis Kemerdekaan 275. Dari Galeri MURI kita bisa melihat betapa hebatnya anak bangsa dalam memecahkan berbagai Rekor Dunia. Di Galeri MURI Jakarta, pengunjung juga bisa melihat berbagai prestasi yang ditorehkan para Presiden RI dari masa ke masa. Termasuk juga terdapat Teater OSO, tempat diskusi serta menyaksikan berbagai pemutaran video seputar MURI yang dipersembahkan pengusaha nasional sekaligus tokoh bangsa Bapak Oesman Sapta Odang," ujar Bamsoet usai menerima dua penghargaan Rekor MURI sekaligus mengunjungi Galeri MURI, di Mall Of Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8/23).

Turut hadir jajaran MURI antara lain, Pendiri Jaya Suprana, serta Direktur Operasional Yusuf Ngadri.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, rekor yang tercatat di MURI terbagi dalam beberapa kategori. Yakni, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan dan Olahraga, Ekonomi dan Industri, Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup, Seni dan Budaya, Perintis dan Penemuan serta Ketatanegaraan. Hingga kini sudah puluhan ribu rekor yang tercatat oleh MURI.

"Sebagaimana diungkapkan pendiri MURI Jaya Suprana, di balik setiap rekor MURI tersirat kisah perjuangan manusia menciptakan karsa dan karya terbaik di bidang kemampuan masing-masing. Tidak berlebihan jika kita menjadikan MURI sebagai lokomotif dalam mengobarkan semangat, kreatifitas, dan kebanggaan nasional," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, keberadaan Galeri MURI juga didukung digitalisasi melalui teknologi augmented reality (AR) & virtual reality (VR). Sehingga menepis stereotip museum yang kerap dikaitkan dengan tempat untuk memajang foto atau barang-barang lawas.

"Keberadaan Galeri MURI dengan berbagai koleksi rekor yang dicatatkannya telah memperkuat akar sejarah bangsa. Dengan tampilan yang menarik, fresh, dan kekinian, serta lokasinya yang berada di dalam mal, semakin menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berkunjung. Sehingga pada akhirnya kita bisa bangga terhadap prestasi anak bangsa, sekaligus memberikan inspirasi bagi kita semua," pungkas Bamsoet. ❑

Akhir Agustus 2023, Dua Rekor MURI Lagi Diraih Bamsoet

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendapatkan dua rekor penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Yakni, sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku, bernomor piagam 11189/R.MURI/VIII/2023. Serta sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan, dengan nomor piagam 11190/R.MURI/VIII/2023.

Kedua piagam Rekor MURI tersebut

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

langsung diserahkan oleh Pendiri MURI, Jaya Suprana, kepada Bamsoet di Galeri MURI, Mall of Indonesia, Jakarta.

"Aktivitas menulis buku dan merespon berbagai isu kenegaraan tidak lepas karena latar belakang profesi saya sebagai jurnalis. Sejak buku pertama Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1988, alhamdulilah hingga kini saya masih diberikan kemampuan untuk menulis buku sekaligus memberikan respon aktual kepada kawan-kawan jurnalis. Terlebih saat ini sudah ada kemudahan untuk menulis, cukup dengan handphone saat di mobil bahkan di toilet, sudah bisa menulis berbagai pemikiran dengan cepat," ujar Bamsoet saat menerima dua penghargaan Rekor MURI, di Galeri MURI, Mall of Indonesia, Rabu (30/8/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi kiprah Jaya Suprana yang mendirikan MURI dengan dukungan kelompok perusahaan JAMU JAGO pada 27 Januari 1990 di kawasan perindustrian Jamu Jago, Srondol, Semarang Selatan. Selain mencatat berbagai rekor dunia yang dipecahkan oleh anak bangsa, keberadaan MURI juga turut menggelorakan semangat kebanggaan nasional.

"Tanpa MURI, seluruh prestasi anak bangsa bisa hilang ditelan roda waktu zaman. MURI mencatat rekor pertamanya pada 14 Juli 1990, yaitu Pejalan Kaki Termuda yang dipegang oleh Vinas V. Lindri Saputri umur 6 tahun dan menempuh jarak 55 Km Semarang-Jakarta selama 26 hari. Hingga kini, sudah puluhan ribu rekor yang dicatat dalam MURI. Pencatatan Rekor MURI merupakan bagian dari mencatat perjalanan bangsa," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk melihat berbagai catatan rekor MURI yang ditorehkan anak bangsa, masyarakat bisa berkunjung langsung ke Galeri MURI yang berada di Lower Ground Mall Of Indonesia.

"Galeri MURI ditata dan dikelola dengan sangat baik, sehingga pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Lokasinya yang berada di dalam mal juga memberikan nilai tambah bagi pengunjung, sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin berkunjung," pungkas Bamsoet.

Selain kedua rekor MURI tersebut, Bamsoet juga mengoleksi berbagai rekor lainnya dari MURI. Antara lain, Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak (2023), Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak (2020), Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kejuaraan Tembak Nasional Legislator Championship dengan Penembak Terbanyak (2020) serta Penyelenggara Turnamen Catur dengan Peserta Master Terbanyak (2019). ❑

Bertemu Pimpinan Majlis Taklim Se-Jakarta Selatan

HNW: Pemerintah Perlu Sejahterakan Ustadzah di Majlis Taklim

Majlis Taklim menjadi sarana, tidak hanya untuk mendapatkan ilmu agama, tetapi juga kesejahteraan umat. Majlis Taklim menjadi sumber pemberdayaan masyarakat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc.MA., menerima pimpinan Majlis Taklim se-Jakarta Selatan di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). Dalam pertemuan itu, HNW—begitu politisi PKS ini biasa disapa — memberikan dukungan perlunya kesejahteraan ustadzah, sekolah kepemimpinan religi, dan koperasi syariah di Majlis Taklim. Dengan berkolaborasi maka potensi keumatan bisa dimaksimalkan sehingga Majlis Taklim bisa berkembang, semakin luas, daya jangkau berkhidmat pun semakin besar.

"Perlu kolaborasi sehingga potensi keumatan bisa dimaksimalkan dan Majlis Taklim bisa berkembang, relatif semakin luas, daya jangkau berkhidmat pun semakin banyak, dan memaksimalkan potensi umat semakin luas. Kesejahteraan ustadzah, sekolah kempimpinan religi, koperasi syariah di Majlis Taklim ini sangat kita dukung," kata HNW dalam pertemuan dengan pimpinan Majlis Taklim Se-Jakarta Selatan.

Selain untuk bersilaturahim, kedatangan para pimpinan Majlis Taklim Se-Jakarta Selatan yang dipimpin Hj. Siti Nur Khoiriah untuk menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi Majlis Taklim, di antaranya soal kesejahteraan guru mengaji di Majlis Taklim, program sekolah kepemimpinan religi, dan koperasi berbasis syariah. Di Jakarta Selatan tercatat sekitar 2.500 Majlis Taklim. Permasalahan yang dihadapi Majlis Taklim adalah soal kesejahteran guru ngaji di Majlis Taklim, perlunya program sekolah kepemimpinan religi untuk Majlis Taklim, dan koperasi berbasis syariah di Majlis Taklim untuk memberikan solusi kepada para guru mengaji di Majlis Taklim.

Pimpinan Majlis Taklim lainnya mengungkapkan persoalan serupa. Majlis Taklim menjadi tempat masyarakat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk belajar agama. Majlis Taklim menjadi sarana tidak hanya untuk mendapatkan ilmu agama, tetapi juga kesejahteraan umat. Majlis Taklim menjadi sumber pemberdayaan masyarakat. Namun, selama ini Majlis Taklim mandiri, sehingga perlu uluran tangan dari pemerintah. Karena itu, Majlis Taklim perlu mendapatkan bantuan operasional seperti halnya Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI), juga pendampingan manajemen untuk Majlis Taklim.

Kepada para Pimpinan Majlis Taklim Se-Jakarta Selatan, HNW mengungkapkan, pemerintah seharusnya berterima kasih dengan adanya Majlis Taklim, pesantren, dan

madrasah, karena dengan keberadaan lembaga-lembaga itu sangat membantu pemerintah. Majlis Taklim adalah gambaran tentang kemandirian warga. "Tetapi pemerintah tidak mungkin mengelola semuanya karena pasti tidak mampu. Karena itu, solusinya adalah melalui dana-dana zakat dari Baznas, Bazda, dan dana-dana filantropri dari umat," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Menurut HNW, untuk kesejahteraan para ustadzah di Majlis Taklim bisa melalui beberapa lembaga, seperti Baznas dan lembaga-lembaga zakat lainnya. Potensi zakat sangat besar, tidak kurang dari Rp 230 triliun setiap tahun. Tetapi, dari potensi zakat Rp 230 triliun itu, Baznas hanya bisa mengumpulkan sekitar Rp 20 triliun atau sekitar 10% saja. Tetapi dari 10% itu jika bisa dilaksanakan dengan baik dan benar tetap akan memberi banyak mashlahat.

HNW meminta Majlis Taklim membuat surat resmi untuk mendapatkan bantuan untuk kesejahteraan guru mengaji di Majlis Taklim, bantuan operasional Majlis Taklim, koperasi syariah di Majlis Taklim. "Bantuan itu sangat memungkinkan. Majlis Taklim dan dana untuk Majlis Taklim sangat masuk akal untuk diperjuangkan. Nanti bersama tim di DPR akan kita kaji supaya bisa menjadi program di Baznas atau lembaga filantropi lainnya," kata anggota Komisi VIII DPR RI ini.

"Perlu surat resmi dari Majlis Taklim untuk nanti dibicarakan dengan Baznas atau lembaga filantropi lainnya mengenai perlunya dana operasional untuk Majlis Taklim, dana untuk kesejahteraan ustadzah, sekolah kepemimpinan religi, koperasi syariah Majlis Taklim. Ini yang akan diperjuangkan, tetapi sebagai anggota DPR hanya bisa mengusulkan. Namun, semua ini adalah usaha, satu langkah untuk bisa diwujudkan," pungkasnya. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Diskusi Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI

Jazilul Fawaid
Demokrasi di Indonesia Belum Sesuai Harapan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr.H. Jazilul Fawaid, S.Q., MA., yang akrab disapa Gus Jazil mengatakan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tengah mengalami percobaan yang tidak kecil. Ali-alih melaksanakan sila-sila Pancasila, demokrasi di Indonesia malah berubah menjadi transaksional. Melahirkan polarisasi di tengah masyarakat, dan menimbulkan renggangnya kohesi sosial. Juga, memantik narasi-narasi yang kurang sesuai, seperti, politik identitas.

Penyimpangan dalam demokrasi itu, menurut Gus Jazil, terjadi karena masyarakat belum siap melaksanakan demokrasi. Faktor ekonomi dan pendidikan menyebabkan pilihan masyarakat terhadap para calon tidak berdasarkan masalah visi dan misi. Tetapi, lebih kepada gizi yang dibawa dan diberikan. Dan, itu membuat salah satu tujuan demokrasi, yaitu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat, belum tercapai.

"Pilihan kita untuk berdemokrasi, itu sudah benar. Tetapi, budaya dan kehidupan kita yang belum siap untuk menopang demokrasi. Mestinya, dalam berdemokrasi itu pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakatnya sudah bagus dulu. Sehingga saat para calon melakukan kampanye, yang ditanya adalah visi dan misinya, bukan gizinya," ungkap Jazilul Fawaid.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul Fawaid saat menjadi narasumber pada diskusi Empat Pilar, dalam rangka "Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI". Acara tersebut berlangsung berkat kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Diskusi tersebut berlangsung di Ruang Media Center MPR DPR dan DPD RI, Rabu (23/8/2023). Tema yang dibahas adalah "Pemilu 2024, Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Yang Mempersatukan Bangsa".

Selain Gus Jazil, ada dua pembicara lain yang jadi narasumber. Keduanya adalah Anggota MPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil, dan pengamat politik yang juga pengajar di Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin.

Menyangkut Demokrasi Konstitusional yang menjadi tema diskusi, Jazilul Fawaid tegas mengatakan, bahwa yang terpenting dalam demokrasi adalah konstitusi atau hukum. Kalau hukum sudah dipermainkan berarti sudah bukan demokrasi. Jika hukum tidak bisa

berlaku adil maka jangan tanya soal demokrasi.

Pernyataan serupa disampaikan Anggota MPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil. Menurut anggota MPR dapil Aceh ini, demokrasi konstitusional, demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Bahkan, kalau sampai terjadi penyimpangan terhadap konstitusi dipastikan akan terjadi keributan. Yang juga penting dalam pelaksanakaan demokrasi konstitusional, kata Nasir Djamil, adalah kebebasan dan kesetaraan.

"Tetapi, demokrasi bukan berarti sebebas-bebasnya, harus diatur, karena kalau tidak akan kebablasan. Dan, pengaturannya sama dilakukan sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya.

Menyangkut kondisi politik terkini, menurut Nasir Djamil, koalisi menuju pilpres masih sangat terbuka untuk berubah. Bukan hanya keluar dan berpindah ke koalisi lain, tetapi juga terbuka kemungkinan seorang capres rela menjadi cawapres, semua masih dinamis.

"Pertemuan para elit partai masih akan terus terjadi, perubahan koalisi juga masih terbuka lebar. Mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat sadar bahwa dalam pemilu tidak perlu ada kekerasan. Masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa pertemuan para ketua umum partai, salah satunya bertujuan untuk menghaluskan pemilu agar ketegangan seperti pada Pemilu 2019, tidak terjadi lagi," pungkasnya. ❑

Lomba Stand Up Comedy HUT MPR RI

Taufik Basari : Masalah Politik dan Tata Negara Tak Harus Dibahas Dengan Kaku dan Sangat Serius

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PIMPINAN Badan Sosialisasi MPR RI yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem MPR, Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M., menyambut baik pelaksanaan Lomba Stand Up Comedy dalam menyosialisasikan Empat Pilar. Menurut Taufik, sudah saatnya sosialisasi tidak melulu dilakukan secara kaku, dengan cara pidato, ceramah hingga seminar, seperti dilakukan selama ini.

Lebih lanjut Taufik menyatakan, cara-cara lain yang lebih santai dan disukai anak muda patut diterapkan. Salah satunya adalah menggunakan metode stand up comedy. Karena dalam perjalanannya, MPR juga menemukan fakta, penyampaian sosialisasi dengan ceramah serta pidato kerap membuat peserta bosan sehingga mengantuk.

"Baik juga membahas masalah politik hingga tatanegara dengan cara lebih santai, menyenangkan bahkan canda tawa. Bukan tidak mungkin hasilnya akan lebih baik. Pesan yang hendak disampaikan bisa diterima lebih gampang," ungkap anggota MPR dapil lampung I ini.

Pernyataan itu disampaikan Taufik Basari saat membuka babak semi Final Lomba Stand Up Comedy untuk memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia dan Hari Lahir MPR RI ke-78. Lomba ini mengetengahkan tema: 'Pendidikan Penguatan Empat Pilar MPR untuk Generasi Muda.'

Acara tersebut berlangsung di Plaza Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR RI, Selasa (22/8/2023). Ikut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua MPR H. Arsul Sani, SH., M.Si., LL.D., serta Kepala Biro Humas

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR Siti Fauziah SE., MM. Lomba Stand Up Comedy kali ini diikuti 110 peserta. Dari jumlah tersebut dipilih 25 peserta untuk bertanding di babak semi final. Dan, pada babak final yang berlangsung pada Selasa (29/8/2023) bertanding 10 peserta. Tiga juri ikut memberikan penilaian, mereka adalah: Iwel Sastra, Andi Wijaya, dan Ridwan Remin.

Bagi Taufik, peserta stand up comedy merupakan orang-orang yang memiliki kecerdasan tersendiri. Karena, dalam waktu yang singkat, mereka dituntut menangkap fakta-fakta dan meramunya dengan kata-kata, lalu menyampaikannya dengan jenaka. Kalau tidak cerdas mana mungkin mereka bisa menghadirkan kejenakaan itu.

"Itu tidak mudah, bahkan para politisi yang sering berpidato pun, belum tentu bisa menyampaikan pesan yang membuat orang lain tersenyum. Mudah-mudahan, lomba ini bisa menjadi terobosan, sehingga ke depan sosialisasi MPR akan lebih berhasil," kata Taufik lagi.

Selama lomba berlangsung, banyak kritik dan juga aspirasi disampaikan peserta kepada MPR. Salah satunya adalah dari Rizal, komedian asal Jakarta. Peserta yang memerankan tokoh guru SLB Tuna Netra itu jelas mengkritisi Sosialisasi Empat Pilar yang menggunakan banyak pidato. Cara itu, menurut Rizal, membuat banyak peserta yang mengantuk dan tidur, karena membosankan. Tidak cuma mengkritik metode sosialisasi, Rizal juga menentang rencana pemerintah menghapus tunjangan guru.

"Saya sering kerja hingga malam, dan itu tidak dihitung lembur. Kami bahkan melakukannya dengan sukarela, karena merasa tanggung jawab. Tetapi, kalau tunjangan guru jadi dihapus, sesuai isi UU Omnibus Law akan banyak guru yang menderita. Ujung-ujungnya, saya bisa hapus itu buku-buku yang memakai huruf braile sehingga murid-murid tidak bisa belajar," pungkasnya. ❑

Sosialisasi Empat Pilar Bersama KADIN Indonesia

Bamsoet: Pengusaha KADIN Harus Jadi Pengusaha Bela Negara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mengungkapkan, terdapat keterkaitan yang erat antara Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan dunia usaha. Salah satunya terlihat dari proses lahirnya UU No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Di dalamnya ditegaskan bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi, diselenggarakan dengan mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, serta mendorong seluas-luasnya kesempatan berpartisipasi bagi pelaku usaha, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

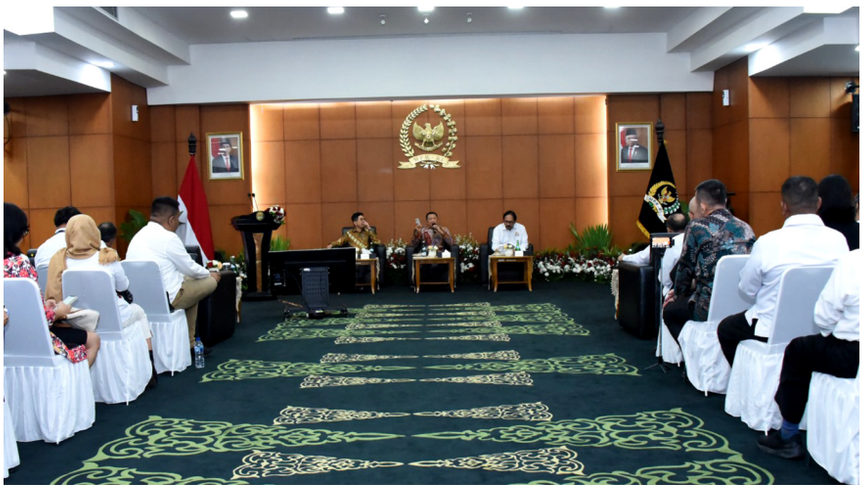

"Sinergi antarsektor usaha yang melibatkan badan usaha milik negara/daerah, koperasi, dan sektor swasta yang diwadahi dalam organisasi KADIN, diarahkan pada muara pemerataan kesejahteraan rakyat, penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan ketahanan nasional. Selaras dengan gagasan NKRI sebagai konsensus yang mempererat soliditas kebangsaan, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu kemajemukan bangsa," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi dan Diskusi Implementasi Empat Pilar MPR RI bagi Dunia Usaha yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (7/8/23).

Turut hadir, antara lain Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi KADIN Indonesia Yukki N. Hanafi, serta Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K. Hardjono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI juga memiliki makna penting untuk mendorong para pelaku usaha mewujudkan ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing global, serta melindungi kepentingan ekonomi nasional. Termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan, seperti perburuhan, konflik sosial, kerusakan lingkungan, hingga ketergantungan pada pihak asing.

Sebagaimana ditekankan dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa sistem perekonomian nasional adalah sistem perekonomian khas yang berbeda dengan dua kutub dikotomi perekonomian yang telah menjadi hegemoni

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

global. Sistem perekonomian Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, dimana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia juga bukan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi.

"Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi dan keadilan sosial," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, KADIN selaku rumah besar bagi para pelaku usaha, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi, memiliki andil yang penting untuk menjadikan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI tersebut sebagai sumber etika bisnis.

"Prinsip-prinsip etika bisnis yang menjadi landasan penting bagi perusahaan dan bisnis saat ini, seperti nilai-nilai akuntabilitas, integritas, tanggung jawab, transparansi, keadilan, loyalitas dan kepedulian lingkungan, semuanya merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI. Sedemikian pentingnya etika kehidupan berbangsa, termasuk etika dalam ekonomi dan bisnis, MPR pun secara khusus telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan MPR ini menjadi salah satu TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengapresiasi kinerja dunia usaha yang turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 5,03%. Tidak saja melebihi ekspektasi dari banyak pihak, namun juga terjadi di tengah kelesuan ekonomi global. Bahkan, beberapa negara maju mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah 2%. Misalnya Amerika Serikat dengan akselerasi pertumbuhan 1,6%, Jepang 1,3%, dan Singapura 0,4%.

"Tingkat inflasi juga terus melandai. Tercatat sebesar 3,08% pada Juli 2023, turun dari 5,28% pada awal tahun. Angin segar bagi dunia usaha juga ditandai realisasi investasi pada triwulan I tahun 2023 yang mencapai Rp 328,9 triliun, turut andil menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 384 ribu tenaga kerja Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran," pungkas Bamsoet. ❑

Pelantikan FSUI dan Sosialisasi Empat Pilar

Yandri Susanto: Bila Ulama Kompak dan Bersatu Bangsa ini Damai

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN ulama yang terhimpun dalam Forum Silaturahim Ulama In donesia (FSUI) pada Rabu, 23 Agustus 2023, memenuhi Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. Kehadiran para ulama dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang (Jabodetabek) ke gedung wakil rakyat itu adalah untuk mengikuti pelantikan FSUI DPW Jabodetabek dan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di antara ratusan ulama itu tampak hadir Wakil Ketua MPR Yandri Susanto S.Pt., Ketua FSUI KH. Kholid Hidayat Hasyim MA., Ketua PWNU Jakarta KH. Samsul Ma'arif MA., dan KH. R. Syarif Rahmat SQ., MA.

Dalam kesempatan tersebut, Yandri Susanto mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan FSUI DPW Jabodetabek. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap, organisasi yang menghimpun para pimpinan pondok pesantren itu menjadi organisasi yang bermanfaat di tengah masyarakat. "Ucapan dan kata-kata ulama didengar oleh umat sehingga organisasi ini sangat penting," ujarnya.

Yandri mengingat bahwa bila ulama kompak dan bersatu maka umat tidak akan terpecah belah dan bangsa ini pun akan damai. "Namun, kalau ulamanya berantem, saling menjelekkan, hal demikian akan membuat negeri ini merugi," paparnya.

Yandri Susanto mendorong agar FSUI dalam berdakwah melakukan pendekatan yang sifatnya merangkul, bukan memukul. "Saya usulkan metoda dakwahnya dilakukan secara demikian," ujar anggota DPR dari Dapil II Banten itu.

Selanjutnya, Yandri mengungkapkan, banyak persoalan yang sekarang menimpa

umat, terutama generasi muda. Disebutnya, seperti kenalakan remaja, narkoba, hingga ancaman LGBT. Menghadapi persoalan yang menimpa umat, dia berharap agar ulama turun langsung ke tengah masyarakat.

Kesalahan yang ada pada umat, menurut Yandri Susanto, bukan karena kesalahan yang dibuatnya sendiri, namun bisa jadi karena dakwah yang disampaikan oleh ulama belum sampai ke mereka. “Bisa juga karena metoda dakwahnya kurang tepat,” tuturnya. “Nah, bila kurang tepat maka perlu diubah metodanya,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh pria asal Bengkulu itu, Republik ini hadir karena ada kontribusi para ulama. Jasa ulama dan santri tak terhitung nilainya. Saatnya negeri ini berterima kasih membalas perjuangan para ulama pendahulu yang hasilnya diteruskan oleh para ulama saat ini.

Yandri Susanto menegaskan, wujud perhatian pemerintah kepada para ulama adalah dengan memberi kepedulian terhadap keberadaan pesantren, madrasah, dan ormas Islam. “Memberi perhatian dan peduli pada ulama merupakan jalan sekaligus merawat Republik ini,” tuturnya. ❑

Perpustakaan MPR Gelar Seminar Strategi Menuju Akreditasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PULUHAN pustakawan dari berbagai lembaga negara dan pemerintah, Rabu (22/8/2023), memenuhi Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Pada hari itu, Perpustakaan MPR menggelar seminar dengan tema 'Strategi Perpustakaan Khusus Menuju Akreditasi'.

Kegiatan yang digelar secara 'daring' dan 'luring' tersebut mampu menarik para pustakawan dari berbagai lembaga dan tempat, buktinya hadir secara 'daring' sebanyak 150 orang. Hadir dalam acara tersebut Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional, Dra. Adriati M.Hum.

Dalam sambutan, Pustakawan Madya Perpustakaan MPR Yusniar SH mengatakan, akreditasi merupakan kewajiban bagi seluruh perpustakaan. Akreditasi perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja perpustakaan, serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan. "Agar tujuan tercapai maka dalam kesempatan ini Perpustakaan MPR menggelar dan mengundang para pustakawan untuk mengikuti seminar ini", ujarnya.

Saat menyampaikan presentasinya, Yusniar mengungkapkan bahwa Perpustakaan MPR memiliki komponen utama berupa kurang lebih 52.000 eksemplar, lima sampai 6 jenis koleksi referensi, lebih dari 1.802 judul koleksi elektronik, memiliki aplikasi otomasi baku lengkap (Inlislite) yang didukung fasilitas LAN terkoneksi internet.

Menurut Yusniar, Perpustakaan MPR memiliki luas bangunan kurang lebih 1.125 meter persegi. Di mana di dalamnya ada rak buku cetak, rak koleksi jurnal ilmiah, rak majalah, serta rak display koleksi buku baru. "Juga dilengkapai dengan peralatan multimedia, seperti PC, scanner, printer, televisi, RFID Gate, kursi dan meja untuk pemustaka yang akan membaca buku," tuturnya.

Yusniar selanjutkan pelayanan yang diberikan oleh Perpustakaan MPR, yakni layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, penyediaan dokumen, fotokopi, dan kunjungan pemustaka. Untuk mendukung semua aktivitas di atas, Perpustakaan MPR memiliki 5 orang pustakawan, 4 orang pengadministrasi umum, dan 2 orang PPNPN. ❑

Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI

Dimeriahkan Turnamen Catur Wartawan Parlemen 2023

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PELAKSANA tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sesjen) MPR RI, Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si., di lobi Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (27/8/2023) membuka secara resmi Turnamen Catur Wartawan Parlemen 2023 memperebutkan Piala Ketua MPR RI.

Turnamen yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Paremen (KWP) ini digelar dalam rangka Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI. Hadir dalam acara itu, Plt. Deputi Bidang Admisistrasi Siti Fauziah, SE., MM., Ketua KWP Ariawan, dan anggota KWP peserta turnamen.

Dalam sambutannya, Janedjri menjelaskan bahwa Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, latar bekakang sejarahnya adalah dikarenakan konstitusi atau UUD 1945 itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus.

Sedangkan HUT MPR yang diperingati setiap tanggal 29 Agustus, karena Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cikal bakal lembaga MPR itu dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945.

Bicara dan mendalami tentang Hari Konstitusi dan HUT MPR, lanjut Janedjri, tentu ada hal yang penting yang perlu diketahui, sama-sama harus dipahami dan dilaksanakan semua anak bangsa, terkait mengambil tanggung jawab dalam mengawal implementasi konstitusi yang tentu disesuaikan dengan tantangan zaman.

"Saya berharap rekan-rekan wartawan juga ikut mengambil tanggung jawab itu dalam mengawal implementasi konstitusi kita itu secara bersama-sama," katanya.

Sedangkan tentang lembaga MPR, Janedjri mengungapkan bahwa setelah perubahan UUD kewenangan MPR bergeser. Meskipun begitu, dengan visinya yang luar biasa bukan berarti MPR itu kehilangan makna di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan MPR tampil dengan visi dan perannya sebagai Rumah Kebangsaan, Mengawal Ideologi dan Kedaulatan Rakyat.

Lebih jauh, Janedri mengungkapkan bahwa peranan MPR itu ternyata sangat penting untuk membentuk karakter bangsa, terutama untuk generasi Z dan generasi milenials yang memang sudah menjadi perhatian utama di MPR. Apalagi bangsa ini sedang mempersiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045

"Upaya kita dalam menyongsong Indonesia Emas itu harus dimulai dari sekarang. Untuk mewujudkan itu semua, MPR tidak bisa bekerja sendiri. MPR harus bekerja sama dan bahu membahu dengan stake-holder pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan itu, antara lain bapak ibu saudara yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KWP Ariawan, mengatakan, turnamen catur yang digelar saat ini pemenangnya nanti akan maju berlaga pada bulan November, yakni turnamen catur tingkat nasional yang tentunya akan bekerjasama dengan MPR RI kembali.

Ariawan berharap, ajang lomba catur internal KWP ini semakin mempererat tali silaturahim sesama wartawan Parlemen untuk bersinergi dengan MPR RI, termasuk DPR RI, dan DPD RI. Apalagi, antara jurnalis dengan institusi/lembaga (MPR/DPR/DPD RI), tempat sehari-hari menjalankan tugas liputannya sudah seharusnya saling bersinergi dan mendukung satu sama lain. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Hj. Anggia Erma Rini, MKM., Anggota MPR Fraksi PKB

Polusi Udara Sudah Mengancam Nyawa dan Kemanusiaan

KOTA Jakarta dalam satu bulan terakhir ini menempati peringkat pertama dalam daftar kota paling berpolusi di dunia. Menurut situs pemantau IQAir, indeks kualitas udara (AQI) di ibu kota Indonesia itu selalu berada di kategori merah dan oranye, artinya tidak sehat dan sehat bagi kelompok sensitif. Dampaknya, sudah terasa pada kesehatan, yaitu melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di rumah sakit. Bahkan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut, polusi udara sebagai "pembunuh senyap". Data Kementerian Kesehatan mencatat, sekitar 200.000 penderita ISPA karena polusi udara.

Penyebab polusi udara di Jakarta masih menjadi perdebatan. Ada beberapa pihak yang menyalahkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara sebagai penyebab buruknya kualitas udara di kota Jakarta dan sekitarnya. Namun, ada pula yang bilang polusi udara berasal dari kendaraan bermotor. Dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Agustus 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyatakan bahwa sektor transportasi merupakan pengguna bahan bakar paling besar di Jakarta.

Penghasil emisi karbon monoksida (CO) terbesar disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% , disusul pembangkit listrik 1,76%, industri 1,25%. Sepeda motor merupakan penghasil bahan pencemaran paling tinggi dibanding mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan bus. Dengan populasi mencapai 78% dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebanyak 24,5 juta kendaraan, dan pertumbuhan sepeda motor 1.046.837 per tahun.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk menekan tingkat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, antara lain dengan uji emisi, menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit. Namun, upaya-upaya itu belum bisa mengurangi polusi udara di Jakarta.

Untuk mengetahui lebih jauh masalah polusi udara ini, berikut penuturan anggota MPR dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. Hj. Anggia Erma Rini, MKM. Berikut petikannya.

Polusi udara di kota Jakarta dalam satu bulan terakhir menempati peringkat pertama dalam daftar kota paling berpolusi di dunia. Apa tanggapan ibu?

Masalah polusi udara yang semakin buruk di kota Jakarta dan sekitarnya harus direspons dengan cepat para pemangku kebijakan. Sebab, polusi udara di Jakarta adalah masalah nyawa warga masyarakat. Polusi udara adalah masalah kesehatan. Dampak polusi ini tidak hanya menimpa satu-dua orang saja, tetapi banyak orang. Bahkan catatan dari Kementerian Kesehatan menyebut sekitar 200.000 penderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) akibat polusi

udara. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 40% dari penderita ISPA sebelumnya.

Karena itu, masalah polusi ini harus ada penanganan segera. Kementerian dan lembaga terkait dengan polusi udara ini harus duduk bersama-sama untuk mencari solusi yang paling tepat mengatasi masalah ini. Polusi udara ini sudah menyangkut masalah "kejahatan lingkungan" karena sudah mengancam kehidupan, soal nyawa dan kemanusiaan.

Apa yang menjadi penyebab utama polusi udara yang semakin parah di Jakarta?

Kalau kita lihat data jumlah kendaraan motor di Jakarta mencapai 40 juta unit. Jumlah itu belum termasuk moda lainnya. Jumlah kendaraan bermotor yang lalu lalang di Jakarta itu sebanyak 40 juta unit. Padahal, kendaraan bermotor yang teregistrasi hanya sekitar 24,5 juta unit. Jadi, paling tinggi polutan (zat atau senyawa yang mencemari udara kota Jakarta) berasal dari sektor transportasi. Sektor transportasi ini menjadi penyumbang paling tinggi tingkat polusi udara di kota Jakarta.

Apakah dengan demikian kendaraan bermotor di Jakarta perlu dibatasi untuk menekan tingkat polusi udara?

Karena penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi maka perlu regulasi yang bisa membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga bisa mengurangi emisi kendaraan bermotor. Hal ini terkait dengan jumlah produksi motor dan mobil di Indonesia. Selama ini tidak aturan yang menegaskan soal batas jumlah kendaraan bermotor yang boleh diproduksi atau diimpor.

Terkait dengan polusi udara ini, Presiden Joko Widodo menyebut adanya industri yang nakal dan bahkan Presiden mengancam industri yang menghasilkan polusi udara itu. Apa tanggapan Ibu?

Sebenarnya bukan hanya industri yang nakal, tapi pengguna kendaraan bermotor yang tidak merawat kendaraannya juga menjadi penyumbang polusi udara. Artinya, memang harus ada regulasi juga terhadap emisi buangan kendaraan bermotor. Misalnya, dengan adanya pembatasan tahun kendaraan bermotor, termasuk emisi kendaraan motor tersebut.

Negara berperan di sini karena melalui instrument peraturan perundang-undangan bisa mengambil langkah untuk bisa menyelamatkan warga masyarakat dari dampak polusi udara. Negara harus segera membuat aturan yang bisa mengurangi polusi udara ini karena polusi udara ini sudah menyangkut nyawa dan kemanusiaan. Penderita ISPA sudah mencapai 200.000 pasien. Hal itu tidak bisa dibiarkan, harus segera ada aturan yang membatasi segala produksi polutan yang ada di Jakarta ini.

Peraturan itu bisa dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau lainnya. Yang jelas peraturan itu bisa membatasi dan mengurangi polusi udara ini. Termasuk, misalnya, pembatasan kendaraan bermotor dengan syarat harus mengikuti standar emisi (pembuangan udara). Kemudian Kementerian Perindustrian juga membatasi produk kendaraan bermotor. Di Jakarta sendiri terdapat 40 juta kendaraan bermotor yang lalu lalang. Misalnya, pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan dalam satu keluarga. Sekarang, banyak keluarga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan motor atau mobil. Mereka memiliki mobil dan motor lebih dari satu.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menurut Ibu, perlukah sanksi yang dijatuhkan kepada sumber penyebab polusi udara, khususnya kepada perusahaan-perusahaan (industri) yang tidak memerhatikan buangan limbah udara?

Memang harus ada sanksi kepada Perusahaan-perusahaan "nakal" tersebut. Sebab, harus ada sanksi kepada pelaku "kriminal lingkungan". Menurut saya, harus ada kebijakan yang berani, yaitu berani memberikan sanksi. Misalnya, sanksi tegas dengan menutup perusahaan (industri) tersebut. Kita seharusnya memiliki alat ukur untuk mengukur seberapa besar emisi yang dikeluarkan industri-industri itu.

Apakah sanksinya termasuk penutupan perusahaan (industri) tersebut?

Ya, kita nanti lihat tingkat kesalahannya. Sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat kesalahan. Paling maksimal perusahaan itu bisa ditutup.

Untuk mengatasi polusi udara ini, apa yang dilakukan DPR, khususnya Komisi IV DPR, yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)?

Dalam rapat internal Komisi IV, kita memang mengundang Menteri LHK untuk mengangkat masalah polusi udara ini. Rapat internal Komisi IV juga sepakat untuk membuat Panja polusi udara kota Jakarta ini. Jika memang diperlukan, kita juga bisa membuat Pansus polusi udara yang melibatkan komisi-komisi lain. Tapi, kami di Komisi IV sudah sepakat untuk membentuk Panja polusi udara ini.

Kita juga akan memanggil sekitar 10 PLTU yang juga menjadi penyumbang pencemaran udara, termasuk juga pabrik dan industri yang ada di sekitar Jakarta. Kita juga akan memanggil Perusahaan-perusahaan "nakal" yang tidak memerhatikan limbah udaranya. ❑

Semoga Berdampak Positif *untuk Daerah*

MALAM Grand Final Pemilihan Puteri Otonomi Indonesia (POI) 2023 yang berlangsung di Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (23/6), tampak semarak. Bertambah meriah lagi, ketika Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyematkan selempang juara POI 2023 kepada **Elisha Gabriell Rosalia Lumintang**.

Malam itu, finalis berusia 22 tahun asal Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, ini menerima mahkota simbol estafet regenerasi POI dari Juara POI 2022 Gresita Siahaan. Elisha menyabet juara setelah menyisihkan 15 finalis lain, peserta Pemilihan POI 2023.

Elisha mengaku senang dengan pencapaian ini. Apalagi, sebagai pemenang POI 2023 dia akan didaulat menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan EkonomiKreatif selama sehari. “Semoga ini menjadi inspirasi bagi pemuda di daerah kami untuk mau berkarya bagi Indonesia,” harap Elisha. ❑

DER

Elisha Lumintang

Awalnya Bingung
.....eh Malah Juara

SUWARNO Wijaya, komika asal Bogor, Jawa Barat, mengaku gembira keluar sebagai pemenang, dan meraih Juara 1 Lomba Stand Up Comedy yang diselenggarakan oleh MPR RI pada 2023. Gelar juara itu diraihnya setelah dia berhasil menyisih lawan-lawannya di final "adu lawak" di Kompleks MPR RI, 29 Agustus 2023.

"Terima kasih buat MPR yang membuka kesempatan untuk kami mengeluarkan karya dan bakat kami. Selamat HUT untuk MPR semoga tetap jaya dan selalu mendengar aspirasi rakyat," ujar Suwarno sesaat setelah menerima penghargaan.

Bagi Suwarno, penghargaan kejuaraan stand up comedy bukan untuk pertama kali dia terima. Beberapa tahun lalu, dia juga menyabet Juara III Lomba Stand Up Comedy yang digelar DPC PDI-Perjuangan Kota Bogor. ❑

DER

Suwarno Wijaya

Novia Bachmid

Bangga Tampil di Acara
Hari Konstitusi dan HUT MPR

NOVIA Noval Bachmid, penyanyi dan aktris keturunan Manado-Arab, tampil memukau di acara Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI pada 18 Agustus 2023. Diiringi komposer muda Alffy Rev dan Orkestra Taruna STIN-BIN, penyanyi kelahiran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Januari 2002, ini membawakan medley lagu-lagu daerah dan nasional karya sang komposer.

"Wow..luar biasa bangga sekali saya bisa tampil di acara kebangsaan ini. Apalagi disaksikan banyak pejabat negara, dan membawakan lagu-lagu daerah. Saya harap terhibur dan menjadi pengalaman tak terlupakan untuk saya," kata penyanyi jebolan delapan besar Indonesian Idol ini.

"Selamat pada MPR, Ayo kita terus Adil, Makmur, dan Sejahtera," pekiknya. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Museum dan Galeri SBY-Ani

Saksi Perjalanan Hidup dan Perjuangan SBY

MUSEUM dan Galeri SBY-Ani di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, tampak sangat megah. Bangunan dua lantai, dengan tembok bercat putih, itu begitu dominan dibanding gedung-gedung lain di sekitarnya. Enam pilar besar yang menopang bagian fasad, membuat Museum dan Galeri SBY-Ani terlihat semakin megah dan kokoh. Menggambarkan kuatnya kepemimpinan sosok Presiden ke-6, sekaligus presiden dua periode, dan presiden pertama hasil pemilihan langsung.

Tidak hanya megah dan kokoh, hijaunya rumput dan pepohonan yang tumbuh di kawasan seluas 1,5 hektar itu membuat wilayah museum terlihat semakin asri. Pemandangan tersebut sedikit memberikan kesan feminisme pada bangunan seluas 7.500 meter tersebut. Dari sisi luar, juga terdapat beberapa ornamen yang menambah pesona serta keindahan bangunan museum.

Ornamen itu, antara lain logo Museum SBY-Ani yang ada di bagian tengah teras depan. Salah satu yang mencolok dari gambar logo tersebut adalah Burung Garuda yang ada di tengah logo. Logo ini nampak sangat gagah dengan enam bintang dan peta Indonesia di bawahnya. Juga bendera merah putih dan lingkaran kuning bertuliskan Museum SBY Presiden Republik Indonesia ke-6. Selain logo museum, di bagian atas

bangunan museum yang mirip dengan istana kepresidenan Amerika, White House, itu terdapat ukiran bunga flamboyan, puspa kecintaan mendiang Ibu Negara, Ani Yudhoyono.

Kemegahan Museum dan Galeri SBY-Ani ini semakin terasa mewah saat pengunjung masuk ke dalam ruangan museum. Seolah hendak menyambut kehadiran pengunjung, di tempat tersebut terpampang sosok SBY-Ani dengan bingkai sangat besar. Praktis, hanya ada foto tersebut di ruang depan museum, tidak terdapat ornamen lain, kecuali meja resepsionis yang terlihat elegan menempati posisinya.

Melewati ruang bagian depan, pengunjung akan mendapati mural SBY-Ani di berbagai aksi. Foto-foto di tempat ini seolah menggambarkan perjalanan SBY dari zaman ke zaman. Melihat bentuknya, tempat tersebut seperti lorong pendek yang mengantarkan pengunjung menuju ke ruang tengah, untuk menyusuri perjalanan hidup SBY, di berbagai sisi kehidupannya.

Di museum yang memiliki formasi bangunan membentuk huruf Y itu tersimpan koleksi seni dan foto-foto hasil jepretan almarhumah Ani Yudhoyono, istri SBY. Museum dan Galeri Seni SBY juga menyimpan berbagai motif batik mahakarya para seniman batik dari berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali seni batik pacitan.

Tak cukup sampai di situ, Museum dan Galeri SBY-Ani juga menyimpan karya lukis SBY. Juga perpustakaan beserta koleksi buku-buku SBY, termasuk sejumlah buku karya SBY. Perpustakaan di dalam galeri ini secara keseluruhan menyimpan tak kurang dari 15.000 buku.

Seluruh barang-barang yang tersimpan dalam museum ditata menyesuaikan latar belakang SBY. Semasa SBY aktif sebagai militer misalnya, ditempatkan pada ruang yang desain seperti barak militer. Tak terkecuali foto dan atribut SBY saat menjadi taruna. Demikian juga ketika menjadi Menteri dan Presiden ke-6 Republik Indonesia.

Salah satu yang cukup unik ada dalam museum ini adalah keberadaan mobil Volvo, replica kendaraan Menteri yang pernah digunakan SBY semasa menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan Indonesia. Mobil tersebut tampak masih utuh, dan terawat dengan baik. Selain itu, ada pula tenan khusus klub bola voli yang didirikan dan dibina sendiri oleh SBY, yaitu Lavani.

Lavani dirikan untuk selalu mengingat dan mengenang cinta SBY terhadap Kristiani Herawati, istri Presiden RI ke-6. Karena itu, klub voli tersebut diberi nama Lavani, berasal dari kata Love dan Ani. Di tempat ini pengunjung bisa membeli *jersey* dan *merchandise* bertemakan Lavani.

Gladi Bersih

Saat ini, Museum dan Galeri SBY-Ani sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat. Harga tiket masuk untuk pengunjung warga Pacitan dikenakan biaya Rp 25.000, wisatawan lokal luar Pacitan sebesar Rp 50.000, dan wisatawan mancanegara Rp100.000. Museum dibuka selama enam hari dalam satu minggu, dan tutup pada hari selasa.

Dimulainya pembukaan museum SBY Ani ditandai dengan prosesi peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden ke-6 Indonesia, bertepatan dengan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia atau bertepatan hari Kamis (17/8/2023). Beberapa tamu penting tampak hadir dalam acara tersebut, mulai dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, serta para menteri pada era SBY berkuasa.

Acara malam itu menandai berakhirnya beberapa kali rencana peresmian yang sempat tertunda. Pada peresmian tersebut, SBY berkenan menekan tombol yang diikuti dengan pertunjukan kembang api, lampu, dan juga laser.

Proses peresmian sendiri, semula tampak tidak akan berjalan lancar. Maklum sejak pagi hingga petang hari langit di atas Pacitan, utamanya di kawasan museum, diguyur gerimis dan awan gelap. Sampai-sampai seluruh kursi para tamu ditutup menggunakan terpal agar tetap kering. Bahkan, air yang terus menggenang di teras museum berkali-kali di keringkan, tetapi gerimis seakan enggan untuk berhenti.

Beruntung, sesaat sebelum kumandang azan magrib, langit tampak cerah. Tersirat sisa-sisa cahaya matahari, penanda awan gelap telah meninggalkan langit di atas tempat acara. Seketika persiapan peresmian museum pun disegerakan. Terpal penutup kursi diangkat. Beberapa kursi yang basah segera diganti, dan teras museum pun dikeringkan lagi.

Tak lama berselang, panitia melakukan gladi bersih yang langsung mendapat pengawasan dari SBY. Dan, sebelum magrib beranjak semua telah siap, berbarengan dengan kehadiran tamu undangan yang satu-persatu mulai berdatangan. ❑

MBO

H. Ahmad Muzani

Jatuh Bangun Metamorfosis Seorang
Wartawan Menjadi Politisi Tangguh

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PETUAH bijak berkata: Jalani saja kehidupan, hadapi segala tantangan yang ada nanti akan ketemu ujung jalan hidupmu. Jalan hidup setiap manusia tentu saja berbeda-beda, termasuk seorang tokoh politik nasional Ahmad Muzani. Siapa sangka, awal meniti karir sebagai seorang wartawan kemudian bermeta morfosis menjadi politisi ulung tingkat nasional.

Proses jatuh bangun dan kerja keras dari seorang wartawan bermeramorfosis menjadi politisi tangguh, mengiringi perjalanan seorang Ahmad Muzani yang dilakoninya dengan sangat serius, penuh perhitungan dan tak kenal menyerah.

H. Ahmad Muzani adalah nama lengkap dari seorang politisi partai nasional Gerindra yang dikenal sangat dekat dengan sosok mantan Danjen Kopassus Letjend. (Purn.) TNI Prabowo Subianto. Ia lahir pada tanggal 15 Juli 1968 di Tegal, Jawa Tengah.

Masa kecil Ahmad Muzani dilingkari dengan lingkungan beragama yang kuat, dari menginjak masa sekolah dasar hingga menengah. Muzani menjalani seluruh pendidikan dasar, menengah pertama hingga menengah atas di tanah kelahirannya, Tegal.

Pendidikan dasar dilaluinya di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, 1975-1981. Pendidikan menengahnya di SMP Ikhsaniyah, dan SMEA Kota Tegal. Ia lulus SMEA pada usia 19 tahun. Ia kemudian merantau dan meneruskan pendidikan tingginya di Ilmu Komunikasi, Universitas Ibnu Khaldun, pada 1989.

Sejak muda, potensi kepemimpinannya sudah terlihat. Di SMP dan sekolah menegah atas, Muzani selalu aktif di kegiatan OSIS, dan selalu menjadi Ketua.

Tapaki Karir

Perjalanan karir Ahmad Muzani sangat luar biasa dan bisa dijadikan inspirasi serta motivasi. Sebelum terjun ke dunia politik, pada tahun 1989 beliau meniti karir sebagai seorang wartawan di sebuah media cetak Majalah *Amanah*. Tapi, ia sempat juga menjajal sebagai seorang guru di SMA Muhammadiyah 13 Jakarta pada tahun 1990.

Namun, ketertarikannya pada profesi wartawan lebih besar maka Ahmad Muzani putuskan untuk terus konsisten menapaki karir sebagai seoarang wartawan. Karirnya di dunia jurnalisitk terus menanjak. Di sepanjang 1996-1999 Ahmad Muzani aktif berkarir di Radio Ramako menjadi konsultan berita sekaligus pembawa acara

talkshow politik, dan kemudian menjadi Direktur Radio Ramaloka. Karir di medianya terus berlanjut hingga menjadi Pemimpin Redaksi *Berpolitik.com.*

Perjalanan karirnya terus diimbangi dengan keaktifannya di berbagai organisasi. Di organisasi Pelajar Islam Indonesia, diakmenjabat Ketua Umum Cabang Kab/Kota Tegal pada tahun 1992 – 1997. Di organisasi Gerakan Pemuda Islam ia juga menjabat sebagai ketua pada periode 1997 – 2000. Di Persatuan Wartawan Indonesia, Muzani tercatat sebagai anggota pada tahun 1990 – 1996. Di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Ahmad Muzani tercatat sebagai Ketua Komite Organisasi periode 2004 – 2009.

Keluwesannya di karir jurnalistik dan organisasi membuat Ahmad Muzani mulai mengenal dan dikenal banyak orang dan dekat dengan berbagai kalangan. Suami Himmatul Aliyah dan ayah dari empat orang anak ini kemudian mulai memiliki ketertarikan dengan dunia politik.

Tahun 2008, Ahmad Muzani turut membidani kelahiran Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bentukan seorang tokoh nasional Letjend. TNI (Purn) Prabowo Subianto. Pilihannya untuk bergabung dengan Gerindra sangat tepat. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Gerinda untuk daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro.

Berkat usaha kerasnya, penggemar kuliner daerah ini mulus melenggang ke Senayan. Dia terpilih menjadi Wakil Rakyat untuk periode 2009-2014 dengan meraih 24.723 suara. Ia kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra. Selain duduk sebagai pimpinan fraksi, Muzani juga tercatat sebagai anggota Komisi I bidang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi. Dan, jabata yang diembannya adalah Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI.

Dalam masa reses sebagai anggota dewan, Ahmad Muzani sering turun ke dapilnya di Lampung I. Kariernya di partai juga sangat moncer. Karena kemampuannya, sejak tahun 2008, Dia dipercaya menjadi Sekjen Partai Gerindra.

Pada Pemilu berikutnya, dia kembali maju dari daerah pemilihan Lampung I dan terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Ahmad Muzani bertugas di Komisi 2. Penggemar jogging ini juga diberi tugas sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI 2014-2019.

Bersama Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan dan Muhaimin Iskandar dari PKB, Ahmad Muzani ditetapkan dan dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI pada tahun 2018. Pelantikan tersebut berdasarkan ýpetikan keputusan MPR Nomor 7/2018 tentang Penetapan Penambahan Wakil Ketua MPR masa jabatan 2014-2019.

Saat ini, di periode 2019-2024 Ahmad Muzani tetap terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi II, serta menjabat Wakil Ketua MPR RI di periode yang sama. Saat ditunjuk menjadi Pimpinan MPR, ia pun menyatakan kesiapannya. Muzani mengaku dipesani Prabowo agar terus menjaga marwah MPR saat bertugas sebagai Pimpinan di lembaga tersebut.

“Pesannya adalah bagaimana lembaga ini bisa betul-betul berfungsi sebagai lembaga yang bisa menjaga integritas bangsa, menjadi lembaga yang betul-betul tetap menjaga nilai Pancasila. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 secara baik,” ujar Muzani.

Berpolitik Harus Santun

Dalam berpolitik, Muzani selalu menekankan, baik kepada dirinya maupun kepada kader partai agar selalu berpolitik dengan santun dalam keadaan dan situasi apapun. Contohnya, saat Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon Presiden RI tahun 2019, Ahmad Muzani mengingatkan kepada seluruh kader untuk tidak marah menghadapi hoaks tentang Prabowo dan Gerindra. Ahmad Muzani bahkan menyarankan kader Partai Gerindra untuk meluruskan hoaks dengan cara santun.

“Kalau bisa dijawab dengan cara yang baik, dijelaskan bahwa itu fitnah bahwa itu hoaks bahwa itu enggak benar. Enggak usah emosi, enggak usah marah-marah, kalau ada fitnah dan hoaks di media sosial tidak usah disebarkan. Dengan menyebarkan berita hoaks maka itu akan menjadi rantai yang tidak terputus. Pokoknya dari mana pun kalau berita itu fitnah tidak usah dibagikan, malah dijawab dengan baik,” kata muzani.

Sebagai Pimpinan MPR, Ahmad Muzani sangat gencar melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Salah satu kegiatan sosialisasi yang digelarnya adalah di Ponpes Al-Arsyadi, Kec. Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akhir Juli 2023 lalu.

Kepada seluruh santri dan santriwati Ponpes Islam Al Arsyadi sebagai peserta sosialisasi, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Empat Pilar itu adalah Empat Pilar bernegara sebagai penyangga seluruh bangsa ini dalam bernegara.

“Empat pilar ini adalah satu kesatuan, tidak bisa diperas menjadi tiga pilar apalagi hanya satu pilar. Seperti sebuah bangunan, dia akan kuat jika ditopang empat pilar. Jika hanya tiga atau satu pilar,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bangunan itu akan mudah roboh," ujar dia.

Lebih jauh, Ahmad Muzani menjabarkan, pilar pertama Pancasila. Sebagai rumusan dalam bernegara yang telah disepakati para pendiri bangsa, Pancasila memastikan bahwa kehidupan seluruh anak bangsa Indonesia tetap dalam ideologi Pancasila.

"Pancasila itu adalah rumusan tengah kesepakatan para pendiri negara kita untuk mendirikan Indonesia, yang lahir dari hasil perdebatan yang panjang para Bapak Bangsa. Ada yang menginginkan negara didasarkan pada nasional sekuler tanpa perlu sentuhan agama. Di satu sisi berpendapat negara harus berdasarkan Islam, karena mayoritas pemeluk Islam. Dari hasil pemikiran yang dalam dan panjang, keluarlah Pancasila sebagai jalan tengah sebagai dasar kita dalam bernegara," paparnya.

Terkait Pemilu 2024, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa betapa sangat pentingnya para santri yang juga sebagai generasi muda bangsa, berperan aktif menyukseskan sekaligus memberikan suara dengan benar dan bijak dalam proses demokrasi lima tahunan, yang akan dihadapi bangsa ini pada tanggal 14 Februari 2024. Proses di mana bangsa Indonesia harus mencari pemimpin yang bisa mewujudkan amanah konstitusi, yakni menciptakan rakyat yang adil dan makmur.

Dalam proses demokrasi itu, lanjut Muzani, selain akan mendapatkan pemimpin nasional yang amanah dan tangguh, rakyat akan mendapatkan juga wakil rakyat, baik pusat, provinsi, atau kabupaten dan kota yang juga amanah. Karena merekalah yang nantinya akan menjadi mitra pemerintah dalam membuat dan mengesahkan UU, menyusun anggaran dan melakukan pengawasan jalannya pemerintahan sesuai amanah UUD.

"Karena itu, saya mengajak agar suasana damai harus sama-sama kita jaga mulai saat ini, pra dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024, sebab itu merupakan tanggung jawab bersama. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini hanya ingin membawa pesan ini, pesan persatuan untuk saudara-saudaraku di Kalimantan Timur," tandasnya.

Ahmad Muzani juga sangat dekat dengan rakyat kecil, termasuk kaum petani. Saat berada di Kalimantan Timur, Muzani berkesempatan menyambangi Kelompok Tani Terpadu Berkat QAl Arsyadi langsung di perkebunannya, di Kelurahan Handil Baru. Di tengah perkebunan yang berbukit-bukit itu, Ahmad Muzani berbincang dengan para petani yang sebagian besar menanam pepaya jenis California.

"Tanami jagung dahulu, sebab jagung mempersubur tanah. Satu lagi, coba tanam bibit kelapa kopyor, nilai ekonomisnya tinggi itu," ujar Muzani. Muzani berharap produksi kebun rakyat akan bagus hasilnya dari sisi kuantitas dan kualitasnya sehingga akan menyejahterakan petani dan keluarganya. ❑

DER

DPD
Perekat Kesatuan Bangsa dan Penjaga Daerah

SEBAGAI negara kepulauan dengan komposisi etnis yang beragam, bahasa ibu yang berbeda, agama yang berlainan, serta persebaran penduduk yang menghuni kawasan pulau-pulau kecil sampai gunung-gunung tinggi, rasanya mustahil satu sistem kelembagaan politik saja akan mampu menampung seluruh perbedaan itu. Indonesia yang bersifat multikultural bukan sekedar mengakui kemajemukan/keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan tersebut, adanya etnisitas dianggap sebagai suatu kekayaan hakiki bangsa yang bisa digunakan untuk membentuk jalinan relasi sosial, sekaligus saling mengenal dan memperkaya budaya masing-masing.

Dalam hal ini, multikulturalisme mengakomodasi sekaligus dua hal dipertentangkan, yaitu "perbedaan" dan "kesetaraan." Dengan demikian, meskipun tingkat heterogenitasnya tinggi konflik vertikal dan horizontal dapat diredam karena masing-masing budaya diberi keleluasaan untuk menunjukkan identitasnya dan melaksanakan kehidupan secara lebih otonom, seraya mendapatkan pengakuan yang sama atas keberadaannya dan keunikannya masing-masing. Pada titik ini, dibutuhkan lembaga perwakilan daerah yang mencerminkan keberagaman dan perbedaan tetapi dalam bingkai kesetaraan sehingga menjadi perekat kesatuan bangsa.

Lembaga perwakilan daerah di Indonesia sebenarnya telah ada sejak era kolonial. Hanya saja persoalan utama yang selalu melingkupi lembaga perwakilan tersebut dari masa kolonial sampai Indonesia menjadi negara merdeka adalah tidak pernah hadirnya lembaga perwakilan daerah yang mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat nasional, dan menjadi perekat kesatuan bangsa. Politik telah menyempitkan keragaman ini hanya pada tataran fisik material saja, sedangkan pada tataran bangsa digiring pada "monokulturalisme" atau "penyeragaman budaya," dan dalam tataran pemerintahan selama periode demokrasi liberal (Orde Lama) dan demokrasi Pancasila (Orde Baru) selalu menampilkan karakter pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Kekuasaan selalu terpusat di tangan negara sehingga daerah selalu dalam posisi rawan. Kekayaan alam di daerah tidak sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan membangun daerah, tetapi sebaliknya pembangunan terpusat di Jawa, khususnya Jakarta.

Janji otonomi daerah dalam konstitusi lebih bersifat semu, karena hegemoni pusat terlalu kuat. Hegemoni yang terlalu kuat tersebut menyebabkan beberapa daerah menunjukkan ketidakpuasan dan bahkan sebagian membangkang dan ingin melepaskan diri dari ikatan NKRI. Ketegangan tersebut termanifestasikan lewat sejumlah pergolakan yang dilakukan oleh daerah, yang bersumber dari ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah pusat dan ketimpangan hubungan pusat dan daerah, seperti: (i) Federasi Sumatera pada akhir masa revolusi, yang dimotori oleh Tengku Mansoer, Wali Negara Sumatera Timur, peristiwa ini menunjukkan terbuka pilihan untuk pembangunan negara di Indonesia waktu itu; (ii) Peristiwa Minangkabau Raya yang mencakup wilayah Riau dan Jambi, yang melancarkan gerakan untuk memisahkan diri dari Minangkabau, karena tidak puas dengan gagasan yang dipaksakan mengenai Minangkabau Raya, dan tidak suka dengan dominasi elit Minangkabau yang berlebihan di

Oleh:
H.M. Syukur
Ketua Kelompok DPD di MPR RI

Provinsi Sumatera Tengah; (iii) Pemberontakan etnis Dayak di Kalimantan Tengah yang dimulai perang untuk memperoleh perwakilan Dayak dalam negara kolonial, dan upaya sesudah perang untuk membentuk daerah Dayak Besar dalam kerangka negara federal Belanda; (iv). Gerakan Kahar Muzakar untuk melawan pemerintah pusat dengan mendirikan Negara Islam Indonesia; (v). Peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958, dan Riau Merdeka pada awal era reformasi. Tetapi pemerintah pusat dalam menyelesaikan pergolakan tersebut selalu menggunakan jalan pintas dengan mengirimkan kekuatan bersenjata, bukannya mencari akar masalahnya dan mencari jalan keluar yang adil dan seimbang.

Kehadiran DPD berada dalam wilayah itu tujuan kelahirannya adalah: (i). Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; (ii). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dalam perumusanasional berkaitan dengan negara dan daerah; (iii). Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang (Lemkaji MPR: 2016). Pengertian daerah di sini tentu bukanlah daerah per daerah, melainkan wilayah geokultural dalam bingkai yang majemuk. Kehadiran DPD dapat menjadi perekat kesatuan bangsa yang besar dan majemuk ini.

Penjaga Daerah

Sebagai lembaga negara yang dibentuk di era reformasi, DPD sebagaimana gagasan dari para perumus perubahan UUD 1945, secara filosofis dan konstitusional adalah penjaga daerah. Konsepsi penjaga daerah ini merujuk pada pertukaran gagasan dari para perumus Perubahan UUD 1945 yang tergabung dalam PAH I BP MPR ketika merumuskan pembentukan DPD. Dalam pergulatan pemikiran tersebut, tersimpulkan bahwa sifat perwakilan DPD adalah *teritoriergebied* (perwakilan teritori) bukan *personengebied* (perwakilan orang). Sebagai *teritoriergebied* atau *regional representation* maka DPD harus menjadi penjaga daerah, yaitu penjaga hak konstitusional daerah. Hak-hak konstitusional daerah itu di antaranya termaktub dalam Pasal 18B, Pasal 22D, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, tugas dan kedudukan DPD bukan dalam penyeimbang kedudukan DPR dalam sistem lembaga perwakilan sebagaimana dipahami secara konvensional, tetapi bagaimana dipahami secara filosofis dan konstitusional.

DPD penjaga daerah adalah menjadi pengawal dan penjaga atas jaminan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sumber daya dan sumber daya ekonomi lainnya, termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pendek kata, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus benar-benar dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan memahami latar historis, fiolosif, dan empirik tersebut maka kelembagaan DPD perlu terus dikuatkan agar DPD menjadi perekat kesatuan bangsa dan menjadi penjaga daerah dalam rangka keadilan, kemakmuran dalam bingkai NKRI. ❑

Agar Hukum Tidak Berkiblat ke Barat

Ada kegelisahan dari Guru Besar UGM atas produk hukum di Indonesia. Penyebabnya, produk hukum di Indonesia berkiblat pada Hukum Barat, sehingga membuat produk hukum yang ada menjadi inkonsisten dan inkoheren pada Pancasila. Agar produk hukum yang ada mampu berpijak pada realitas budaya hukum masyarakat Indonesia maka ditulis buku yang mengupas tentang dasar Negara.

UNTUK kesekian kalinya, Prof. Dr. H. Kaelan, M.S., menulis buku tentang Pancasila. Buku yang mengupas dasar negara itu berjudul: *Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*. Buku karya Guru Besar Filsafat UGM itu terbit atas dukungan dari Badan Pengkajian MPR. Tak heran bila dalam buku itu ada *Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR* Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

Di halaman v, Djarot Saiful Hidayat yang juga politisi PDI-Perjuangan itu menulis, dalam pembangunan hukum nasional, Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai nilai dasar bernegara (*groundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Hal demikian, menurut Djarot, menuntut pembentukan kebijakan pembangunan hukum yang rasional, yaitu menjunjung nilai-nilai spiritual, etik, dan moral, dibangun berdasar prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mengabdi pada kepentingan nasional, dan di atas prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam *Kata Pengantar* halaman vii, kita bisa tahu mengapa buku itu ditulis. Dijelaskan bahwa buku ini diilhami oleh dinamika perkembangan hukum di Indonesia yang kurang berpijak pada realitas budaya hukum masyarakat Indonesia sendiri sebagai *kausa materialis* filosofi bangsa Indonesia.

Produk hukum di Indonesia lazimnya justru berkiblat pada pemikiran-pemikiran Barat sehingga konsekuensinya produk hukum kurang relevan dengan realitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan kajian hukum normatif, fakta menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan banyak yang inkosisten dan inkoheren dengan dasar filsafat negara Indonesia, Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Untuk kali ini, buku karya Prof. Kaelan memiliki ketebalan xvi + 410 halaman. Sebagai buku yang mengupas tentang Pancasila, 99% judul bab yang ada menyematkan kata Pancasila. Latar belakang dunia akademisnya di Fakultas Filsafat, membuat apa yang ditekuninya itu menjadi analisa untuk membedah Pancasila secara mendalam, lihat Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab VI.

Pentingnya filsafat, menurut Prof. Kaelan, dimengerti oleh para Pendiri Bangsa. Hal demikian terungkap dalam Halaman 42 yang menerangkan, para pendiri negara menyadari akan pentingnya dasar filosofi, kemudian melakukan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh badan yang akan meletakkan dasar filsafat bangsa dan Negara, yaitu BPUPKI.

Lebih lanjut di halaman yang sama, Prof. Kaelan menyebut, filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Terkait semiotika hukum Pancasila, di halaman 248 dijelaskan, semiotika hukum berkembang setelah munculnya pemikiran semiotika, terutama dalam hubungannya dengan filsafat bahasa. Pada tahun 1980-an berkembang suatu sintesis pemikiran antara semiotika dengan hukum yang kemudian terkenal dengan semiotika hukum. Hal ini sebagai reaksi kajian kritis terhadap penggunaan tanda bahasa dalam suatu produk hukum.

Di halaman 265 dibahas khusus mengenai *Semiotika Hukum Pancasila*. Mengutip dari kalimat yang ada dalam penjelasan di halaman ini, kita bisa mengambil penggalan yang menyatakan, hukum itu adalah suatu sistem semiotika, yaitu merupakan suatu sistem tanda yang berfungsi untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat. ❑

AWG

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

Buku Digital MPR RI

MUDAH DI AKSES
EFEKTIF & EFISIEN

MAJALAH MAJELIS, JURNAL,
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN
MPR RI DALAM GADGET ANDA

“Segera Unduh Aplikasinya!
DI PLAY STORE
http://bit.ly/bukudigitalmprri

MPR.GO.ID @MPRGOID

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MEDIA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI